BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan keuangan dibuat untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik guna untuk kepentingan masyarakat.

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dalam penyusunan laporan ini dengan berbagai cara dan upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkret tentang seluruh aktivitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun dengan menggunakan basis akrual adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*user*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
8. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
9. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam.

a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah sebagian dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
g. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
k. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
n. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
o. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
v. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Barito Selatan;
w. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual;
x. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
y. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

z. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan
aa. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.3.1. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari PPKD dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran
LRA memuat informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

c. Neraca.
Neraca memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun-akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan disajikan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan SKPD selaku BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan – LRA
5.1.2. Belanja
5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran

5.1.4. Pembiayaan
5.1.5. SILPA
5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.5. Lain-lain
5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3. Penjelasan Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4. Penjelasan Laporan Operasional
5.4.1. Pendapatan – LO
5.4.2. Beban
5.4.3. Kegiatan Non Operasional
5.4.4. Surplus/Defisit LO
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1. Ekuitas Awal
5.6.2. Surplus/Defisit – LO
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2024 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

a. Persentase Penduduk Miskin sebesar 4,83%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,72%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,12%, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,33%%;
c. *Gini Ratio* Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan *Gini Ratio* tahun 2024 sebesar 0,284%;
d. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebesar 72,36% sementara di tahun 2023 sebesar 71,65%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,70%;
f. Tingkat inflasi sebesar 1,33%;
g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah Rp8.898,70 (miliar rupiah) atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,70% di tahun 2023; dan
h. Tahun 2024 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor pertambangan memberi sumbangan yang besar dalam pembentukan PDRB yaitu 20,96%, kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor pertanian 16,52% dan sektor transportasi pergudangan 12,17%.

2.1.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten /Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan menggambarkan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin

Tabel 2.1.1.1 Data Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(turun)
1	Kab/Kota (%)	4,72	4,83	**(0,11)**
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	6,66	6,87	**(0,17)**
3	Provinsi (%)	5,11	5,17	**(0,06)**
4	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	8,57	**(0,79)**
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.41	0,21	**(0,20)**
6	**Indeks Keparahan Kemiskinan**	**0,06**	**0,03**	**(0,03)**

Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel, Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2024

Penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2023 sebesar 6,66 (ribu orang) mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 6,87 (ribu orang) atau naik sebesar 0,21 orang. Tingkat kemiskinan di ingkat provinsi sebesar 5,17% pada tahun 2023 dan sebesar 5,11% di tahun 2024 atau turun sebesar 0,06%. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 turun sebesar 0,21% atau semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 0,41%. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2024 sebesar 0,03% atau turun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,06%.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan,tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 4,12%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,33	4,12	**0,79**
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,01	**(0,09)**
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,35	4,90	**(0,45)**
4.	Peringkat Provinsi	*)	*)	***)**
5.	**Peringkat Nasional**	***)**	***)**	***)**

Keterangan: *) tidak tersedia data Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel

Sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,33% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Dengan demikian TPT Kabupaten Barito Selatan masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional yang sebesar 4,01% dan sebesar 4,90%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 0,29 poin, dan 0,28 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 *Gini Ratio* Kabupaten Barito Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,289	0,284	**(0,005)**
2	Tingkat Provinsi	0,317	0,301	**0,016**
3	Tingkat Nasional	0,388	0,301	**0,087**
3	Peringkat Provinsi	*)	*)	
4	**Peringkat Nasional**	***)**	***)**	

Sumber Dokumen: BPS Barsel/BPS Pusat Statistik

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 72,36 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,65	72,36	**0,71**
2	Provinsi	72,20	74,28	**(2,08)**
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	**(0,63)**
4	Peringkat Provinsi	*)	*)	***)**
5	**Peringkat Nasional**	***)**	***)**	***)**

Sumber Dokumen BPS Kab. Barsel

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 72,36 poin yang merupakan peringkat ke-9 di Provinsi Kalimantan Tengah. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,65 poin mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita. Rincian kenaikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.2 Variabel pencapaian IPM

No	Unsur IPM	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun)
1	**Rata-rata lama sekolah**			
	Barito Selatan	12,80	9,22	**3,58**
	Provinsi	12,76	8,81	**3,95**
2	**Harapan Lama Sekolah**			
	Barito Selatan	12,80	13,00	**0,20**
	Provinsi	12,76	12,77	**0,01**
3	**Angka Harapan Hidup**			
	Barito Selatan	67,75	72,79	**5,04**
	Provinsi	70,27	73,73	**3,46**
4	**Pengeluaran per kapita disesuaikan (Ribu Rupiah)**			
	Barito Selatan	12.067	12.508	**0,441**
	Provinsi	**11.878**	**12,303**	**0,425**

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas

perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2024.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	Kabupaten/Kota					Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (rupiah)	4.240.610,20	4.331.028,60	4.602.951,40	4.753.493,70	4.975.998,80	118.682,30	3.139.084.50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,9	2,13	6,28	3,27	4,70	6,49	5,00
3	Peringkat Provinsi	12 dari 14	12 dari 14	6 dari 14	10 dari 14	09 dari 14	0	0

Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel/Kalteng

Selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan dan peningkatan. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan -2,90% dan pada kurun waktu tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan sebesar 3,27%. Kemudian pada tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan meningkat lagi sebesar 4,70%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*): inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi sedang (*galloping inflation*): inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi berat (*high inflation*): kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (*hyper inflation*): jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Inflasi yang dihitung oleh BPS ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Secara umum, kondisi inflasi pada daerah tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.1.6.1 Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Inflasi	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kalimantan Tengah	1,03	0,3	0,24	0,86	0,35	0,66	1,21
Sampit	1,18	0,27	0,28	0,66	0,17	0,7	1,47
Palangka Raya	0,88	0,31	0,22	0,99	0,47	0,63	1,07

Sumber Dokumen: BPS Kalteng

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2019-2024

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.173.035,60	1.207.211,90	1.212.789,20	1.305.078,80	1 372 954,90	1.470.199,99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.151.952,10	837.043,50	1.056.495,30	2.123.596,90	2 010 384,20	1.864.999,92
C	Industri Pengolahan	365.376,90	372.628,80	390.478,90	433.488,60	418 927,30	437.279,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.475,80	3.836,70	4.126,60	4.330,70	4 678,10	4.999,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.109,20	10.714,60	11.800,00	12.778,70	14 026,50	14.497,36
F	Konstruksi	435.806,20	400.490,60	364.921,80	395.032,20	446 401,40	494.772,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	512.698,00	539.613,30	548.929,00	578.398,30	638 541,50	695.772,41
H	Transportasi dan Pergudangan	763.640,10	773.238,60	751.608,30	833.540,80	916.033,37	1.081.820,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136.965,00	136.046,50	140.637,90	151.568,50	916,170,80	182.373,16
J	Informasi dan Komunikasi	82.424,30	99.919,50	107.767,20	112.880,00	163.159,60	116.244,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	300.936,10	340.008,00	364.840,30	374.106,40	112 746,20	430.694,03

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	155.838,30	166.366,60	174.570,50	179.523,60	401 033,70	201.077,07
M, N	Jasa Perusahaan	1.207,50	1.144,50	1.088,40	1.128,60	194 722,10	100.356,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	455.557,10	503.342,40	536.417,60	535.139,40	1 310,10	638.632,82
P	Jasa Pendidikan	497.488,10	527.347,60	584.835,20	623.000,90	578 664,40	721.287,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	184.235,80	228.067,10	302.750,50	335.307,00	360 556,40	381.286,34
R, S, T, U	Jasa lainnya	138.379,90	130.931,50	127.076,50	132.726,50	148 418,70	158.955,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.369.126,20	6.277.921,70	6.681.133,30	8.131.627,00	8 481.240,70	8.894.517,61

Sumber Dokumen: BPS Kab. Barsel/Kalteng

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa APBD merupakan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada antara lain:

a. Peningkatan pendapatan daerah dan penegakan Perda di bidang pendapatan;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini bidang pendapatan daerah;

c. Menata kembali sistem database objek dan wajib pajak serta retribusi daerah;
d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan penerimaan daerah;
e. Melakukan pendekatan/konsultasi secara *continue* dengan pemerintah pusat;
f. Menata ulang aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah;
g. Dalam rangka pencapaian target Pendapatan Daerah, maka strategi dan prioritas pendapatan asli daerah yang dilakukan antara lain:

   Meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui;

   1) Peningkatan database potensi pendapatan;
   2) Mengintensifkan sosialisasi Peraturan Daerah;
   3) Penegakan Peraturan Daerah;
   4) Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun daerah;
   5) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah;
   6) Memaksimalkan peran SKPD teknis terkait dalam mengelola penerimaan PAD dan mengoptimalkan peran kecamatan;
   7) Menetapkan produk unggulan PAD di setiap SKPD dan Kecamatan;

h. Mengembangkan sumber–sumber penerimaan melalui;
   1) Identifikasi potensi pajak baru dari setiap jenis pungutan.
   2) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan penerimaan PAD lainnya.
   3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap potensi dan sumber-sumber penerimaan daerah antar unit kerja Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pihak ketiga bidang pendapatan.
   4) Mengoptimalkan pungutan dengan secara bertahap akan sinkronisasi proses pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendefinisikan kembali Tupoksi masing-masing SKPD.
   5) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan yang menjadi potensi dan unggulan daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Mengalokasikan Anggaran Belanja Wajib yang terdiri dari:
   Mengalokasikan Anggaran Belanja Wajib yang terdiri dari: alokasi anggaran belanja yang besarannya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, belanja fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari Belanja Daerah diluar gaji, belanja peningkatan modal dan sarana transportasi sekurang-kurangnya 10 persen dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor; Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota.

2. Mengalokasikan anggaran Belanja Mengikat yang terdiri dari:
   Alokasi anggaran Belanja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); Alokasi anggaran Belanja Bunga; Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan; Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan Alokasi anggaran.

3. Mengalokasikan anggaran Belanja untuk program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

4. Mengalokasikan anggaran belanja penunjang pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

Kebijakan Belanja Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. secara garis besar diarahkan pada beberapa Prinsip Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut antara lain :

1. Pelaksanaan Program Prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
2. Penyesuaian Belanja Pegawai yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN;
3. Penyesuaian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan pemenuhan kewajiban atas kurang salur Belanja Bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Optimalisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja maupun pelayanan publik;
5. Penyesuaian/Pergeseran anggaran belanja Program/Kegiatan pada SKPD/Unit Kerja maupun antar SKPD/Unit Kerja dalam rangka optimalisasi Belanja Daerah;
6. Tertib, taat, pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi, ekonomi, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di kabupaten barito selatan;
7. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang APBD.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan (financing) disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan SiLPA dan penerimaan kembali piutang. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan kondisi umum pembiayaan, maka kebijakan umum pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Mencatat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai Penerimaan Daerah.
2. Menganggarkan penyertaan modal untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kebijakan Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaporannya disajikan dalam buku tersendiri dalam bentuk matrik dan kolom realisasi.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diklasifikasikan menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.850.935.885.078,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp90.112.759.982,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.750.480.034.315,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10.343.090.781,00. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebesar Rp1.831.871.547.012,98 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp83.690.122.826,98, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.743.463.544.883,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp4.717.879.303,00.
2. Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.949.005.324.265,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.143.558.555.198,22, Belanja Modal sebesar Rp577.536.028.573,78, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.160.352.466,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp223.750.388.027,00. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.765.648.332.753,40 terdiri dari realisasi Belanja

Operasi sebesar Rp1.020.479.418.028,50 realisasi Belanja Modal sebesar Rp532.177.064.624,90 realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp423.718.824,00 dan, Transfer sebesar Rp212.568.131.276,00.

2.3.1. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan yang belum dilakukan secara maksimal, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan dana pelaksanaan APBD sampai tahun 2024.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang keuangan sehingga sangat berpengaruh terhadap penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Kondisi wilayah Kabupaten Barito Selatan yang masih belum secara keseluruhan terjangkau melalui jalur darat, sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.
4. Kondisi Iklim/cuaca yang tidak tetap sehingga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisis capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.850.935.885.078,00 dengan realisasi sebesar Rp1.831.871.547.012,98 atau direalisasikan sebesar 98,97%.

Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.765.648.332.753,40 dari anggaran sebesar Rp1.949.005.324.265,00 atau terealisasi sebesar 90,59%. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp1.020.479.418.028,50 dari anggaran sebesar Rp1.143.558.555.198,22. atau 89,24%. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp532.177.064.624,90 atau 92,15% dari anggaran belanja modal sebesar Rp577.536.028.573,78. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp423.718.824,00 atau 10,18% dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp4.160.352.466,00. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp212.568.131.276,00 atau 95,00% dari anggaran belanja transfer sebesar Rp223.750.388.027,00.

Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp97.969.438.914,19 atau 99,90% dari anggaran pembiayaan neto sebesar Rp98.069.438.914,00.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Pada subbab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam tahun 2024 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan Kabupaten Barito Selatan telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan *summary* sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan

1. Fungsi Pendidikan
   a. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan;
   b. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
   c. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan;
   d. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
   e. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
   f. Sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik;
   g. Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
   h. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan; dan

i. Tingginya indeks biaya pendidikan luar biasa dan inklusif.

2. Fungsi Kesehatan
   a. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
   b. Masih terbatasnya tenaga kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di daerah yang terpencil;
   c. Masih terbatasnya peralatan kesehatan, logistik dan sarana penunjang pelayanan; dan
   d. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pencapaian pembangunan berwawasan kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menolong kesehatannya.

3. Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
   a. Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program;
   b. Masih kurangnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
   c. Mampu menolong kesehatannya

4. Fungsi Kependudukan
   a. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif;
   b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan; dan
   c. Database administrasi kependudukan belum sepenuhnya akurat.

5. Fungsi Transmigrasi
   a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung transmigran;
   b. Tidak tersedianya pasar untuk pemasaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi;
   c. Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi;
   d. Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai;
   e. Terbatasnya infrastruktur pendukung pembuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran;
   f. Lahan usaha yang kurang subur (marginal) karena rendahnya pH tanah; dan
   g. Keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan.

B. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

1. Fungsi Pekerjaan Umum
   a. Kurangnya penyediaan data yang akurat dan cepat;
   b. Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah yang cukup besar;
   c. Jaringan jalan belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal;
   d. Jaringan irigasi belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal; dan
   e. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk menjaga lingkungan permukiman yang sehat dan bersih.

2. Fungsi Perhubungan
   a. Kurangnya partisipasi masyarakat dan belum adanya peran investor;
   b. Masih kurangnya dampak yang positif dari pembangunan sektor perhubungan;
   c. Belum lancarnya pendistribusian barang dan jasa;
   d. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama; dan
   e. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi.

3. Fungsi Lingkungan Hidup
   a. Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
   b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   c. Validasi data kependudukan belum maksimal;
   d. Rendahnya akses terhadap modal;
   e. Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan; dan
   f. Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.

4. Fungsi Kehutanan
   a. Terjadinya penurunan fungsi kawasan hutan lindung;
   b. Permukaan air sungai pada saat musim kemarau dan musim hujan sangat fluktuatif dan mulai tercemar; dan
   c. Meningkatnya kerusakan DAS, gangguan erosi, pencemaran air, pertambangan liar, rusaknya fungsi hutan bakau, polusi udara perkotaan, limbah padat dan menurunnya potensi sumber daya hayati dan sumber daya genetik hutan.

C. Bidang Ekonomi

1. Fungsi Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
   a. Komoditas produk unggulan daerah masih belum jelas;
   b. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
   c. Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM;
   d. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha; dan
   e. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan.

2. Fungsi Pertanian
   a. Rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
   b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
   c. Agribisnis perbesaran belum berkembang optimal; dan
   d. Belum ada fokus komoditas daerah yang bersinergi dengan pengembangan pemasaran dan permasalahan umum lainnya.

3. Fungsi Peternakan
   a. Rendahnya peningkatan populasi dan produksi ternak;
   b. Luasan dan sebaran lahan potensial untuk pengembangan ternak belum terdata status dan kepemilikannya;

c. Belum maksimalnya penerapan Teknologi dan Sistem Informasi;
d. Masih merebaknya ancaman penyakit menular;
e. Masih tingginya pemotongan betina produktif;
f. Masih rendahnya ketersediaan bibit, pakan dan pemasaran;
g. Masih rendahnya akses untuk mendapatkan permodalan;
h. Terbatasnya jumlah tenaga medis, paramedis dan petugas teknis;
i. Terbatasnya sarana dan prasarana bidang peternakan; dan
j. Belum berkembangnya kelembagaan petani peternak/ pemberian status kelompok ternak

4. Fungsi Perikanan
   a. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha;
   b. Permasalahan implementasi kebijakan Tata Ruang;
   c. Kurangnya dukungan permodalan usaha perbankan dan lembaga keuangan lainnya; dan
   d. Maraknya kegiatan penangkapan ikan tidak sah (*illegal fishing*).

5. Fungsi Ketahanan Pangan
   a. Rendahnya Kapasitas SDM pelaku usaha masih dan kelembagaannya;
   b. Rendahnya adopsi inovasi teknologi;
   c. Kurangnya dukungan permodalan usaha perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
   d. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
   e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi produk lokal; dan
   f. Peran penyuluh pertanian masih belum optimal.

D. Bidang Pemerintah

1. Fungsi Pengawasan Pembangunan

   a. Masih belum adanya reward dan punishment;
   b. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak tepat waktu;
   c. Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu;
   d. Masih rendahnya sarana, prasarana, sistem dan prosedur pengawasan;
   e. Rendahnya upaya penyelesaian hasil temuan; dan
   f. Cepatnya perubahan regulasi.

2. Fungsi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   a. Kebijakan Perencanaan di SKPD belum mengacu pada dokumen perencanaan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;
   b. Kepatuhan SKPD di Kabupaten Barito Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian (pelaporan pembangunan);
   c. Masih belum optimalnya koordinasi antar lembaga;
   d. Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik;
   e. Belum mengarah pada peningkatan kinerja;
   f. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan;

g. Fungsi pengendalian dalam pemanfaatan ruang belum optimal;
h. Pemanfaatan data (informasi) statistik dan pembangunan belum optimal; dan
i. Sistem dan prosedur pelaporan wajib pajak belum optimal.

3. Fungsi Kepegawaian
   a. Kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur;
   b. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
   c. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum dilaksanakan secara optimal;
   d. Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja;
   e. Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
   f. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas kualitas, distribusi dan komposisi penyebaran sumber daya aparatur, khususnya tenaga guru dan kesehatan; dan
   g. Budaya kerja aparatur belum optimal.

4. Fungsi Pelayanan Perizinan
   a. Pelayanan perizinan masih tumpang tindih; dan
   b. Penyelenggaraan perizinan pada dasarnya baru menyentuh birokrasi perijinan.

5. Fungsi Keamanan dan Ketertiban
   a. Belum tertatanya pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang emperan;
   b. Belum tertatanya bangunan di sepanjang jalan-jalan utama; dan
   c. Banyaknya bermunculan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

6. Fungsi Arsip dan Perpustakaan
   a. Informasi penting yang belum sesuai dengan standar kearsipan;
   b. Belum optimalnya pembinaan kearsipan pada SKPD;
   c. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan;
   d. Kurangnya khazanah arsip;
   e. Belum terwujudnya Depo Arsip yang representatif;
   f. Masih kurangnya minat baca di kalangan masyarakat; dan
   g. Masih rendahnya Kualitas perpustakaan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi dan praktik - praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
   a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
   b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
   c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
   d. Dapat diverifikasi;
   e. Mencerminkan kehati-hatian; dan
   f. Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya;
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan:

1. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan -LO, beban, pendapatan - LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
3. Peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2024, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang mencakup 31 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

Tabel 4.1 1 SKPD pada Pemerintah kabupaten Barito Selatan

NO	KODE SKPD	BADAN / DINAS / UNIT SATUAN KERJA
1	1.01.0.00.0.00.01	DINAS PENDIDIKAN
2	1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN
3	1.03.0.00.0.00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SKPD	BADAN / DINAS / UNIT SATUAN KERJA
4	1.04.2.10.0.00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	1.05.0.00.0.00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	1.05.1.06.0.00.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	1.06.2.13.0.00.01	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	2.07.3.32.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	2.08.2.14.0.00.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	2.09.3.25.3.27.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2.12.0.00.0.00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2.15.0.00.0.00.01	DINAS PERHUBUNGAN
14	2.16.2.20.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	2.18.0.00.0.00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	2.19.3.26.2.22.01	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	2.23.2.24.0.00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	3.30.2.17.3.31.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
19	4.01.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH
20	4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DPRD
21	5.01.5.05.0.00.01	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
22	5.02.0.00.0.00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23	5.03.0.00.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24	6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT
25	7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN DUSUN HILIR
26	7.01.0.00.0.00.02	KECAMATAN DUSUN SELATAN
27	7.01.0.00.0.00.03	KECAMATAN DUSUN UTARA
28	7.01.0.00.0.00.04	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
29	7.01.0.00.0.00.05	KECAMATAN JENAMAS
30	7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN KARAU KUALA
31	8.01.0.00.0.00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Arus Kas (LAK);
5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan, berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi terdiri atas:
   a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi akun
2. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
3. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
   a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
   b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

4.3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual

1. SAPD terdiri dari:
   a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
   b. Sistem Akuntansi SKPKD.
2. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
3. Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.

4.4. Bagan Akun Standar

1. BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
3. BAS terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
   a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
   b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
   c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
   d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
   e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek: dan
   f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek.
4. Kode akun terdiri atas:
   a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
   b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
   c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
   d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
   e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
   f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
   g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
   h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah tidak terbatas pada:
1. masyarakat;
2. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

4.4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

4.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

4.4.3. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode.

4.4.3.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.4.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan lain atau lembaga internasional.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

4.4.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.4.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut.

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan.

4.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

4.4.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.5. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

BAB V
PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.831.871.547.012,98	1.254.586.705.889,11

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah. Demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp1.831.871.547.012,98 atau 98,97% dari pagu anggaran sebesar Rp1.850.935.885.078,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.254.586.705.889,11, maka realisasi pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp577.284.841.123,87 atau 46,01%. Rincian realisasi Pendapatan TA 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.1 Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	90.112.759.982,00	83.690.122.826,98	92,87	72.039.464.520,11	11.650.658.306,87
2	Pendapatan Transfer	1.750.480.034.315,00	1.743.463.544.883,00	99,60	1.181.336.946.369,00	562.126.598.514,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.343.090.781,00	4.717.879.303,00	45,61	1.210.295.000,00	3.507.584.303,00
Jumlah		**1.850.935.885.078,00**	**1.831.871.547.012,98**	**98,97**	**1.254.586.705.889,11**	**577.284.841.123,87**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
83.690.122.826,98	72.039.464.520,11

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp83.690.122.826,98 atau 92,87% dari anggaran sebesar Rp90.112.759.982,00,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp72.039.464.520,11 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.650.658.306,87 atau (16,17%). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah	23.006.250.000,00	14.168.868.108,32	61,59	18.091.398.991,87	(3.922.530.883,55)
2	Retribusi Daerah	7.667.361.486,00	4.768.725.847,00	62,20	7.731.937.413,00	(2.963.211.566,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.700.000.000,00	4.522.022.594,50	33,01	81.147.428,96	4.440.875.165,54
4	Lain-lain PAD yang Sah	45.739.148.496,00	60.230.506.277,16	131,68	46.134.980.686,28	14.095.525.590,88
Jumlah		**90.112.759.982,00**	**83.690.122.826,98**	**92,87**	**72.039.464.520,11**	**11.650.658.306,87**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
14.168.868.108,32	**18.091.398.991,87**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp14.168.868.108,32 atau 61,59% dari anggaran sebesar Rp23.006.250.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp18.091.398.991,87, maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.922.530.883,55 atau 21,68%. Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pajak Hotel dan Losmen	150.000.000,00	80.182.000,00	53,45	90.109.000,00	(9.927.000,00)
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan	5.500.000.000,00	4.230.780.408,00	76,92	4.544.066.575,87	(313.286.167,87)
3	Pajak Hiburan	21.250.000,00	2.857.000,00	13,44	2.585.000,00	272.000,00
4	Pajak Reklame	200.000.000,00	146.335.569,00	73,17	139.602.825,00	6.732744,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	8.000.000.000,00	5.688.575.834,00	71,11	6.153.467.738,00	(464.891.904,00)
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	36.682.800,00	73,37	0,00	36.682.800,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	600.000,00	2,40	600.000,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000,00	5.500.000,00	0,73	4.540.000,00	960.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.810.000.000,00	392.895.700,32	13,98	428.037.007,00	(35.141.306,68)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.000.000.000,00	950.720.547,00	31,69	1.186.452.628,00	(235.732.081,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00	2.633.738.250,00	105,35	5.541.938.218,00	(2.908.199.968,00)
Jumlah		**23.006.250.000,00**	**14.168.868.108,32**	**61,59**	**18.091.398.991,87**	**(3.922.530.883,55)**

Metode pembayaran Pajak Daerah menggunakan metode *Self Assessment* dan *Official Assessment*. *Self Assessmen*t memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Official Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah. *Official Assessment* terdiri dari Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah) serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Wajib Pajak Hotel per Desember 2024 berjumlah 14 (empat belas) wajib pajak. Peningkatan pendapatan terjadi karena ada penambahan jumlah wajib pajak, keaktifan penagihan pembayaran tepat waktu serta penagihan piutang pajak.

1. Jumlah Wajib Pajak Restoran per Desember 2024 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), terdiri dari wajib pajak rumah makan ada 75 (tujuh puluh lima) dan wajib pajak catering ada 4 (empat) di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2024 didukung oleh penambahan jumlah wajib pajak rumah makan, serta keaktifan kegiatan penagihan beberapa piutang tahun 2023 yang dapat terbayarkan pada tahun 2024.
2. Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Menurun, seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan pengguna jasa listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
3. Pajak air bawah tanah realisasi dapat mencapai 2,40% dan langsung dibayar secara aktif oleh Wajib Pajak.
4. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar (0,73%) dari target. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran dan kepedulian pemilik sarang burung walet untuk melaporkan, mendaftar, dan membayar Pajak Sarang Burung Walet. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 yaitu telah melakukan Pendataan Pemilik Sarang Burung Walet di 6 (enam) Kecamatan serta menghimbau agar mengurus untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C), pada tahun 2024 banyak Izin Usaha yang habis masa berlakunya dan masih kesulitan dalam melakukan proses perpanjangan izin. Dampak untuk tahun 2024 ada penurunan pendapatan pajak dibanding tahun 2023 yang didapat dari pelaku usaha yang izinnya masih berlaku dan upaya penagihan piutang.
6. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya 31,69% dengan kendala yang sama setiap tahunnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta masih menggunakan database wajib pajak yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat (KPP Pratama) tahun 2012 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk tahun 2024 Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara terus menerus melakukan sosialisasi, upaya penagihan dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak serta Penyesuaian NJOP di 3 (tiga) Kelurahan (Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat).
7. Realisasi BPHTB tahun 2024 sebesar 105,35% mengalami kenaikan dari target, namun demikian terjadi penurunan sangat besar dari tahun 2023, hal ini bergantung kepada banyaknya wajib pajak yang melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dan melaporkan transaksi jual beli tersebut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	**4.768.725.847,00**	**7.731.937.413,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp4.768.725.847,00 atau 62,20% dari anggaran sebesar Rp7.667.361.486,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp7.731.937.413,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.963.211.566,00 atau 38,32%.

Pendapatan Retribusi Daerah bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang tarifnya ditetapkan melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Retribusi Jasa Umum	2.234.926.670,00	1.766.743.330,00	79,05	2.089.833.975,00	(323.090.645,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	3.450.434.816,00	2.695.014.950,00	78,11	3.437.972.150,00	(742.957.200,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.982.000.000,00	306.967.567,00	15,49	2.204.131.288,00	(1.897.163.721,00)
Jumlah		**7.667.361.486,00**	**4.768.725.847,00**	**62,20**	**7.731.937.413,00**	**(2.963.211.566,00)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	**1.766.743.330,00**	**2.089.833.975,00**

Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp1.766.743.330,00 atau 79,05% dari anggaran sebesar Rp2.234.926.670,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.089.833.975,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp323.090.645,00 atau 2,07%. Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Pada kelompok Pendapatan Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Jasa Umum Tarif Retribusi Jasa Umum terdapat pada Perda Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini terjadi karena banyak pasien yang sudah menjadi anggota BPJS sehingga retribusi pelayanan kesehatan tidak bisa ditarik dan juga karena realisasi,Pajak Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dapat diprediksi perolehannya.dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Adapun realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp 114.884.500,00 dan Rp218.404.125,00.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp77.100.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), penerimaan keuangan ini

mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 Sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Retribusi Jasa Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dalam hal ini realisasi penerimaan keuangan ini menunjukan kondisi perekonomian Masyarakat Kabupaten Barito Selatan di bidang kesadaran Nasional mulai bangkit dan membaik.

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang turun sebesar 100 persen dari Tahun 2023 yakni sebesar Rp58.905.000,00. Penurunan signifikan tersebut sebagian besar dikarenakan Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kendaraan bermotor yang harus di uji. Dan terdapat penurunan Belum adanya Alat Uji Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan belum adanya perlengkapan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Adapun Rencana untuk Langkah–langkah yang diambil adalah dengan mengusulkan pembangunan balai pengujian secara bertahap dan upaya peningkatan kualitas sistem pelayanan dan SDM sebagai unsur utama pelayanan juga perlu mendapat perhatian untuk memberikan layanan prima kepada stakeholders dan sekaligus memberikan kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan. Serta pengusulan pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor dengan dana APBN dan APBD Provinsi, Adapun data di aplikasi SIPD menunjukan bahwa Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp58.905.000,00.
4. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp 76.593.200,00 Tidak ada Realisasi Hal tersebut karena adanya potensi UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang diluar target PAD, dan Kegiatan tera ulang ini memang diatur dalam perundang-undangan dan kegiatan tera ulang ini wajib dilakukan oleh pedagang bukan malah sabaliknya karena tera ulang ini untuk memastikan akurasi dari alat timbang/alat tukur. Maka dari Itulah pemerintah diminta hadir di masyarakat untuk memastikan keadilan dapat diterima seluruh masyarakat. Ditengah perekonomian untuk memastikan bahwa perdagangan dan pembeli sama-sama puas terfasilitasi karena keadilan sesuai alat ukur tidak ada yg dirugikan tapi kenyataan yang sekarang pedagang tersebut menolak petugas melakukan tera/tera ulang, dengan alasan tidak stabilnya penjualan di pasar.

Tabel 5.1.5 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	314.611.750,00	114.884.500,00	36,52	218.404.125,00	(103.519.625,00)
1	Dinas Kesehatan					
	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	77.100.000,00	85.259.000,00	110,58	118.137.000,00	
1	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00	61.200.000,00	122,40	91.291.000,00	(32.878.000,00)
2	Kecamatan Dusun Hilir	10.000.000,00	9.400.000,00	94,00	12.800.000,00	
3	Kecamatan Jenamas	3.600.000,00	2.649.000,00	73,58	2.280.000,00	
4	Kecamatan Karau Kuala	12.000.000,0	12.010.000,00	100,08	11.766.000,00	
	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	130.000.000,00	40.660.000,00	31,28	50.250.000,00	(9.590.000,00)
1	Dinas Perhubungan:					
	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	87.000.000,00	0,00	0,00	58.905.000,00	(58.905.000,00)
1	Dinas Perhubungan:					

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	1.546.214.920,00	1.525.939.830,00	98,69	1.567.544.650,00	(41.604.820,00)
1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM:	1.467.952.920,00	1.470.137.830,00	100,15	1.515.884.650,00	(45.746.820,00)
	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	80.000.000,00	0,00	0,00	76.593.200,00	(76.593.200,00)
1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM:	80.000.000,00	0,00	0,00	76.593.200,00	(76.593.200,00)
Jumlah		**2.234.926.670,00**	**1.766.743.330,00**	**79,05**	**2.089.833.975,00**	**(323.090.645,00)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	**2.695.014.950,00**	**3.437.972.150,00**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp2.695.014.950,00 atau 78,11% dari anggaran sebesar Rp3.450.434.816,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.437.972.150,00. maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp742.957.200,00 atau 21,61%. Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.6 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.244.434.816,00	656.685.450,00	52,77	598.959.650,00	57.725.800,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	24.000.000,00	17.607.000,00	73,36	18.516.000,00	(909.000,00)
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	6.000.000,00	5.075.000,00	84,58	5.040.000,00	35.000,00
4	Retribusi Terminal	7.500.000,00	100.000,00	1,33	1.442.000,00	(1.342.000,00)
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	93.570.000,00	58,48	86.350.000,00	7.220.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.750.000.000,00	1.841.997.500,00	105,26	2.709.864.500,00	(867.867.000,00)
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	110.000.000,00	24.605.000,00	22,37	17.800.000,00	6.805.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	148.500.000,00	55.375.000,00	37,29	0,00	55.375.000,00
Jumlah		**3.450.434.816,00**	**2.695.014.950,00**	**78,13**	**3.437.972.150,00**	**(742.957.200,00)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	**306.967.567,00**	**2.204.131.288,00**

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp306.967.567,00 atau 15,49% dari anggaran sebesar Rp1.982.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.204.131.288,00, maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.897.163.721,00 atau 86,07%. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.7 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.198.431.288,00	(2.198.431.288,00)
2	Retribusi Izin Trayek	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.000.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.970.000.000,00	306.967.567,00	15,58	0,00	306.967.567,00
Jumlah		**1.982.000.000,00**	**306.967.567,00**	**15,49**	**2.204.131.288,00**	**(1.897.163.721,00)**

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.522.022.594,50	**81.147.428,96**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp4.522.022.594,50 atau 33,01% dari anggaran sebesar Rp13.700.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp81.147.428,96, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.440.875.165,54 atau 5.472,60%. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari deviden dari PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2023, sebagai berikut.

Tabel 5.1.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Deviden PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah	13.700.000.000,00	4.522.018.416,50	33,01	81.147.428,96	4.440.875.165,54
Jumlah		**13.700.000.000,00**	**4.522.018.416,50**	**33,01**	**81.147.428,96**	**4.440.875.165,54**

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
60.230.506.277,16	**46.134.980.686,28**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp60.230.506.277,16 atau 131,68% dari anggaran sebesar Rp45.739.148.496,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp46.134.980.686,28, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.096.525.590,88 atau 30.55%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang terdiri dari pada Dinas/Badan sebagai berikut:

Tabel 5.1.9 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
2	Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	404.474.923,00	73.936.465,00	18,28	160.393.640,00	(86.457.175,00)
4	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	1.050.000.000,00	2.684.333.661,00	255,65	1.665.588.033,00	1.018.745.628,00
5	Pendapatan Bunga	300.182.999,00	12.298.169.404,22	4.096,89	353.701.333,30	11.944.468.070,92
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	150.000.000,00	74.873.907,00	49,92	101.710.737,00	(26.836.830,00)
7	Denda Retribusi Pelayanan Pasar	20.000.000,00	14.991.587,00	74,96	13.974.228,00	1.017.359,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.526.420,00	(3.526.420,00)
9	Pendapatan dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	3.124.149.144,00	(3.124.149.144,00)
10	Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	880.500.000,00	4.853.769.245,56	551,25	4.601.101.979,79	252.667.265,77
11	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	38.254.168.046,00	35.466.702.502,00	92,71	34.873.417.852,47	593.284.649,53
12	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	184.057.824,00	(179.057.824,00)
13	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.669.822.528,00	4.758.729.505,38	87,46	1.053.359.494,72	3.705.370.010,66
Jumlah		**45.739.148.496,00**	**60.230.506.277,16**	**131,68**	**46.134.980.686,28**	**14.096.525.590,88**

Adapun Kenaikan signifikan pendapatan bunga - LRA dikarenakan reklasifikasi dari pendapatan Transfer DBH remunerasi/bunga atas hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang diterima pada TA 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer	**1.743.463.544.883,00**	**1.181.336.946.369,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp1.755.756.146.629,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp1.750.480.034.315,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.181.336.946.369,00, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp562.126.598.514,00 atau 47,58%.

Pendapatan Transfer merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Bagi Hasil Pajak. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1.10 Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.709.514.351.000,00	1.682.796.719.789,00	98,44	1.121.636.866.688,00	561.159.853.101,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.965.683.315,00	60.666.825.094,00	148,09	59.700.079.681,00	966.745.413,00
Jumlah		**1.750.480.034.315,00**	**1.743.463.544.883,00**	**99,60**	**1.181.336.946.369,00**	**562.126.598.514,00**

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	1.682.796.719.789,00	**1.121.636.866.688,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp1.682.796.719.789,00 atau 98,44% dari anggaran sebesar Rp1.709.514.351.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.121.636.866.688,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp561.159.853.101,00 atau 50,03%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dana Perimbangan	1.631.371.153.000,00	1.602.375.206.713,00	98,22	1.046.631.901.838,00	555.743.304.875,00
2	Dana Desa	71.424.094.000,00	73.702.409.076,00	103,19	72.180.332.350,00	1.522.076.726,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)	6.719.104.000,00	6.719.104.000,00	100,00	2.824.632.500,00	3.894.471.500,00
Jumlah		**1.709.514.351.000,00**	**1.682.796.719.789,00**	**98,44**	**1.121.636.866.688,00**	**561.159.853.101,00**

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	1.602.375.206.713,00	**1.046.631.901.838,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp1.602.375.206.713,00 atau 98,22% dari anggaran sebesar Rp1.631.371.153.000,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.046.631.901.838,00 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp555.743.304.875,00 atau 53,10%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagai berikut

Tabel 5.1.12 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	899.328.217.000,00	864.534.116.455,00	96,13	348.753.476.882,00	515.780.639.573,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	570.600.708.000,00	591.322.819.252,00	103,63	535.152.039.000,00	56.170.780.252,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.047.802.000,00	53.206.175.347,00	87,15	70.945.605.212,00	(17.739.429.865,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.394.426.000,00	93.312.095.659,00	92,95	91.780.780.744,00	1.531.314.915,00
Jumlah		**1.631.371.153.000,00**	**1.602.375.206.713,00**	**98,22**	**1.046.631.901.838,00**	**555.743.304.875,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)	**864.534.116.455,00**	**348.753.476.882,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp864.534.116.455,00 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp899.328.217.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp348.753.476.882,00, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp515.780.639.573,00 atau 147,89%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut.

Tabel 5.1.13 Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagi Hasil dari PBB sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil dari PBB sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagi Hasil dari PBB sektor Perhutanan	9.182.006.000,00	6.534.391.800,00	71,17	21.301.331.882,00	(14.766.940082,00)
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP OP DN dan PPh Pasal 21	5.295.628.000,00	5.252.040.000,00	99,18	5.113.448.900,00	138.591.100,00
5	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	44.493.058.000,00	398.896.368.401,00	896,54	5.955.500.100,00	392.940.868.301,00
8	Bagi Hasil dari PBB Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	193.744.000,00	193.744.000,00	100,00	359.618.000,00	(165.874.000,00)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	839.019.939.000,00	452.513.730.254,00	53,93	314.710.022.000,00	137.803.708.254,00
10	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.313.556.000,00	(169.714.000,00)
Jumlah		**899.328.217.000,00**	**864.534.116.455,00**	**96,13**	**348.753.476.882,00**	**515.780.639.573,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)	**591.322.819.252,00**	**535.152.039.000,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp591.322.819.252,00 atau 103,63% dari anggaran sebesar Rp570.600.708.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 20232 sebesar Rp535.152.039.000,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.170.780.252,00 atau 10,50%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Pendapatan Transfer- Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	570.600.708.000,00	591.322.819.252,00	103,63	535.152.039.000,00	56.170.780.252,00
Jumlah		**570.600.708.000,00**	**591.322.819.252,00**	**103,63**	**535.152.039.000,00**	**56.170.780.252,00**

5.1.1.2.1.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

31 Desember 2024	31 Desember 2023
53.206.175.347,00	70.945.605.212,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp53.206.175.347,00 atau 87,15% dari anggaran sebesar Rp61.047.802.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp70.945.605.212,00, maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.739.429865,00 atau 25,00%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	35.399.099.000,00	28.668.499.100,00	80,99	35.105.819.500,00	(6.437.320.400,00)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.354.000.000,00	3.059.405.000,00	91,22	5.569.284.400,00	(2.509.879.400,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Bidang Kesehatan	8.119.819.000,00	7.721.125.112,00	95,09	16.543.415.152,00	(8.822.290.040,00)
6	DAK Bidang Pertanian	1.435.335.000,00	1.423.803.000,00	99,20	3.247.858.510,00	(1.824.055.510,00)
7	DAK Bidang Pendidikan	9.635.759.000,00	9.321.222.754,00	103,37	8.150.838.750,00	1.170.384.004,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan	3.103.790.000,00	3.012.120.381,00	97,05	2.328.388.900,00	683.731.481,00
Jumlah		**61.047.802.000,00**	**53.206.175.347,00**	**87,15**	**70.945.605.212,00**	**(17.739.429.865,00)**

5.1.1.2.1.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

31 Desember 2024	31 Desember 2023
93.312.095.659,00	91.780.780.744,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp93.312.095.659,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp100.394.426.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp91.780.780.744,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.531.314.915,00 atau 1,67%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagai berikut.

Tabel 5.1.16 Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BOS Reguler	21.787.110.000,00	19.427.094.794,00	89,17	19.763.204.754,00	(336.109.960,00)
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	0,00	1.593.430.000,00	0,00	1.638.680.000,00	(45.250.000,00)
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	56.480.708.000,00	56.256.278.500,00	99,60	42.061.390.990,00	14.194.887.510,00
4	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.967.250.000,00	1.475.437.500,00	75,00	1.434.250.000,00	41.187.500,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.102.254.000,00	10.909.896.765,00	63,79	11.301.887.500,00	(391.990.735,00)
7	Dana Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	11.122.949.000,00	(11.122.949.000,00)
8	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.057.104.000,00	2.907.248.100,00	95,10	2.082.155.500,00	825.092.600,00
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	742.710.000,00	0,00	943.140.000,00	(200.430.000,00)
10	Dak Non Fisik-Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	838.548.000,00	(838.548.000,00)
11	Dak Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	594.575.000,00	(594.575.000,00)
Jumlah		**100.394.426.000,00**	**93.312.095.659,00**	**92,95**	**91.780.780.744,00**	**1.531.314.915,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa	**73.702.409.076,00**	**72.180.332.350,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp73.702.409.076,00 atau 103,19% dari anggaran sebesar Rp71.424.094.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp72.180.332.350,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.522.076.726,00 atau 2,11%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa sebagai berikut.

Tabel 5.1.17 Dana Desa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dana Desa	71.424.094.000,00	73.702.409.076,00	103,19	72.180.332.350,00	1.522.076.726,00
Jumlah		**71.424.094.000,00**	**73.702.409.076,00**	**103,19**	**72.180.332.350,00**	**1.522.076.726,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa tersebut merupakan Dana Desa yang disalurkan dari Pemerintah Pusat untuk diteruskan kepada 86 desa di Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagai sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1** dan realisasinya pada **Lampiran 2.**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	**6.719.104.000,00**	**2.824.632.500,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.719.104.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.719.104.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.824.632.500,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.894.471.500,00 atau 137,88% Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.18 Dana Insentif Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dana Insentif Daerah	6.719.104.000,00	6.719.104.000,00	100,00	2.824.632.500,00	3.894.471.500,00
Jumlah		**6.719.104.000,00**	**6.719.104.000,00**	**100,00**	**2.824.632.500,00**	**3.894.471.500,00**

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
60.666.825.094,00	**59.700.079.681,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp60.666.825.094,00 atau 148,09% dari anggaran sebesar Rp40.965.683.315,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp59.700.079.681,00, maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp966.745.413,00 atau 1,33 %. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.19 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Bagi Hasil	40.815.683.315,00	60.666.825.094,00	148,64	59.530.079.681,00	1.136.745.413,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	150.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)
Jumlah		**40.965.683.315,00**	**60.666.825.094,00**	**148,09**	**59.700.079.681,00**	**966.745.413,00**

5.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2024	31 Desember 2023
60.666.825.094,00	**59.530.079.681,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.666.825.094,00 atau 148,64% dari anggaran sebesar Rp40.815.683.315,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp59.530.079.681,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp966.745.413,00 atau 1,62%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.1.20 Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.418.977.667,00	4.791.260.027,00	22,37	6.470.100.099,00	(1.678.840.072,00)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	5.823.442.658,00	116,47	6.835.831.818,00	(1.012.389.160,00)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.376.647.318,00	41.392.177.393,00	494,14	37.557.398.752,00	3.834.778.641,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	37.900.288,00	349.972.137,00	923,40	674.952.363,00	(324.980.226,00)
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	5.982.158.042,00	8.309.972.879,00	138,91	7.991.796.649,00	318.176.230,00
Jumlah		**40.815.683.315,00**	**60.666.825.094,00**	**148,64**	**59.530.079.681,00**	**1.136.745.413,00**

5.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	170.000.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp170.000.000,00 maka realisasi TA 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp170.000.000,00 atau 100%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.1.21 Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	150.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)
Jumlah		**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**	**(170.000.000,00)**

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.717.879.303,00	1.210.295.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.717.879.303,00 atau 45,61% dari anggaran sebesar Rp10.343.090.781,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.210.295.000,00 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.507.584.303,00 atau 289,81%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.22 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah	0,00	138.000.000,00	0,00	1.210.295.000,00	(1.072.295.000,00)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	10.343.090.781,00	4.579.879.303,00	44,28	0,00	4.579.879.303,00
Jumlah		**10.343.090.781,00**	**4.717.879.303,00**	**45,61**	**1.210.295.000,00**	**3.507.584.303,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah	**138.000.000,00**	**1.210.295.000,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.000.000,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.210.295.000,00, maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.072.295.000,00 atau (88,60%). Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah sebagai berikut.

Tabel 5.1.23 Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0,00	138.000.000,00	0,00	1.150.295.000,00	(1.012.295.000,00)
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,0	60.000.000,00	(60.000.000,00)
Jumlah		**0,00**	**138.000.000,00**	**0,00**	**1.210.295.000,00**	**(1.072.295.000,00)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	**138.000.000,00**	**1.150.295.000,00**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp138.000.000,00 dan Rp1.150.295.000,00 merupakan pendapatan hibah dari PT Adaro Indonesia.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00,

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.3.1.4 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	**0,00**	**60.000.000,00**

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp60.000.000,00 Sumbangan tersebut berupa Bantuan Keuangan Lumpsum Payment dari PT. Adaro Indonesia.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**4.579.879.303,00**	**0,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp4.579.879.303,00 dari anggaran sebesar Rp10.343.090.781,00 atau sebesar 44,28%. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penambahan pendapatan sebesar Rp4.579.879.303,00 atau 100%. realisasi tersebut merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2 BELANJA DAERAH	**1.765.648.332.753,40**	**1.245.070.752.837,32**

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp1.765.648.332.753,40 atau 90,59% dari anggaran sebesar Rp1.949.005.324.265,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.245.070.752.837,32 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp520.577.579.916,80 atau 41,81%. Rincian Belanja Daerah sebagai berikut

Tabel 5.1.24 Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Operasi	1.143.558.555.198,22	1.020.479.418.028,50	89,24	801.382.014.802,23	219.097.403.226,27
2	Belanja Modal	577.536.028.573,78	532.177.064.624,90	92,15	278.112.554.048,09	254.064.510.576,81
3	Belanja Tidak Terduga	4.160.352.466,00	423.718.824,00	10,18	7.372.336.537,00	(6.948.617.713,00)
4	Transfer	223.750.388.027,00	212.568.131.276,00	95,00	158.203.847.450,00	54.364.283.826,00
Jumlah		**1.949.005.324.265,00**	**1.765.648.332.753,40**	**90,59**	**1.245.070.752.837,32**	**520.577.579.916,08**

Rincian Belanja Daerah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.25 Belanja Daerah per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	337.499.387.965,00	**316.716.330.709,00**	93,84	250.781.488.546,00	65.934.842.163,00
2	Dinas Kesehatan	195.021.529.574,88	172.995.695.743,00	88,70	130.588.461.836,00	42.407.233.907,00
	BLUD RSUD	35.797.150.647,00	31.169.653.020,50	87,07	35.410.960.191,12	(4.241.307.170,62)
	JKN BABAI	380.450.543,00	379.617.281,00	99,78	288.212.375,00	91.404.906,00
	JKN BANGKUANG	483.890.204,00	483.889.143,00	100,00	350.497.599,00	133.391.544,00
	JKN BARU	355.449.420,00	355.449.073,00	100,00	271.282.498,00	84.166.575,00
	JKN BUNTOK (BLUD)	2.360.459.798,00	2.245.050.742,00	95,11	1.996.154.922,00	248.895.820,00
	JKN JENAMAS	348.999.701,00	346.042.884,00	99,15	281.879.063,00	64.163.821,00
	JKN KALAHIEN	564.612.153,92	564.611.757,00	100,00	392.311.384,88	172.300.372,12

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	JKN MANGKATIP	559.145.031,00	521.464.718,00	93,26	290.788.714,00	230.676.004,00
	JKN PATAS I	635.636.948,00	635.636.711,00	100,00	417.999.901,00	217.636.810,00
	JKN PENDANG	439.756.639,00	439.752.172,00	100,00	288.294.549,00	151.457.623,00
	JKN SABABILAH	304.375.337,20	304.370.045,00	100,00	235.405.502,00	68.964.543,00
	JKN TABAK KANILAN	351.799.912,00	351.792.085,00	100,00	219.505.330,00	132.286.755,00
	JKN BANTAI BAMBURE	186.328.114,00	186.327.913,00	100,00	102.870.424,00	83.457.489,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.516.619.278,00	413.656.610.635,20	91,82	232.195.387.922,99	180.355.080.915,91
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	47.725.797.212,00	46.353.832.837,00	97,13	19.940.642.618,00	26.413.190.219,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.700.974.041,00	41.456.472.739,00	94,86	31.275.506.513,00	10.180.966.226,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.251.522.496,00	21.670.562.436,00	97,39	11.055.448.510,00	10.615.113.926,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.800.083.221,00	6.802.300.990,00	87,21	5.592.560.139,00	1.209.740.851,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.698.263.549,00	8.603.136.444,00	88,71	5.822.054.683,00	2.781.081.761,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	35.519.548.768,00	32.819.759.996,00	92,40	27.659.798.660,50	5.159.961.335,50
10	Dinas Lingkungan Hidup	15.966.798.386,00	15.156.408.660,00	94,92	12.555.657.076,00	2.600.751.584,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.084.129.969,00	7.282.501.961,00	90,08	5.820.040.158,50	1.462.461.802,50
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	173.040.592.455,00	164.602.962.243,00	95,12	97.946.771.518,00	66.656.190.725,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	11.575.471.993,00	10.819.477.176,00	93,47	7.477.654.929,00	3.341.822.247,00
14	Dinas Perhubungan	10.712.083.757,00	10.224.493.415,00	95,45	14.615.821.501,29	(4.391.328.086,29)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.673.708.066,00	12.215.438.110,00	89,34	8.097.526.908,00	4.117.911.202,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.415.405.957,00	10.926.111.531,00	95,71	9.379.543.768,00	1.546.567.763,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.837.792.174,00	9.026.669.505,00	91,76	8.095.486.577,00	931.182.928,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Kebudayaan	30.850.368.177,00	28.914.852.928,00	93,73	15.418.659.919,00	13.496.193.009,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.479.318.489,00	4.706.077.690,00	85,89	3.207.726.375,00	1.498.351.315,00
22	Sekretariat Daerah	103.081.254.207,00	94.544.805.616,00	91,72	70.675.994.429,04	23.868.811.186,96
23	Sekretariat DPRD	65.208.612.782,00	55.210.288.601,00	84,67	46.576.716.686,00	8.633.571.915,00
24	Kecamatan Dusun Selatan	7.543.503.632,00	6.744.793.664,00	89,41	6.325.900.157,00	418.893.507,00
25	Kecamatan Dusun Hilir	3.572.275.615,00	3.455.924.133,00	93,94	2.884.499.530,00	471.424.603,00
26	Kecamatan Dusun Utara	4.028.294.902,00	3.596.242.070,00	89,27	3.469.210.839,00	127.031.231,00
27	Kecamatan Gunung Bintang Awai	4.869.768.168,00	4.497.003.763,00	92,35	3.529.557.752,00	967.446.011,00
28	Kecamatan Karau Kuala	4.163.789.692,00	3.483.063.696,00	83,65	3.052.189.401,00	430.874.295,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
29	Kecamatan Jenamas	3.723.000.000,00	3.174.752.792,00	85,27	4.045.603.262,00	(870.850.470,00)
30	Inspektorat	17.750.692.971,00	12.809.947.817,00	72,17	8.752.235.709,00	4.057.712.108,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.580.474.136,00	11.909.838.581,00	87,70	9.641.097.499,00	2.268.741.082,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	213.594.287.465,00	178.795.808.409,00	83,71	141.294.613.457,00	37.501.194.952,00
33	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.751.920.719,00	15.598.652.115,00	63,02	6.750.733.505,00	8.847.918.610,00
Jumlah		**1.949.005.324.265,00**	**1.765.648.332.753,40**	**90,59**	**1.245.070.752.837,32**	**520.577.579.916,08**

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.020.479.418.028,50	**801.382.014.802,23**

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.020.479.418.028,50 atau 89,24% dari anggaran sebesar Rp1.143.558.555.198,22. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp801.382.014.802,23 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 219.097.403.226,27 atau 27,34%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.26 Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Pegawai	500.943.662.433,54	467.108.665.972,00	93,25	408.251.315.564,38	58.857.350.407,62
2	Belanja Barang dan Jasa	525.828.017.154,68	447.961.452.752,50	85,19	308.888.756.941,85	139.072.695.810,65
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	2.735.558.710,00	2.735.558.710,00	100,00	3.183.629.010,00	(448.070.300,00)
5	Belanja Hibah	85.291.866.900,00	80.845.739.144,00	94,79	76.486.820.286,00	4.358.918.858,00
6	Belanja Bantuan Sosial	28.759.450.000,00	21.828.001.450,00	75,90	4.571.493.000,00	17.256.508.450
Jumlah		**1.143.558.555.198,22**	**1.020.479.418.028,50**	**89,24**	**801.382.014.802,23**	**219.097.403.226,27**

Rincian Belanja Operasi per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.27 Belanja Operasi per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	312.198.155.341,00	292.310.481.805,000	93,63	237.905.559.071,00	54.404.922.734,00
2	Dinas Kesehatan	163.311.727.166,00	142.835.769.466,00	87,46	107.790.043.234,00	35.045.726.232,50
	BLUD RSUD	30.460.834.262,00	29.883.339.270,50	98,10	34.337.555.272,12	(4.454.216.001,62)
	JKN BABAI	377.412.620,00	377.412.620,00	100,00	276.912.375,00	100.500.245,00
	JKN BANGKUANG	459.185.971,00	459.185.971,00	100,00	335.226.849,00	123.959.122,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	JKN BARU	355.131.222,00	355.131.222,00	100,00	256.880.498,00	98.250.724,00
	JKN BUNTOK	2.261.921.651	2.261.921.651	100,00	1.829.315.922,00	432.605.729,00
	JKN JENAMAS	348.902.598,00	348.902.598,00	100,00	271.427.063,00	77.475.535,00
	JKN KALAHIEN	564.579.321,00	564.579.321,00	100,00	373.261.384,88	191.317.936,12
	JKN MANGKATIP	559.144.688,00	559.144.688,00	100,00	280.261.714,00	278.882.974,00
	JKN PATAS I	635.641.827,00	635.641.827,00	100,00	398.315.901,00	237.325.926,00
	JKN PENDANG	439.755.846,00	439.755.846,00	100,00	276.894.549,00	162.861.297,00
	JKN SABABILAH	304.371.842,00	304.371.842,00	100,00	235.405.502,00	68.966.340,00
	JKN TABAK KANILAN	351.657.909,00	351.657.909,00	100,00	206.205.330,00	145.452.579,00
	JKN BANTAI BAMBURE	186.327.867,00	186.327.867,00	100,00	102.870.424,00	83.457.443,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.365.794.420,01	52.477.480.012,00	88,40	42.989.354.238,99	9.488.125.773,01
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	20.085.263.875,00	18.750.489.873,00	93,35	9.984.483.518,00	8.776.006.355,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.507.798.541,00	41.280.675.739,00	94,88	30.988.893.613,00	10.291.782.126,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.954.702.996,00	17.585.901.342,00	97,95	10.819.656.055,00	6.766.245.287,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.264.903.221,00	5.274.160.990,00	84,19	4.540.439.359,00	733.721.631,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.635.203.549,00	7.553.846.444,00	87,48	5.452.398.703,00	2.101.447.741,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	30.285.073.314,00	27.673.807.796,00	91,38	24.409.906.161,00	3.263.901.635,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	15.046.020.596,00	14.279.688.560,00	94,91	12.300.559.076,00	1.979.129.484,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.107.644.969,00	6.366.721.961,00	89,58	5.374.485.158,50	992.236.802,50
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.239.276.460,01	21.519.833.143,00	82,01	11.494.030.018,00	10.025.803.125,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	11.226.833.993,00	10.470.909.176,00	93,27	7.378.222.992,00	3.092.686.184,00
14	Dinas Perhubungan	8.904.949.307,20	8.428.886.515,00	94,65	12.601.527.241,70	(4.172.640.726,70)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.240.257.166,00	10.872.742.168,00	88,83	7.811.728.508,00	3.061.013.660,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.275.606.957,00	10.788.368.531,00	95,68	9.260.280.768,00	1.528.087.763,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.720.212.674,00	6.951.169.505,00	90,04	6.783.956.177,00	167.213.328,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	25.590.847.745,00	24.211.804.928,00	94,61	14.309.473.239,00	9.902.331.689,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.887.938.489,00	4.130.728.690,00	84,51	3.199.678.375,00	931.050.315,00
22	Sekretariat Daerah	98.313.148.427,00	89.895.332.348,00	91,44	66.184.587.679,04	23.710.744.668,96
23	Sekretariat DPRD	56.069.497.082,00	46.301.605.001,00	82,58	41.149.386.486,00	5.152.218.515,00
24	Kecamatan Dusun Selatan	7.029.849.232,00	6.232.246.764,00	88,65	6.078.246.930,00	153.999.834,00
25	Kecamatan Dusun Hilir	3.435.976.115,00	3.322.769.133,00	93,79	2.840.469.530,00	482.299.603,00
26	Kecamatan Dusun Utara	3.827.600.902,00	3.403.210.492,00	88,91	3.242.230.639,00	160.979.853,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
27	Kecamatan Gunung Bintang Awai	3.804.770.068,00	3.497.597.138,00	91,93	2.923.087.272,00	574.509.866,00
28	Kecamatan Karau Kuala	3.751.993.392,00	3.078.345.696,00	82,05	2.699.286.479,00	379.059.217,00
29	Kecamatan Jenamas	3.175.462.050,00	2.628.138.492,00	82,76	3.614.593.316,00	(986.454.824,00)
30	Inspektorat	15.944.583.733,00	11.057.608.617,00	69,35	8.559.549.469,00	2.498.059.148,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.821.730.801,00	11.191.712.005,00	87,29	9.413.057.499,00	1.778.654.506,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	81.760.505.724,00	64.468.071.490,00	78,85	43.418.260.958,00	21.049.810.532,00
33	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.470.359.269,00	15.320.601.865,00	62,61	6.684.050.255,00	8.636.551.610,00
Jumlah		**1.143.558.555.198,22**	**1.020.479.418.028,50**	**89,24**	**801.382.014.802,23**	**219.097.403.226,27**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
467.108.665.972,00	**408.251.315.564,38**

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp467.108.665.972,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp500.943.662.433,54. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp408.251.315.564,38 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp58.857.350.407,62 atau 14,42%. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 5.1.28 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	302.742.457.662,54	284.769.984.818,00	94,06	251.651.060.697,00	33.118.924.121,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	105.593.866.550,00	98.731.631.085,00	93,50	85.849.430.180,50	12.882.200.904,50
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.719.498.484,00	73.453.351.290,00	89,88	60.742.299.453,88	12.711.051.836,12
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.973.723.038,00	9.735.283.279,00	97,61	9.506.705.233,00	228.578.049,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	312.516.699,00	10.415.500,00	3,33	56.220.000,00	(45.804.500,00)
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	408.000.000,00	67,82	445.600.000,00	(37.600.000,00)
Jumlah		**500.943.662.433,54**	**467.108.665.972,00**	**93,25**	**408.251.315.564,38**	**58.857.350.407,62**

Adapun penjelasan uraian nomor 5 pada tabel di atas terkait belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan di Tahun 2024 kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1106 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan SK tersebut, Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan yang juga menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri meski telah menjabat beberapa

bulan sebagai penjabat, ternyata tidak menerima gaji dikarenakan tidak boleh menerima gaji rangkap dari dua jabatan yang berbeda.

Realisasi belanja pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.29 Belanja Pegawai per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	244.380.896.821,00	235.698.251.969,00	96,45	198.370.714.248,00	37.327.537.721,00
2	Dinas Kesehatan	89.955.348.800,54	82.065.010.146,00	91,23	69.748.344.422,88	12.316.665.723,12
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.679.757.461,00	8.512.079.998,00	98,07	7.984.282.313,00	527.797.685,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.806.986.650,00	3.921.396.033,00	81,58	3.308.085.317,00	613.310.716,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.674.615.141,00	2.422.816.267,00	90,59	2.256.227.552,00	166.588.715,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.698.140.446,00	8.654.446.251,00	99,50	6.334.365.640,00	2.320.080.611,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.747.329.021,00	1.931.323.588,00	70,30	1.887.354.676,00	43.968.912,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.007.620.032,00	2.708.032.756,00	90,04	2.755.807.956,00	(47.775.200,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	14.723.634.711,00	14.041.764.070,00	95,37	13.729.326.134,00	312.437.936,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	4.102.047.536,00	4.068.304.079,00	99,18	3.731.675.474,00	336.628.605,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.236.284.353,00	2.744.893.975,00	84,82	2.623.906.004,50	120.987.970,50
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.934.662.459,00	4.203.792.322,00	85,19	4.199.278.796,00	4.513.526,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	3.590.698.861,00	3.273.721.745,00	91,17	3.072.085.292,00	201.636.453,00
14	Dinas Perhubungan	4.503.307.158,00	4.235.897.336,00	94,06	3.973.398.177,00	262.499.159,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.951.765.316,00	2.932.559.957,00	99,35	2.986.866.802,00	(54.306.845,00)
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.732.039.188,00	3.505.728.914,00	93,94	3.428.548.006,00	77.180.908,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.872.363.906,00	3.283.256.175,00	84,79	3.166.346.752,00	116.909.423,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.563.189.557,00	3.275.038.105,00	91,91	3.366.224.130,00	(91.186.025,00)
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.413.371.109,00	2.285.116.547,00	94,69	2.117.316.159,00	167.800.388,00
22	Sekretariat Daerah	14.603.014.221,00	12.787.033.858,00	87,56	12.355.100.825,00	431.933.033,00
23	Sekretariat DPRD	12.846.888.335,00	12.558.048.843,00	97,75	12.046.805.125,00	511.243.718,00
24	Kecamatan Dusun Selatan	4.075.490.001,00	3.450.190.486,00	84,66	3.366.781.517,00	83.408.969,00
25	Kecamatan Dusun Hilir	1.775.272.615,00	1.673.116.033,00	94,25	1.493.106.030,00	180.010.003,00
26	Kecamatan Dusun Utara	1.975.291.902,00	1.752.117.147,00	88,70	1.688.249.787,00	63.867.360,00
27	Kecamatan Gunung Bintang Awai	1.865.211.728,00	1.649.584.255,00	88,44	1.715.597.822,00	(66.013.567,00)
28	Kecamatan Karau Kuala	1.803.837.867,00	1.395.006.766,00	77,34	1.472.363.001,00	(77.356.235,00)
29	Kecamatan Jenamas	1.562.729.400,00	1.243.602.979,00	79,58	1.373.973.694,00	(130.370.715,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
30	Inspektorat	6.403.943.370,00	5.837.267.388,00	91,15	5.054.547.908,00	782.719.480,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.766.031.801,00	4.405.841.523,00	92,44	4.245.263.952,00	160.577.571,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.653.211.998,00	23.608.328.090,00	79,61	21.600.565.006,00	2.007.763.084,00
33	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.038.680.669,00	2.985.098.371,00	98,24	2.798.807.046,00	186.291.325,00
Jumlah		**500.943.662.433,54**	**467.108.665.972,00**	**93,25**	**408.251.315.564,38**	**58.857.350.407,62**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
447.961.452.752,50	**308.888.756.941,85**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp447.961.452.752,50 atau 85,19% dari anggaran sebesar Rp525.828.017.154,68 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp308.888.756.941,85 Maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp139.072.695.810,65 atau 45,02%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut.

Tabel 5.1.30 Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Barang	85.431.341.099,01	74.286.697.231,00	86,95	50.273.184.569,00	24.013.512.662,00
2	Belanja Jasa	225.369.850.528,01	193.396.054.362,00	85,81	131.216.990.954,69	62.179.063.407,31
3	Belanja Pemeliharaan	22.976.986.881,00	21.255.407.819,00	92,51	18.255.292.560,04	3.000.115.258,96
4	Belanja Perjalanan Dinas	120.059.465.867,20	89.840.941.375,00	74,83	67.670.885.864,00	22.170.055.511,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	14.559.831.118,46	10.656.646.580,00	73,19	5.305.531.800,00	5.351.114.780,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.812.690.000,00	26.537.320.373,00	106,95	0,00	26.537.320.373,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.617.851.661,00	31.988.385.012,50	98,07	36.166.871.194,12	(4.178.486.181,62)
Jumlah		**525.828.017.154,68**	**447.961.452.752,50**	**85,19**	**308.888.756.941,85**	**139.072.695.810,65**

Rincian Belanja Barang dan Jasa Per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.31 Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	64.075.838.520,00	54.675.229.836,00	85,33	15.551.764.037,00	39.123.465.799,00
2	Dinas Kesehatan	76.390.160.769,46	63.395.881.435,00	79,56	39.873.303.955,00	23.522.577.480,00
	RSUD JARAGA SASAMEH (BLUD)	30.460.834.262,00	29.883.339.270,50	98,10	34.337.555.272,12	(4.454.216.001,62)
	PUSKESMAS BABAI (JKN)	141.992.110,00	141.992.110,0	100,00	102.165.100,00	39.827.010,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	139.990.170,00	139.990.170,00	100,00	110.105.750,00	29.884.420,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	111.345.290,00	111.345.290,00	100,00	93.920.080,00	17.425.210,00
	PUSKESMAS BUNTOK (JKN)	2.114.540.742,00	2.114.540.742,00	100,00	1.829.315.922,00	285.224.820,00
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	123.884.400,00	123.884.400,00	100,00	102.241.365,00	21.643.035,00
	PUSKESMAS KALAHIEN (JKN)	199.739.213,00	199.739.213,00	100,00	137.854.850,00	61.884.363,00
	PUSKESMAS MANGKATIP (JKN)	154.447.960,00	154.447.960,00	100,00	174.473.434,00	(20.025.474,00)
	PUSKESMAS PATAS I (JKN)	209.665.900,00	209.665.900,00	100,00	147.522.710,00	62.143.190,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	163.902.519,00	163.902.519,00	100,00	103.964.900,00	59.937.619,00
	PUSKESMAS SABABILAH (JKN)	121.697.604,00	121.697.604,00	100,00	94.160.104,00	27.537.500,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	116.660.000,00	116.660.000,00	100,00	74.500.000,00	42.160.000;00
	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE(JKN)	92.385.050,00	92.385.050,00	100,00	41.148.153,00	51.236.897,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.686.036.959,01	43.965.400.014,00	86,74	35.005.071.925,99	8.960.328.088,01
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.278.277.225,00	14.829.093.840,00	97,06	6.676.398.201,00	8.152.695.639,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.695.816.500,00	4.401.570.328,00	77,28	4.756.711.561,00	(355.141.233,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.256.562.550,00	8.931.455.091,00	96,49	4.435.290.415,00	4.496.164.676,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.412.574.200,00	3.237.841.952,00	94,88	2.563.791.683,00	674.050.269,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.627.583.517,00	4.845.813.688,00	86,11	2.696.590.747,00	2.149.222.941,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	14.870.238.603,00	12.940.843.726,00	87,03	10.211.980.027,00	2.728.863.699,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	10.863.973.060,00	10.211.384.481,00	93,99	8.568.883.602,00	1.642.500.879,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.871.360.616,00	3.621.827.986,00	93,55	2.750.579.154,00	871.248.832,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.088.364.001,01	17.164.790.821,00	81,39	6.984.751.222,00	10.180.039.599,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	7.536.135.132,00	7.097.187.431,00	94,18	4.281.137.700,00	2.816.049.731,00
14	Dinas Perhubungan	4.401.642.149,20	4.192.989.179,00	95,26	8.128.242.064,70	(3.935.252.885,70)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.288.491.850,00	7.940.182.211,00	85,48	4.824.861.706,00	3.115.320.505,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	7.493.567.769,00	7.282.639.617,00	97,19	5.831.732.762,00	1.450.906.855,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.847.848.768,00	3.667.913.330,00	95,32	3.617.609.425,00	50.303.905,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	10.432.128.188,00	10.141.866.823,00	97,22	5.259.149.109,00	4.882.717.714,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.474.567.380,00	1.845.612.143,00	74,58	1.082.362.216,00	763.249.927,00
20	Sekretariat Daerah	49.000.584.206,00	43.513.748.490,00	88,80	32.758.736.854,04	10.755.011.635,96
21	Sekretariat DPRD	43.222.608.747,00	33.743.556.158,00	78,07	29.102.581.361,00	4.640.974.797,00
22	Kecamatan Dusun Selatan	2.954.359.231,00	2.782.056.278,00	94,17	2.711.465.413,00	70.590.865,00
23	Kecamatan Dusun Hilir	1.660.703.500,00	1.549.653.100,00	93,31	1.205.506.000,00	344.147.100,00
24	Kecamatan Dusun Utara	1.852.309.000,00	1.651.093.345,00	89,14	1.553.980.852,00	97.112.493,00
25	Kecamatan Gunung Bintang Awai	1.939.558.340,00	1.848.012.883,00	95,28	1.207.489.450,00	640.523.433,00
26	Kecamatan Karau Kuala	1.948.155.525,00	1.683.338.930,00	86,41	1.226.923.478,00	456.415.452,00
27	Kecamatan Jenamas	1.557.732.650,00	1.329.535.513,00	85,35	1.122.142.122,00	207.393.391,00
28	Inspektorat	9.540.640.363,00	5.220.341.229,00	54,72	3.505.001.561,00	1.715.339.668,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.055.699.000,00	6.785.870.482,00	84,24	5.167.793.547,00	1.618.076.935,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.921.735.016,00	17.555.628.690,00	80,08	14.992.753.942,00	2.562.874.748,00
31	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.431.678.600,00	12.335.503.494,00	57,56	3.885.243.209,00	8.450.260.285,00
Jumlah		**525.828.017.154,68**	**447.961.452.752,50**	**85,19**	**308.888.756.941,85**	**139.072.695.810,65**

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
74.286.697.231,00	**50.273.184.569,00**

Realisasi Belanja Barang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.286.697.231,00 atau 86,95% dari anggaran sebesar Rp85.431.341.099,01. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp50.273.184.569,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.013.512.662,00 atau 32,55% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.32 Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Barang Habis Pakai	79.176.489.799,01	68.239.067.087,00	86,19	50.203.839.114,00	18.035.227.973,00
2	Belanja Barang Tidak Habis Pakai	23.803.800,00	21.859.000,00	91,83	69.345.455,00	(47.486.455,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.231.047.500,00	6.025.771.144,00	96,71	0,00	6.025.771.144,00
Jumlah		**85.431.341.099,01**	**74.286.697.231,00**	**86,95**	**50.273.184.569,00**	**24.013.512.662,00**

5.1.2.1.2.1.1	**Belanja Barang Pakai Habis**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
		68.239.067.087,00	**50.203.839.114,00**

Realisasi Belanja Barang Habis Pakai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.239.067.087,00 atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp79.176.489.799,01. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp50.203.839.114,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp18.035.227.973,00 atau 35,92% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.33 Belanja Barang Pakai Habis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	573.232.100,00	448.781.000,00	78,29	1.648.856.483,00	(1.200.075.483,00)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	620.843.482,00	541.369.194,00	87,20	419.230.175,00	122.139.019,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.285.304.337,00	5.072.408.977,00	80,70	4.094.503.087,00	977.905.890,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.836.810.569,00	2.694.476.215,00	94,98	112.446.150,00	2.582.030.065,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	437.590.000,00	436.538.000,00	99,76	978.086.250,00	(541.548.250,00)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	48.935.600,00	35.799.800,00	73,16	0,00	35.799.800,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.958.625.000,00	1.947.300.000,00	99,42	629.851.300,00	1.317.448.700,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.649.064.405,00	4.733.554.033,00	101,80	1.896.584.779,00	2.836.259.254,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	284.330.000,00	269.308.635,00	94,72	0,00	269.308.635,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	52.005.084,00	24.479.034,00	47,07	0,00	24.479.034,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00	9.200.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	57.626.000,00	56.400.000,00	97,87	0,00	56.400.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.744.197.403,01	10.840.151.167,00	85,06	2.899.833.823,00	7.940.317.344,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.663.400,00	163.726.500,00	81,59	2.383.449.159,00	(2.219.722.659,00)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.496.393.300,00	1.284.842.338,00	85,86	7.352.863.346,00	(6.068.021.008,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	511.172.000,00	363.725.500,00	70,99	248.300.680,00	114.584.820,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	110.901.950,00	73.493.950,00	66,27	44.510.500,00	28.983.450,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	43.350.500,00	27.990.155,00	64,57	0,00	27.990.155,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.248.166.500,00	1.875.271.290,00	83,41	2.581.433.656,00	(706.162.366,00)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.983.571.527,00	4.946.459.525,00	99,26	1.429.368.941,00	3.517.090.584,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.474.111.232,00	1.396.377.689,00	94,73	390.298.900,00	1.006.078.789,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	398.835.000,00	398.835.000,00	100,00	17.741.000,00	381.094.000,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata	1.005.645.200,00	854.638.055,00	84,98	300.225.000,00	554.413.055,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.516.256.240,00	1.442.556.240,00	95,14	1.888.137.270,00	(445.581.030,00)
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.557.543.691,00	1.032.498.523,00	65,96	252.238.718,00	775.084.805,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	579.439.246,00	435.601.100,00	74,83	489.465.443,00	(55.864.343,00)
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.835.718.820,00	2.821.915.076,00	99,51	2.090.509.900,00	731.405.176,00
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	1.112.000.000,00	(1.112.000.000,00)
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	0,00	49.400.000,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	340.217.817,00	(340.217.817,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
32	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	71.023.000,00	71.016.875,00	99,99	26.695.000,00	44.321.875,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.039.521.353,00	12.370.808.982,00	82,26	12.419.794.276,00	(48.985.294,00)
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan amu	3.690.231.150,00	3.491.531.347,00	94,62	173.300.000,00	3.318.231.347,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.488.894.000,00	45.600.000,00	3,06	0,00	45.600.000,00
34	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	56.471.340,00	(56.471.340,00)
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.731.233.200,00	1.672.147.300,00	61,22	219.740.000,00	1.452.407.300,00
36	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	346.478.610,00	345.563.610,00	99,74	223.454.100,00	122.109.510,00
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	625.000.000,00	622.000.000,00	99,52	22.500.000,00	599.500.000,00
38	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	140.306.375,00	(140.306.375,00)
39	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37.400.000,00	37.400.000,00	100,00	79.899.000,00	(42.499.000,00)
40	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	845.475.000,00	840.593.160,00	99,42	753.006.600,00	87.586.560,00
41	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	790.642.000,00	751.315.000,00	95,03	553.056.726,00	198.258.274,00
42	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00	119.891.000,00	(84.691.000,00)
43	Belanja Pakaian Penyelamatan	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00	3.750.000,00
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	124.150.000,00	124.150.000,00	100,00	132.460.000,00	(8.310.000,00)
45	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	23.107.500,00	(3.107.500,00)
46	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	8.694.000,00	(8.694.000,00)
47	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	27.189.450,00	(27.189.450,00)
48	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	123.936.250,00	(117.936.250,00)
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	461.250.000,00	460.761.500,00	99,89	249.741.970,00	211.019.530,00
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.061.365.900,00	1.984.626.317,00	96,28	596.527.050,00	1.388.099.267,00
51	Belanja Pakaian Olahraga	1.127.893.000,00	1.011.806.000,00	89,71	624.916.100,00	386.889.900,00
52	Belanja Pakaian Paskibraka	102.050.000,00	67.700.000,00	66,34	0,00	67.700.000,00
Jumlah		**79.176.489.799,01**	**68.239.067.087,00**	**86,19**	**50.203.839.114,00**	**18.035.227.973,00**

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.1.2.1.2	**Belanja Barang Tidak Habis Pakai**	**21.859.000,00**	**69.345.455,00**

Realisasi Belanja Barang Tidak Habis Pakai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.859.000,00 atau 91,83% dari anggaran sebesar Rp23.803.800,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp69.345.455,00 maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp47.486.455,00 atau 68,48% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.34 Belanja Barang Tidak Habis Pakai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)
2	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.944.800,00	0,00	0,00	15.345.455,00	(15.345.455,00)
3	Belanja Komponen Komponen Peralatan	21.859.000,00	21.859.000,00	100,00	0,00	21.859.000,00
Jumlah		**23.803.800,00**	**21.859.000,00**	**91,83**	**69.345.455,00**	**(47.486.455,00)**

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
193.396.054.362,00 **131.216.990.954,69**

Realisasi Belanja Jasa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp193.396.054.362,00 atau 85,81% dari anggaran sebesar Rp225.369.850.528,01. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp131.216.990.954,69 maka realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp62.179.063.407,31 atau 47,39% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.35 Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Jasa Kantor	110.580.455.037,00	97.618.865.650,00	88,28	84.190.988.678,00	13.427.876.972,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.087.686.844,00	27.001.826.984,00	92,83	9.208.996.514,00	17.792.830.470,00
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.268.607.998,00	3.757.772.000,00	88,03	4.490.131.155,00	(732.359.155,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.750.486.280,00	16.023.077.237,00	70,43	11.138.853.819,99	4.884.223.417,01
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	95.100.000,00	(89.100.000,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi	37.036.801.369,01	35.396.692.813,00	95,57	18.580.604.543,70	16.816.088.269,30
8	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	1.540.050.000,00	1.288.420.800,00	83,66	803.946.000,00	484.474.800,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.429.349.000,00	6.657.673.878,00	63,84	2.708.370.244,00	3.949.303.634,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	15.600.000,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9.653.814.000,00	5.630.125.000,00	58,32	0,00	5.630.125.000,00
Jumlah		**225.369.850.528,01**	**193.396.054.362,00**	**85,81**	**131.216.990.954,69**	**62.179.063.407,31**

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	21.255.407.819,00	18.255.292.560,04

Realisasi Belanja Pemeliharaan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.255.407.819,00 atau 92,51% dari anggaran sebesar Rp22.976.986.881,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.255.292.560,04 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.115.258,96 atau 16,43%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.36 Belanja Pemeliharaan per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	**Belanja Pemeliharaan Tanah**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**5.158.135.981,00**	4.551.330.997,00	88,24	**3.987.523.011,00**	**563.807.986,00**
	DINAS PENDIDIKAN	40.260.000,00	40.260.000,00	100,00	20.130.000,00	20.130.000,00
	DINAS KESEHATAN	175.950.000,00	12.085.800,00	63,77	175.906.724,00	(163.820.924,00)
	RSUD JARAGA SASAMEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	0,00	5.100.000,00	0,00	18.427.000,00	(13.327.000,00)
	PUSKESMAS SABABILAH (JKN)	0,00	7.400.000,00	0,00	5.050.000,00	2.350.000,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	0,00	1.400.000,00	0,00	7.024.000,00	(5.624.000,00)
	PUSKESMAS BABAI (JKN)	0,00	0,00	0,00	690.000,00	(690.000,00)
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	0,00	27.300.000,00	0,00	9.120.000,00	18.180.000,00
	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE (JKN)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
	PUSKESMAS BARU (JKN)	0,00	600.000,00	0,00	2.735.000,00	(2.135.000,00)
	PUSKESMAS BUNTOK (JKN)	0,00	22.734.000,00	0,00	0,00	22.734.000,00
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	0,00	11.220.000,00	0,00	21.774.000,00	(10.554.000,00)
	PUSKESMAS KALAHIEN (JKN)	0,00	7.220.000,00	0,00	9.330.000,00	(2.110.000,00)
	PUSKESMAS MANGKATIP (JKN)	0,00	6.200.000,00	0,00	17.807.000,00	(11.607.000,00)
	PUSKESMAS PATAS I (JKN)	0,00	10.948.800,00	0,00	10.550.000,00	398.800,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	915.842.681,00	741.707.761,00	80,99	449.605.500,00	292.102.261,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	109.030.000,00	102.260.800,00	93,79	78.183.950,00	24.076.850,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	745.770.000,00	745.122.025,00	99,91	246.101.425,00	499.020.600,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	96.000.000,00	83.826.880,00	87,32	131.589.700,00	(47.762.820,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	155.660.000,00	155.251.800,00	99,74	53.000.000,00	102.251.800,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	386.908.000,00	328.613.630,00	84,93	306.307.400,00	22.306.230,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89.490.000,00	68.867.800,00	76,96	86.764.300,00	(17.896.500,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	113.000.000,00	100.560.555,00	88,99	121.250.550,00	(20.689.995,00)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88.028.700,00	86.981.610,00	98,81	15.658.000,00	71.323.610,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	71.160.000,00	71.160.000,00	100,00	23.350.000,00	47.810.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	35.660.000,00	5.340.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	40.440.000,00	40.057.700,00	99,05	35.126.900,00	4.930.800,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	122.740.000,00	82.252.700,00	67,01	123.804.200,00	(41.551.500,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	129.980.000,00	128.473.001,00	98,84	112.666.000,00	15.807.001,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	87.260.000,00	87.260.000,00	100,00	66.864.200,00	20.395.800,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	45.350.000,00	45.350.000,00	100,00	51.120.100,00	(5.770.100,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	798.550.000,00	758.881.893,00	95,03	1.000.392.464,00	(241.510.571,00)
	SEKRETARIAT DPRD	283.000.000,00	281.881.424,00	99,60	313.786.533,00	(31.905.109,00)
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	43.296.600,00	39.305.668,00	90,78	16.323.120,00	22.982.548,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	240.860.000,00	199.297.300,00	82,74	232.170.000,00	(32.872.700,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	44.300.000,00	43.166.550,00	97,44	46.017.145,00	(2.850.595,00)
	INSPEKTORAT	110.300.000,00	29.271.600,00	26,54	31.863.100,00	(2.591.500,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	39.880.000,00	14.535.000,00	36,45	32.539.300,00	(18.004.300,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	56.840.000,00	56.840.000,00	100,00	1.830.000,00	55.010.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	38.480.000,00	30.343.200,00	78,85	43.551.100,00	(13.207.900,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	23.880.000,00	16.714.300,00	69,99	23.224.300,00	(6.510.000,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.880.000,00	19.880.000,00	79,90	9.630.000,00	10.250.000,00
3	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**11.207.301.230,00**	**10.778.664.582,00**	96,18	**7.558.159.389,04**	**3.220.505.192,96**
	DINAS PENDIDIKAN	333.000.000,00	330.600.000,00	99,28	0,00	330.600.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	DINAS KESEHATAN	302.385.942,00	188.629.222,00	52,45	97.661.000,00	90.968.222,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	9.228.500,00	(4.228.500,00)
	PUSKESMAS SABABILAH (JKN)	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	(2.425.000,00)
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	917.000,00	917.000,00	100,00	4.808.000,00	(3.891.000,00)
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	20.150.000,00	20.150.000,00	100,00	2.790.000,00	17.360.000,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	6.035.000,00	(535.000,00)
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	(11.800.000,00)
	PUSKESMAS KALAHIEN (JKN)	10.160.000,00	10.160.000,00	100,00	12.555.000,00	(2.395.000,00)
	PUSKESMAS MANGKATIP (JKN)	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	2.945.000,00	3.255.000,00
	PUSKESMAS PATAS I (JKN)	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	3.794.450,00	5.505.550,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	187.900.000,00	187.700.000,00	99,89	115.000.000,00	72.700.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	122.145.000,00	(17.145.000,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	75.380.000,00	75.300.000,00	99,89	24.681.550,00	50.618.450,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	10.000.000,00	35.000.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	174.168.000,00	174.049.000,00	99,93	83.530.000,00	90.519.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.934.450.000,00	(1.924.450.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	70.148.168,00	70.148.000,00	100,00	139.810.000,00	(69.662.000,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.034.440.880,00	1.030.990.000,00	99,67	22.935.000,00	1.008.055.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	277.536.000,00	254.892.000,00	91,84	22.050.000,00	232.842.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	290.000.000,00	289.750.000,00	99,91	0,00	289.750.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.015.000,00	2.015.000,00	100,00	0,00	2.015.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	708.090.000,00	700.296.000,00	98,90	0,00	700.296.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	209.522.320,00	209.079.000,00	99,79	209.400.000,00	(321.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	177.000.000,00	176.850.000,00	99,92	0,00	176.850.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	4.423.322.920,00	4.166.059.000,00	94,18	3.600.670.703,04	565.388.296,96
	SEKRETARIAT DPRD	1.399.480.000,00	1.398.506.000,00	99,93	501.705.200,00	896.800.800,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	124.445.000,00	124.148.260,00	99,76	49.320.500,00	74.827.760,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	149.898.337,00	(149.898.337,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	156.908.000,00	156.105.100,00	99,49	97.521.149,00	58.583.951,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	570.000.000,00	569.550.000,00	99,92	139.180.000,00	430.370.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	68.440.000,00	66.394.000,00	97,01	9.920.000,00	56.474.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	171.900.000,00	(171.900.000,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	224.880.000,00	224.780.000,00	99,96	0,00	224.780.000,00
	INSPEKTORAT	165.908.000,00	165.597.000,00	99,81	0,00	165.597.000,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	15.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**5.782.010.000,00**	**5.170.733.500,00**	**89,43**	**6.288.484.000,00**	**(1.117.750.500,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.069.080.000,00	3.496.278.500,00	85,92	6.008.484.000,00	(2.512.205.500,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	(280.000.000,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.052.930.000,00	1.016.350.000,00	96,53	0,00	1.016.350.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	160.000.000,00	159.905.000,00	99,94	0,00	159.905.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	400.000.000,00	398.200.000,00	99,55	0,00	398.200.000,00
5	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**344.183.920,00**	**270.225.740,00**	78,51	**163.074.400,00**	**107.151.340,00**
	DINAS PENDIDIKAN	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	4.250.000,00	4.250.000,00
	DINAS KESEHATAN	816.000,00	816.000,00	100,00	7.675.000,00	(6.859.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61.600.000,00	46.772.000,00	75,93	54.535.000,00	(7.763.000,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.624.000,00	10.614.000,00	99,91	300.000,00	10.314.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.392.000,00	7.388.000,00	99,95	4.725.000,00	2.663.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.972.000,00	2.500.000,00	62,94	1.190.000,00	1.310.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.416.000,00	3.057.500,00	69,24	2.500.000,00	557.500,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.200.000,00	15.659.000,00	91,04	16.500.000,00	(841.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	2.500.000,00	(900.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	255.000,00	74.745.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	42.768.000,00	42.640.000,00	99,70	0,00	42.640.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	7.102.000,00	7.102.000,00	100,00	0,00	7.102.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.696.000,00	2.584.000,00	95,85	4.901.500,00	(2.317.500,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	23.614.000,00	1.392.000,00	5,89	9.100.000,00	(7.708.000,00)
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.300.000,00	2.090.000,00	90,87	0,00	2.090.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	320.000,00	318.240,00	99,45	5.902.900,00	(5.584.660,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	22.060.420,00	21.600.000,00	97,91	0,00	21.600.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	38.220.500,00	13.768.000,00	36,02	38.950.000,00	(25.182.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	6.416.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	1.927.000,00	1.185.000,00	61,49	2.790.000,00	(1.605.000,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.640.000,00	5.640.000,00	100,00	5.000.000,00	640.000,00
6	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**485.355.750,00**	**484.453.000,00**	99,81	**258.051.760,00**	**226.401.240,00**
	DINAS PENDIDIKAN	223.776.000,00	223.776.000,00	100,00	158.481.360,00	65.294.64,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	183.600.000,00	182.750.000,00	99,54	70.000.000,00	112.750.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47.979.750,00	47.952.000,00	99,94	29.570.400,00	18.381.600,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	0,00	29.975.000,00
	Jumlah	**22.976.986.881,00**	**21.255.407.819,00**	**92,51**	**18.255.292.560,04**	**3.000.115.258,96**

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
89.840.941.375,00	**67.670.885.864,00**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.840.941.375,00 atau 74,83% dari anggaran sebesar Rp120.059.465.867,20. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp67.670.885.864,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.170.055.511,00 atau 32,76%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.37 Belanja Perjalanan Dinas per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	4.852.744.190,00	2.547.502.260,00	52,50	2.261.923.176,00	285.579.084,00
2	Dinas Kesehatan	15.716.122.125,00	9.450.522.304,00	68,86	4.238.078.147,00	5.212.444.157,00
	RSUD JARAGA SASAMEH	465.134.193,00	465.134.193,00	100,00	0,00	465.134.193,00
	PUSKESMAS PENDANG	50.064.000,00	50.064.000,00	100,00	37.991.000,00	12.073.000,00
	PUSKESMAS SABABILAH	38.780.000,00	38.780.000,00	100,00	29.250.000,00	9.530.000,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN	24.825.000,00	24.825.000,00	100,00	17.845.000,00	6.980.000,00
	PUSKESMAS BABAI	50.700.000,00	50.700.000,00	100,00	39.980.000,00	10.720.000,00
	PUSKESMAS BANGKUANG	49.274.000,00	49.274.000,00	100,00	50.855.000,00	(1.581.000,00)
	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	27.084.000,00	27.084.000,00	100,00	8.033.000,00	19.051.000,00
	PUSKESMAS BARU	49.255.000,00	49.255.000,00	100,00	38.625.000,00	10.630.000,00
	PUSKESMAS JENAMAS	52.320.000,00	52.320.000,00	100,00	30.880.000,00	21.440.000,00
	PUSKESMAS KALAHIEN	66.470.000,00	66.470.000,00	100,00	42.891.000,00	23.579.000,00
	PUSKESMAS MANGKATIP	82.054.000,00	82.054.000,00	100,00	36.006.000,00	46.048.000,00
	PUSKESMAS PATAS I	98.525.000,00	98.525.000,00	100,00	57.678.000,00	40.847.000,00
	PUSKESMAS BUNTOK	317.648.200,00	317.648.200,00	100,00	00.00	317.648.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.325.738.278,00	4.608.592.610,00	62,91	3.545.947.720,00	1.062.644.890,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.282.751.929,00	1.172.859.323,00	91,43	794.235.091,00	378.624.232,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.117.235.000,00	2.006.024.354,00	94,75	1.025.989.924,00	980.034.430,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.044.391.000,00	1.019.871.573,00	97,65	670.766.588,00	349.104.985,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.805.765.900,00	4.267.501.219,00	73,50	2.385.133.987,00	1.882.367.232,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.878.781.600,00	1.638.271.475,00	87,20	1.334.612.899,00	303.658.576,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.353.428.350,00	1.305.675.106,00	96,47	1.086.572.258,00	219.102.848,00
10	Dinas Perhubungan	1.804.008.493,20	1.767.933.251,00	98,00	2.623.117.400,00	855.184.149,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.557.190.000,00	1.227.334.015,00	78,82	888.543.190,00	338.790.825,00
12	Dinas Penanaman Modal dan	1.765.402.000,00	1.674.772.314,00	94,87	1.514.938.933,00	159.833.381,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.541.176.650,00	3.530.511.052,00	99,70	1.334.707.142,00	2.195.803.910,00
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	793.337.000,00	506.644.996,00	63,86	342.555.743,00	164.089.253,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.628.644.500,00	1.610.950.482,00	98,91	950.774.445,00	660.176.037,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	1.955.888.450,00	1.738.532.803,00	88,89	907.811.279,00	830.721.524,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.324.577.400,00	3.085.333.414,00	92,80	2.628.820.350,00	456.513.064,00
18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.986.432.812,00	1.958.410.749,00	98,59	1.540.278.778,00	418.131.971,00
19	Sekretariat Daerah	15.522.903.850,00	13.645.531.453,00	87,91	9.797.828.837,00	3.847.702.616,00
20	Sekretariat DPRD	21.173.371.000,00	12.330.523.818,00	58,24	14.391.466.821,00	(2.060.943.003,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.273.599.400,00	2.916.012.050,00	89,08	2.028.047.477,00	887.964.573,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.599.503.940,00	5.273.633.199,00	79,91	4.816.427.798,00	457.205.401,00
23	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.812.653.000,00	2.032.368.210,00	53,31	973.100.745,00	1.059.267.465,00
24	Inspektorat	4.928.177.000,00	2.691.351.831,00	54,61	1.925.558.561,00	765.793.270,00
25	Kecamatan Dusun Hilir	407.292.000,00	393.733.000,00	96,67	348.415.100,00	45.317.900,00
26	Kecamatan Dusun Selatan	682.236.000,00	622.845.800,00	91,29	523.842.896,00	99.002.904,00
27	Kecamatan Dusun Utara	452.456.000,00	434.984.236,00	96,14	454.098.000,00	(19.113.764,00)
28	Kecamatan Gunung Bintang Awai	559.390.000,00	559.374.793,00	100,00	290.588.233,00	268.786.560,00
29	Kecamatan Jenamas	551.845.000,00	427.936.613,00	77,55	330.384.722,00	97.551.891,00
30	Kecamatan Karau Kuala	550.049.000,00	426.878.791,00	77,61	339.595.075,00	87.283.716,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.812.374.000,00	1.596.390.888,00	88,08	986.690.549,00	609.700.339,00
Jumlah		**120.059.465.867,20**	**89.840.941.375,00**	**74,83**	**67.670.885.864,00**	**22.170.055.511,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	**10.656.646.580,00**	**5.305.531.800,00**

Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.656.646.580 atau 73,19% dari anggaran sebesar Rp14.559.831.118,46. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.305.531.800,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.351.114.780,00 atau 100,86%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.38 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.314.935.000,00	3.141.879.680,00	94,78	1.142.996.000,00	1.998.883.680,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.244.896.118,46	7.514.766.900,00	66,83	4.044.035.800,00	3.470.731.100,00
3	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	118.500.000,00	(118.500.000,00)
Jumlah		**14.559.831.118,46**	**10.656.646.580,00**	**73,19**	**5.305.531.800,00**	**5.351.114.780,00**

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
26.537.320.373,00	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bos Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.537.320.373,00atau 106,95% dari anggaran sebesar Rp24.812.690.000,00.

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023
31.988.385.012,50	36.166.871.194,12

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.988.385.012,50 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp32.617.851.661,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp36.166.871.194,12, maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.178.486.181,62. Atau 11,55%

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Realisasi Belanja Bunga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.735.558.710,00	3.183.629.010,00

Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.735.558.710,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 2.735.558.710,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.183.629.010,00, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp448.070.300,00 atau 14,07%. Belanja subsidi ditujukan untuk selisih tarif PDAM Kabupaten Barito Selatan.

5.1.2.1.1 Belanja Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
80.845.739.144,00	76.486.820.286,00

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.845.739.144,00 atau 94,79% dari anggaran sebesar Rp85.291.866.900,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp76.486.820.286,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.358.918.858,00 atau 5,70% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.1.39 Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	590.000.000,00	590.000.000,00	100,00	95.000.000,00	495.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	323.600.000,00	(323.600.000,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.505.080.000,00	47.889.450.000,00	94,82	29.319.850.000,00	18.569.600.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.642.741.900,00	29.616.907.900,00	99,58	21.358.664.500,00	8.258.243.400,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	1.269.104.000,00	(319.104.000,00)
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	19.329.273.329,00	(19.329.273.329,00)
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	3.028.703.457,00	(3.028.703.457,00)
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.799.625.000,00	1.799.381.244,00	99,99	1.762.625.000,00	36.756.244,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.804.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**85.291.866.900,00**	**80.845.739.144,00**	**94,79**	**76.486.820.286,00**	**4.358.918.858,00**

5.1.2.1.2 Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2024	31 Desember 2023
21.828.001.450,00	4.571.493.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.828.001.450,00 atau 75,90% dari anggaran sebesar Rp28.759.450.000,00 Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.571.493.000,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.256.508.450,00 Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.40 Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	23.543.250.000,00	16.673.006.000,00	70,82	4.482.200.000,00	12.190.806.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.216.200.000,00	5.154.995.450,00	98,83	89.293.000,00	5.065.702.450,00
Jumlah		**28.759.450.000,00**	**21.828.001.450,00**	**75,90**	**4.571.493.000,00**	**17.256.508.450,00**

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
532.177.064.624,90	**278.112.554.048,09**

Belanja Modal merupakan belanja atas pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Barito Selatan TA 2024 sebesar Rp532.177.064.624,90 atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp577.536.028.573,78. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp278.112.554.048,09, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp254.064.510.576,81 atau 91,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.41 Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.037.993.441,00	76.322.201.311,00	86,69	50.074.252.410,59	26.247.948.900,41
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.622.528.978,99	146.211.601.103,80	97,07	76.680.345.009,00	69.531.256.094,80
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	338.230.166.153,79	309.157.085.006,10	91,40	151.160.376.628,50	157.996.708.377,60
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	195.340.000,00	44.337.204,00	22,70	197.580.000,00	(153.242.796,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00	441.840.000,00	98,19	0,00	441.840.000,00
Jumlah		**577.536.028.573,78**	**532.177.064.624,90**	**92,15**	**278.112.554.048,09**	**254.064.510.576,81**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	76.322.201.311,00	50.074.252.410,59

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.322.201.311,00 atau 86,69% dari anggaran sebesar Rp88.037.993.441,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp50.074.252.410,59, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.247.948.900,41, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Modal Alat Besar	4.317.482.824,00	3.644.201.450,00	84,41	1.895.898.200,00	1.748.303.250,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	36.242.169.841,00	31.183.367.725,00	86,04	16.253.918.825,00	14.929.448.900,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	640.774.250,00	609.763.700,00	95,16	792.000,00	608.971.700,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.169.265.000,00	1.151.889.350,00	98,51	296.433.400,00	855.455.950,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.796.148.795,00	9.771.135.318,00	90,51	5.504.110.626,00	4.267.024.692,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.491.215.760,00	5.257.276.355,00	95,74	1.000.711.985,00	4.256.564.370,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.109.456.172,00	9.669.902.671,00	95,65	17.848.701.092,00	(8.178.798.421,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.434.482.770,00	1.248.294.659,00	87,02	1.832.194.500,00	(583.899.841,00)
9	Belanja Modal Komputer	11.837.362.019,00	11.250.748.833,00	94,96	5.176.552.759,00	6.074.196.074,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	248.124.700,00	234.223.250,00	94,40	51.185.000,00	183.038.250,00
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	240.000.000,00	239.600.000,00	99,83	0,00	239.600.000,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	427.700.000,00	358.279.250,00	83,77	0,00	358.279.250,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	229.494.925,00	229.200.000,00	99,87	173.754.023,59	55.445.976,41
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	40.000.000,00	8.000.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.806.316.385,00	1.426.318.750,00	29,68	0,00	1.426.318.750,00
Jumlah		**88.037.993.441,00**	**76.322.201.311,00**	**86,69**	**50.074.252.410,59**	**26.247.948.900,41**

Rincian belanja modal peralatan dan mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
I	**BELANJA MODAL ALAT BESAR**	**4.317.482.824,00**	**3.644.201.450,00**	**84,41**	**1.895.898.200,00**	**1.748.303.250,00**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	**BELANJA MODAL EXCAVATOR**	**1.900.000.000,00**	**1.576.250.000,00**	**82,96**	**0,00**	**1.576.250.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.900.000.000,00	1.576.250.000,00	82,96	0,00	1.576.250.000,00
2.	**BELANJA MODAL ALAT PENGANGKAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.500.000,00**	**(139.500.000,00)**
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	139.500.000,00	(139.500.000,00)
3.	**BELANJA MODAL MESIN PROSES**	**17.600.000,00**	**16.900.000,00**	**96,02**	**54.763.250,00**	**(37.863.250,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	(6.660.000,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	100,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	7.663.250,00	(7.663.250,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	98,66	4.440.000,00	(4.440.000,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	17.600.000,00	16.900.000,00	96,02	0,00	16.900.000,00
4.	**BELANJA MODAL ALAT BESAR DARAT LAINNYA**	**1.500.000.000,00**	**1.160.100.000,00**	**77,34**	**1.425.000.000,00**	**(264.900.000,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.500.000.000,00	1.160.100.000,00	77,34	1.425.000.000,00	(264.900.000,00)
5.	**BELANJA MODAL POMPA**	**899.882.824,00**	**890.951.450,00**	**99,01**	**152.542.500,00**	**738.408.950,00**
	DINAS PENDIDIKAN	5.731.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00	(149.900.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	11.051.450,00	11.051.450,00	100,00	0,00	11.051.450,00
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.942.500,00	(1.942.500,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	255.600.000,00	255.400.000,00	99,92	0,00	255.400.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	627.500.000,00	624.500.000,00	99,52	0,00	624.500.000,00
6.	**BELANJA MODAL ALAT BANTU LAINNYA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.092.450,00**	**(124.092.450,00)**
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	124.092.450,00	(124.092.450,00)
II	**BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN**	**36.242.169.841,00**	**31.183.367.725,00**	**86,04**	**16.253.918.825,00**	**14.929.448.900,00**
7.	**BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.855.750,00**	**(656.855.750,00)**
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	49.290.000,00	(49.290.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	71.116.250,00	(71.116.250,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	304.551.500,00	(304.551.500,00)
	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	93.608.000,00	(93.608.000,00)
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	121.860.000,00	(121.860.000,00)
	KECAMATAN DUSUN HILIR	0,00	0,00	0,00	16.430.000,00	(16.430.000,00)
8.	**BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG**	**16.405.000.000,00**	**14.381.500.000,00**	**87,67**	**8.573.650.000,00**	**5.807.850.000,00**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14.755.000.000,00	12.808.900.000,00	86,81	8.062.850.000,00	4.746.050.000,00
	INSPEKTORAT	1.100.000.000,00	1.048.400.000,00	95,31	0,00	1.048.400.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	550.000.000,00	524.200.000,00	95,31	510.800.000,00	13.400.000,00
9.	**BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG**	**11.082.530.000,00**	**9.291.821.100,00**	**83,84**	**1.730.450.000,00**	**7.561.371.100,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.589.130.000,00	1.555.700.000,00	97,90	79.550.000,00	1.476.150.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.893.400.000,00	7.136.121.100,00	80,24	1.650.900.000,00	5.485.221.100,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00	600.000.000,00
10.	**BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA**	**3.727.412.141,00**	**3.472.009.125,00**	**93,15**	**998.618.500,00**	**2.473.390.625,00**
	DINAS PENDIDIKAN	171.000.000,00	133.000.000,00	77,78	106.836.000,00	26.164.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	106.836.000,00	106.836.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.022.178.348,00	960.354.000,00	93,95	784.946.500,00	175.407.500,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	74.000.000,00	62.200.000,00	84,05	0,00	62.200.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.180.000,00	38.280.000,00	90,75	0,00	38.280.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	91.396.335,00	91.395.000,00	100,00	0,00	91.395.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000,00	87.500.000,00	87,50	0,00	87.500.000,00
	DINAS KESEHATAN	44.251.679,00	44.000.000,00	99,43	0,00	44.000.000,0
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	37.000.000,00	31.100.000,00	84,05	0,00	31.100.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	140.000.000,00	129.500.000,00	92,50	0,00	129.500.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	788.787.000,00	780.900.000,00	99,00	0,00	780.900.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	154.000.000,00	150.949.000,00	98,02	0,00	150.949.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	79.544.587,00	73.493.500,00	92,39	0,00	73.493.500,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	85.089.174,00	84.787.000,00	99,64	0,00	84.787.000,00
	INSPEKTORAT	231.109.238,00	230.696.000,00	99,82	0,00	230.696.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00	0,00	76.000.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	194.014.000,00	139.106.625,00	71,70	0,00	139.106.625,00
	SEKRETARIAT DAERAH	396.861.780,00	358.748.000,00	90,40	0,00	358.748.000,00
11.	**BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA**	**45.000.000,00**	**43.599.500,00**	**96,89**	**0,00**	**43.599.500,00**
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	45.000.000,00	43.599.500,00	96,89	0,00	43.599.500,00
12.	**BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS**	**4.168.787.700,00**	**3.946.000.000,00**	**94,66**	**1.919.346.000,00**	**2.026.654.000,00**
	DINAS KESEHATAN	800.000.000,00	799.000.000,00	99,88	0,00	799.000.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.080.000.000,00	960.000.000,00	88,89	1.919.346.000,00	(959.346.000,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.288.787.700,00	2.187.000.000,00	95,55	0,00	2.187.000.000,00
13.	**BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG**	**779.000.000,00**	**48.438.000,00**	**6,22**	**430.000.000,00**	**(381.562.000,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	(430.000.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	49.000.000,00	48.438.000,00	98,85	0,00	48.438.000,00
15.	**BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.944.998.575,00**	**(1.944.998.575,00)**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	(520.000.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.424.998.575,00	(1.424.998.575,00)
16.	**BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG**	**4.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
III	**BELANJA MODAL ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	**640.774.250,00**	**609.763.700,00**	**95,16**	**792.000,00**	**1.289.932.755,00**
17.	**BELANJA MODAL PERKAKAS BENGKEL KHUSUS**	**0,00**	0,00	0,00	**792.000,00**	(792.000,00)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	792.000,00	(792.000,00)
18	**BELANJA MODAL ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
19.	**BELANJA MODAL ALAT UKUR UNIVERSAL**	**67.109.750,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000.000,00**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	58.709.750,00	52.000.000,00	88,57	0,00	52.000.000,00
20.	**BELANJA MODAL ALAT UKUR LAINNYA**	**568.664.500,00**	**552.763.700,00**	**97,20**	**0,00**	**552.763.700,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	534.964.500,00	519.113.700,00	97,04	0,00	519.113.700,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.700.000,00	33.650.000,00	99,85	0,00	33.650.000,00
IV	**BELANJA MODAL ALAT PERTANIAN**	**1.169.265.000,00**	**1.151.889.350,00**	**98,51**	**296.433.400,00**	**855.455.950,00**
21.	**BELANJA MODAL ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN**	**689.265.000,00**	**679.839.350,00**	**98,63**	**296.433.400,00**	**383.405.950,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	12.987.000,00	(12.987.000,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	84.442.000,00	(84.442.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	689.265.000,00	679.839.350,00	98,63	154.654.400,00	525.184.950,00
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
22.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM PERTANIAN**	**360.000.000,00**	**359.550.000,00**	**99,88**	**0,00**	**359.550.000,00**
	DINAS KESEHATAN	360.000.000,00	359.550.000,00	99,88	0,00	359.550.000,00
23.	**BELANJA MODAL ALAT PROCESSING**	**120.000.000,00**	**112.500.000,00**	**93,75**	**0,00**	**112.500.000,00**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	120.000.000,00	112.500.000,00	93,75	0,00	112.500.000,00
V	**BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**10.796.148.795,00**	**9.771.135.318,00**	**90,51**	**5.504.110.626,00**	**4.267.024.692,00**
24.	**BELANJA MODAL MESIN KETIK**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**4.025.000,00**	**975.000,00**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)
	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	(1.725.000,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
25.	**BELANJA MODAL MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	50,00	**0,00**	**5.000.000,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
	DINAS PENDIDIKAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	**BELANJA MODAL ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**257.624.000,00**	**180.471.000,00**	**70,05**	**127.763.000,00**	**52.708.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00	4.090.000,00	2.570.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	5.236.000,00	(5.236.000,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.020.000,00	7.020.000,00	100,00	0,00	7.020.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	97.347.000,00	(97.347.000,00)
	SEKRETARIAT DPRD	143.000.000,00	134.400.000,00	93,99	15.000.000,00	119.400.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	(6.090.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	2.500.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	3.500.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00	0,00	9.550.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	12.250.000,00	11.433.000,00	93,33	0,00	11.433.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	2.508.000,00	2.508.000,00	100,00	0,00	2.508.000,00
	DINAS KESEHATAN	1.620.000,00	900.000,00	24,86	0,00	900.000,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	2.000.000,00.	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00
27.	**BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA**	**996.010.895,00**	**948.751.000,00**	**95,26**	**628.075.249,00**	**320.675.751,00**
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	98.625.000,00	(98.625.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS KESEHATAN	90.362.500,00	62.250.000,00	66,68	5.700.000,00	56.550.000,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	0,00.	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	RSUD JARAGA SASAMEH	0,00	0,00	0,00	374.761.249,00	(374.761.249,00)
	PUSKESMAS PATAS (JKN)	3.000.000,00.	3.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.619.895,00	35.520.000,00	87,44	11.100.000,00	24.420.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	(9.650.000,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	474.000.000,00	464.830.000,00	98,07	7.500.000,00	457.330.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	34.500.000,00	32.856.000,00	95,23	10.989.000,00	21.867.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	7.500.000,00	112.500.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00	0,00	(4.284.000,00)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	24.950.000,00	(22.550.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	108.900.000,00	108.900.000,00	100,00	36.000.000,00	72.900.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)
	KECAMATAN DUSUN HILIR	18.594.500,00	15.500.000,00	83,36	0,00	15.500.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.000.000,00	9.000.000,00	100	0,00	9.000.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	21.000.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	0,00	2.350.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	16.400.000,00	16.261.000,00	99,15	0,00	16.261.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	50.600.000,00	50.600.000,00	100,00	0,00	50.600.000,00
28.	**BELANJA MODAL MEBEL**	**4.087.491.040,00**	**3.749.982.040,00**	**91,74**	**2.749.965.750,00**	**1.000.016.290,00**
	DINAS PENDIDIKAN	1.842.030.000,00	1.805.143.000,00	98,00	536.874.700,00	1.268.268.300,00
	DINAS KESEHATAN	134.388.640,00	108.310.500,00	80,59	20.788.000,00	87.522.500,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)
	PUSKESMAS PATAS (JKN)	1.132.000,00	1.132.000,00	100,00	0,00	1.132.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.361.400,00	16.361.400,00	100,00	147.985.200,00	(131.623.800,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	(72.000.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	56.600.000,00	(56.600.000,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	179.250.000,00	(138.850.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000,00	90.550.000,00	90,55	12.950.000,00	77.600.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	34.000.000,00	20.000.000,00	58,82	73.270.000,00	(53.270.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.532.000,00	52.532.000,00	100,00	22.900.000,00	29.632.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	65.528.000,00	65.306.850,00	99,66	112.050.000,00	(46.743.150,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.210.000,00	40.210.000,00	100,00	0,00	40.210.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	121.552.000,00	120.500.000,00	99,13	21.250.000,00	99.250.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	(39.960.000,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	51.350.000,00	(39.350.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	220.000.000,00	207.653.090,00	94,39	950.851.850,00	(743.198.760,00)
	SEKRETARIAT DPRD	504.000.000,00	461.803.600,00	91,63	42.450.000,00	419.353.600,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	59.400.000,00	58.008.600,00	97,66	18.240.000,00	39.768.600,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	352.441.000,00	165.525.000,00	46,97	58.625.000,00	106.900.000,00
	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	37.220.000,00	35.000.000,00	94,04	0,00	35.000.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	73.896.000,000	73.896.000,00	100,00	154.841.000,00	(80.945.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	25.630.000,00	14.370.000,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	45.000.000,00	(21.300.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	0,00	0,00	0,00	60.300.000,00	(60.300.000,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.000.000,00	23.750.000,00	95,00	0,00	23.750.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	206.360.000,00	204.860.000,00	99,27	0,00	204.860.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00	0,00	18.000.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	39.540.000,00	39.540.000,00	100,00	0,00	39.540.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	0,00	25.800.000,00
29.	**BELANJA MODAL ALAT PEMBERSIH**	**69.000.000,00**	**64.200.000,00**	**93,04**	**79.984.500,00**	**(15.784.500,00)**
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEKRETARIAT DAERAH	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	65.172.000,00	(55.572.000,00)
	SEKRETARIAT DPRD	59.400.000,00	54.600.000,00	91,92	14.812.500,00	39.787.500,00
30.	**BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN**	**1.885.884.800,00**	**1.564.328.808,00**	**82,95**	**983.512.037,00**	**580.816.771,00**
	DINAS PENDIDIKAN	172.000.000,00	0,00	0,00	31.154.720,00	(31.154.720,00)
	DINAS KESEHATAN	132.488.692,00	83.005.200,00	62,65	4.100.000,00	78.905.200,00
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	4.743.750,00	7.856.250,00
	PUSKESMAS PENDANG (JKN)	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	1.100.000,00	11.500.000,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
	PUSKESMAS PATAS 1 (JKN)	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	8.382.000,00	18.000,00
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	3.962.108,00	3.962.108,00	100,00	0,00	3.962.108,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	12.118.000,00	12.118.000,00	100,00	0,00	12.118.000,00
	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE (JKN)	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	103.452.000,00	103.218.900,00	99,77	199.800.000,00	(96.581.100,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	16.002.000,00	(16.002.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	89,91	8.906.625,00	(8.906.625,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	20.000.000,00	19.990.000,00	99,95	50.313.455,00	(30.323.455,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000,00	47.800.000,00	95,60	22.650.000,00	25.150.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	16.755.000,00	(3.255.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	12.202.700,0	25.797.300,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	0,00	18.900.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	23.900.000,00	21.034.500,00	88,01	38.221.740,00	(17.187.240,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	26.486.937,00	(8.986.937,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	43.078.350,00	(43.078.350,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	73.080.400,00	(73.080.400,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	34.396.680,00	(34.396.680,00)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	55.280.000,00	53.500.000,00	96,78	3.048.000,00	50.452.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.877.000,00	6.123.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	371.000.000,00	368.400.000,00	99,30	27.278.500,00	341.121.500,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.000.000,00	11.875.500,00	98,96	15.700.000,00	(3.824.500,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85.000.000,00	83.000.000,00	97,65	87.614.000,00	(4.614.000,00)
	SEKRETARIAT DPRD	460.000.000,00	373.800.000,00	81,26	132.413.000,00	241.387.000,00
	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	19.212.700,00	(19.212.700,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	19.292.000,00	(16.292.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	15.786.480,00	(3.786.480,00)
	KECAMATAN JENAMAS	24.600.000,00	24.424.600,00	99,29	1.500.000,00	22.924.600,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	21.844.000,00	(7.644.000,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	10.572.000,00	(10.572.000,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	60.384.000,00	59.900.000,00	99,20	0,00	59.900.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	103.000.000,00	101.600.000,00	98,64	0,00	101.600.000,00
31.	**BELANJA MODAL ALAT DAPUR**	**54.000.000,00**	**49.800.000,00**	**92,22**	**26.629.600,00**	**23.171.400,00**
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	7.686.750,00	(7.686.750,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	822.250,00	(822.250,00)
	SEKRETARIAT DPRD	54.000.000,00	49.800.000,00	92,22	10.120.000,00	39.680.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
32.	**BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA (HOME USE)**	**1.351.320.000,00**	**1.240.366.200,00**	**91,79**	**506.015.090,00**	**734.351.110,00**
	DINAS PENDIDIKAN	27.000.000,00	0,00	0,00	5.498.940,00	(5.498.940,00)
	DINAS KESEHATAN	3.750.000,00	0,00	0,00	7.750.000,00	(7.750.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.860.000,00	97.493.700,00	99,63	86.580.000,00	10.913.700,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00	5.500.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	13.042.750,00	(13.042.750,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	8.021.650,00	(8.021.650,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	10.000.000,00	9.934.500,00	99,35	9.523.800,00	410.700,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	(1.130.000,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.980.000,00	4.980.000,00	100,00	0,00	4.980.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	122.000.000,00	121.800.000,00	99,84	276.780.450,00	(154.980.450,00)
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.880.000,00	8.358.000,00	94,12	0,00	8.358.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	215.000.000,00	195.600.000,00	90,98	0,00	195.600.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.750.000,00	27.720.000,00	99,89	6.937.500,00	20.782.500,00
	SEKRETARIAT DPRD	593.650.000,00	558.780.000,00	94,13	20.000.000,00	538.780.000,00
	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	31.750.000,00	(31.750.000,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	(4.750.000,00)
	KECAMATAN DUSUN UTARA	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	(27.600.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00	5.250.000,00	18.550.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36.450.000,00	24.000.000,00	65,84	0,00	24.000.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	54.000.000,00	44.100.000,00	81,67	0,00	44.100.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.000.000,00	7.900.000,00	98,75	0,00	7.900.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	43.700.000,0	43.700.000,00	100,00	0,00	43.700.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	54.000.000,00	51.700.000,00	95,74	0,00	51.700.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
33.	**BELANJA MODAL ALAT PEMADAM KEBAKARAN**	**730.750.000,00**	**695.910.000,00**	**95,23**	**138.566.000,00**	**557.344.000,00**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	549.200.000,00	514.860.000,00	93,75	25.176.000,00	489.684.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	181.550.000,00	181.050.000,00	99,72	97.540.000,00	83.510.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	(14.100.000,00)
34.	**BELANJA MODAL MEJA KERJA PEJABAT**	**259.660.560,00**	**237.666.250,00**	**91,53**	**4.125.000,00**	**233.541.250,00**
	DINAS KESEHATAN	35.160.560,00	19.400.000,00	100,00	0,00	19.400.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	4.125.000,00	7.675.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62.250.000,00	62.250.000,00	100,00	0,00	62.250.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00	5.500.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.000.000,00	5.966.250,00	99,44	0,00	5.966.250,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	0,00	24.750.000,00
35.	**BELANJA MODAL MEJA RAPAT PEJABAT**	**65.700.000,00**	**54.900.000,00**	**83,56**	**74.200.000,00**	**(19.300.000,00)**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	(18.400.000,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	(55.800.000,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.325.000,00	8.325.000,00	100,00	0,00	8.325.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN	12.675.000,00	12.675.000,00	100,00	0,00	12.675.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00
	DINAS KESEHATAN	16.200.000,00	14.400.000,00	88,89	0,00	14.400.000,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	1.500.000,00
36.	**BELANJA MODAL KURSI KERJA PEJABAT**	**478.837.000,00**	**461.277.600,00**	**96,33**	**36.750.000,00**	**424.527.600,00**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63.900.000,00	61.650.000,00	96,48	36.750.000,00	24.900.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.993.000,00	14.825.000,00	98,88	0,00	14.825.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	29.839.000,00	28.704.600,00	96,20	0,00	28.704.600,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	43.300.000,00	43.300.000,00	100,00	0,00	43.300.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.875.000,00	7.875.000,00	100,00	0,00	7.875.000,00
	DINAS PENDIDIKAN	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	0,00	84.000.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.693.000,00	19.693.000,00	100,00	0,00	19.693.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29.279.000,00	29.250.000,00	99,90	0,00	29.250.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	29.000.000,00	28.250.000,00	97,41	0,00	28.250.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	12.600.000,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00	42.000.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	17.358.000,00	17.280.000,00	99,55	0,00	17.280.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00	48.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	10.500.000,00	6.300.000,00	60,00	0,00	6.300.000,00
	DINAS KESEHATAN	16.000.000,00	7.050.000,00	44,06	0,00	7.050.000,00
	PUSKESMAS PATAS 1 (JKN)	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00
37.	**BELANJA MODAL KURSI RAPAT PEJABAT**	**151.375.000,00**	**151.152.480,00**	**99,85**	**84.500.000,00**	**66.652.480,00**
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	(84.500.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.200.000,00	4.195.800,00	99,90	0,00	4.195.800,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.875.000,00	13.872.780,00	99,98	0,00	13.872.780,00
	DINAS PERHUBUNGAN	16.300.000,00	16.083.900,00	98,67	0,00	16.083.900,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00
38.	**BELANJA MODAL KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT**	**20.000.000,00**	**18.600.000,00**	**93,00**	**0,00**	**18.600.000,00**
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20.000.000,00	18.600.000,00	93,00	0,00	18.600.000,00
39.	**BELANJA MODAL LEMARI DAN ARSIP PEJABAT**	**373.495.500,00**	**343.729.940,00**	**92,03**	**60.000.000,00**	**283.729.940,00**
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	10.000.000,00	25.000.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	14.250.000,00	14.141.400,00	99,24	5.000.000,00	9.141.400,00
	SEKRETARIAT DPRD	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	20.000.000,00	26.500.000,00
	INSPEKTORAT	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	25.000.000,00	(14.500.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	31.500.000,00	28.000.000,00	88,89	0,00	28.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	99.150.000,00	81.650.000,00	82,35	0,00	81.650.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.160.000,00	26.062.540,00	99,63	0,00	26.062.540,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.508.000,00	9.508.000,00	100,00	0,00	9.508.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.008.000,00	6.008.000,00	100,00	0,00	6.008.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	0,00	24.200.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00	10.500.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.000.000,00	20.850.000,00	99,29	0,00	20.850.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	15.360.000,00	9.310.000,00	60,61	0,00	9.310.000,00
	DINAS KESEHATAN	16.859.500,00	14.500.000,00	86,00	0,00	14.500.000,00
VI	**BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR**	**5.491.215.760,00**	**5.257.276.355,00**	**95,74**	**1.000.711.985,00**	**4.256.564.370,00**
40.	**BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO**	**726.660.100,00**	**616.123.400,00**	**84,79**	**206.800.000,00**	**409.323.400,00**
	DINAS PENDIDIKAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEKRETARIAT DAERAH	51.620.500,00	50.700.000,00	98,22	0,00	50.700.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.330.000,00	2.678.000,00	80,42	0,00	2.678.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.000.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	(8.100.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	100,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	8.270.000,00	8.270.000,00	100,00	2.200.000,00	6.070.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	194.000.000,00	(194.000.000,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.738.800,00	16.690.000,00	99,71	0,00	16.690.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.080.000,00	11.240.000,00	85,93	0,00	11.240.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101.062.500,00	93.806.100,00	92,82	0,00	93.806.100,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.270.000,00	6.270.000,00	100,00	0,00	6.270.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	372.929.300,00	370.889.300,00	99,45	0,00	370.889.300,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.270.000,00	6.270.000,00	100,00	0,00	6.270.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KECAMATAN JENAMAS	24.540.000,00	24.540.000,00	100,00	0,00	24.540.000,00
	DINAS KESEHATAN	41.739.000,00	18.500.000,00	44,32	0,00	18.500.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.270.000,00	6.270.000,00	100,00	0,00	6.270.000,00
41.	**BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM**	**3.764.469.760,00**	**3.684.552.500,00**	**97,88**	**322.047.950,00**	**3.362.504.550,00**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PENDIDIKAN	44.500.000,00	0,00	100,00	9.100.000,00	(9.100.000,00)
	DINAS KESEHATAN	12.005.760,00	12.000.000,00	99,95	9.090.000,00	2.910.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.200.620.800,00	1.190.500.000,00	99,16	0,00	1.190.500.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	(37.800.000,00)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	317.500.000,00	295.982.500,00	93,22	117.182.600,00	178.799.900,00
	SEKRETARIAT DAERAH	22.350.000,00	22.350.000,00	100,00	66.858.350,00	(44.508.350,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00	9.500.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	(22.100.000,00)
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.995.000,00	4.500.000,00	90,09	40.250.000,00	(35.750.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	44.500.000,00	44.440.000,00	99,87	19.667.000,00	24.773.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.995.000,00	4.925.000,00	98,60	0,00	4.925.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	115.000.000,00	114.980.000,00	99,98	0,00	114.980.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	8.500.000,00	7.875.000,00	92,65	0,00	7.875.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	44.500.000,00	44.500.000,00	100,00	0,00	44.500.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00	8.500.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	1.922.503.200,00	1.920.000.000,00	99,87	0,00	1.920.000.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	4.500.000,00
42.	**BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO GAMBAR**	**97.034.400,00**	**74.851.455,00**	**77,14**	**166.780.000,00**	**(91.928.545,00)**
	DINAS PENDIDIKAN	10.000.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	(8.640.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	(8.640.000,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00	(149.500.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.100.000,00	11.000.000,00	99,10	0,00	11.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.100.000,00	10.250.000,00	92,34	0,00	10.250.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	54.834.400,00	43.601.455,00	79,51	0,00	43.601.455,00
43.	**BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO PEMETAAN/ PERALATAN UKUR TANAH**	**614.000.000,00**	**613.800.000,00**	**99,97**	**0,00**	**613.800.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	614.000.000,00	613.800.000,00	99,97	0,00	613.800.000,00
44.	**BELANJA MODAL ALAT STUDIO LAINNYA**	**31.551.500,00**	**31.272.000,00**	**99,11**	**223.863.340,00**	**(192.591.340,00)**
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	15.999.540,00	(15.999.540,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	48.250.000,00	(48.250.000,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	24.998.000,00	(18.998.000,00)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	15.980.000,00	(15.980.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	11.520.000,00	11.322.000,00	98,28	2.997.000,00	8.325.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	18.998.000,00	(18.998.000,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	100,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	(15.900.000,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)
	KECAMATAN DUSUN HILIR	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00	0,00	6.650.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	14.740.800,00	(14.740.800,00)
	DINAS KESEHATAN	7.381.500,00	7.300.000,00	98,90	0,00	7.300.000,00
45.	**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE**	**47.000.000,00**	**26.500.000,00**	**56,38**	**4.029.000,00**	**22.471.000,00**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	4.029.000,00	(4.029.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.000.000,00	26.500.000,00	56,38	0,00	26.500.000,00
46.	**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB**	**55.000.000,00**	**54.680.000,00**	**99,42**	**0,00**	**54.680.000,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	27.000.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	16.000.000,00	15.980.000,00	99,88	0,00	15.980.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	SEKRETARIAT DAERAH	12.000.000,00	11.700.000,00	97,50	0,00	11.700.000,00
47.	**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.541.905,00**	**(14.541.905,00)**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	14.541.905,00	(14.541.905,00)
48.	**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.401.470,00**	**(17.401.470,00)**
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	17.401.470,00	(17.401.470,00)
49.	**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	4.000.000,00
50.	**BELANJA MODAL ALAT-ALAT SANDI**	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**	**100,00**	**31.648.320,00**	**(1.148.320,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	16.650.000,00	(11.650.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	14.998.320,00	(14.998.320,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00	8.500.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	17.000.000,00
51.	**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI KHUSUS**	**84.000.000,00**	**83.997.000,00**	**100,00**	**0,00**	**83.997.000,00**
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	84.000.000,00	83.997.000,00	100,00	0,00	83.997.000,00
52.	**BELANJA MODAL PERALATAN *MICROWAVE* TERESTRIAL**	**0,00**	**0,00**	99,89	**9.450.000,00**	**(9.450.000,00)**
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	(9.450.000,00)
53.	**BELANJA MODAL SWITCHER ANTENA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**(4.150.000,00)**
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	(4.150.000,00)
54.	**BELANJA MODAL PERALATAN PEMANCAR LAINNYA**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000.000,00**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	0,00	37.000.000,00
VII	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	**10.109.456.172,00**	**9.669.902.671,00**	**95,65**	**17.848.701.092,00**	**(8.178.798.421,00)**
55.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM**	**1.547.626.497,00**	**1.394.627.200,00**	**90,11**	**11.425.960.040,00**	**(10.031.332.840,00)**
	DINAS KESEHATAN	1.541.045.307,00	1.388.046.200,00	90,07	11.379.000.000,00	(9.990.953.800,00)
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	0,00	0,00	100,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	7.084.000,00	(7.084.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.581.190,00	6.581.000,00	100,00	27.485.000,00	(20.904.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	(1.095.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	5.975.000,00	(5.975.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	3.521.040,00	(3.521.040,00)
56.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN GIGI**	**1.035.000.000,00**	**1.024.809.090,00**	**99,02**	**0,00**	**1.024.809.090,00**
	DINAS KESEHATAN	1.035.000.000,00	1.024.809.090,00	99,02	0,00	1.024.809.090,00
57.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN BEDAH**	**85.508.000,00**	**73.996.000,00**	**86,54**	**0,00**	**73.996.000,00**
	DINAS KESEHATAN	85.508.000,00	73.996.000,00	86,54	0,00	73.996.000,00
58.	**BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN**	**29.062.200,00**	**11.900.000,00**	**40,95**	**0,00**	**11.900.000,00**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS KESEHATAN	26.962.200,00	11.900.000,00	40,95	0,00	11.900.000,00
59.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN THT**	**4.860.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DINAS KESEHATAN	4.860.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN ANAK**	**2.897.338.808,00**	**2.832.180.381,00**	**97,75**	**0,00**	**2.832.180.381,00**
	DINAS KESEHATAN	2.897.338.808,00	2.832.180.381,00	97,75	0,00	2.832.180.381,00
61.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC**	**1.458.699.000,00**	**1.458.650.000,00**	**100,00**	**0,00**	**1.458.650.000,00**
	DINAS KESEHATAN	1.458.699.000,00	1.458.650.000,00	100,00	0,00	1.458.650.000,00
62.	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN ANESTESI**	**2.790.000.000,00**	**2.789.000.000,00**	**99,96**	**0,00**	**2.789.000.000,00**
	DINAS KESEHATAN	2.790.000.000,00	2.789.000.000,00	99,96	0,00	2.789.000.000,00
63.	**BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA**	**261.361.532,00**	**84.740.000,00**	**32,42**	**6.422.741.052,00**	**(6.338.001.052,00)**
	DINAS KESEHATAN	261.361.532,00	84.740.000,00	32,42	6.255.902.052,00	(6.171.162.052,00)
	PUSKESMAS BUNTOK (BLUD)	0,00	0,00	0,00	166.839.000,00	(166.839.000,00)
VIII	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM**	**1.434.482.770,00**	**1.248.294.659,00**	**87,02**	**1.832.194.500,00**	**(583.899.841,00)**
64.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN**	**140.840.000,00**	**127.000.000,00**	**90,17**	**0,00**	**127.000.000,00**
	DINAS KESEHATAN	140.840.000,00	127.000.000,00	90,17	0,00	127.000.000,00
65.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM UMUM**	**153.166.860,00**	**132.052.100,00**	**86,21**	**307.500.000,00**	**(175.447.500,00)**
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	307.500.000,00	(307.500.000,00)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130.907.750,00	120.650.000,00	92,16	0,00	120.650.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS KESEHATAN	21.235.360,00	10.378.350,00	48,87	0,00	10.378.350,00
	PUSKESMAS PATAS (JKN)	1.023.750,00	1.023.750,00	100,00	0,00	1.023.750,00
66.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM KIMIA**	**43.320.000,00**	**29.603.700,00**	**68,34**	**0,00**	**29.603.700,00**
	DINAS KESEHATAN	43.320.000,00	29.603.700,00	68,34	0,00	29.603.700,00
67.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI**	**39.303.000,00**	**39.300.000,00**	**99,99**	**0,00**	**39.300.000,00**
	DINAS KESEHATAN	39.303.000,00	39.300.000,00	99,99	0,00	39.300.000,00
68.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI**	**158.500.000,00**	**153.000.000,00**	**96,53**	**0,00**	**153.000.000,00**
	DINAS KESEHATAN	158.500.000,00	153.000.000,00	96,53	0,00	**153.000.000,00**
69.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM FILM**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**11.500.000,00**	**(11.500.000,00)**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)
70.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM FARMASI**	**126.182.910,00**	**124.500.000,00**	**98,67**	**0,00**	**124.500.000,00**
	DINAS KESEHATAN	126.182.910,00	124.500.000,00	98,67	0,00	124.500.000,00
71	**BELANJA MODAL ALAT PERAGA PAUD/TK**	**400.000.000,00**	**292.274.000,00**	**73,07**	**149.700.000,00**	**142.574.000,00**
	DINAS PENDIDIKAN	400.000.000,00	292.274.000,00	73,07	149.700.000,00	142.574.000,00
72.	**BELANJA MODAL ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH LAINNYA**	**300.000.000,00**	**278.222.000,00**	**92,74**	**0,00**	**278.222.000,00**
	DINAS PENDIDIKAN	300.000.000,00	278.222.000,00	92,74	0,00	278.222.000,00
73.	**BELANJA MODAL SYSTEM/ POWER SUPPLY**	**39.120.000,00**	**38.292.859,00**	**97,89**	**22.994.500,00**	**(15.298.359,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	22.994.500,00	(22.994.500,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12.000.000,00	11.280.000,00	94,00	0,00	11.280.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	4.000.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	12.000.000,00	11.902.859,00	99,19	0,00	11.902.859,00
	SEKRETARIAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00
	DINAS KESEHATAN	5.120.000,00	5.110.000,00	99,80	0,00	5.110.000,00
74.	**PROTEKSI LINGKUNGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340.500.000,00**	**(1.340.500.000,00)**
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	1.340.500.000,00	(1.340.500.000,00)
75.	**BELANJA MODAL LABORATORIUM LINGKUNGAN**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
76.	**BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA**	**28.050.000,00**	**28.050.000,00**	**100,00**	**0,00**	**28.050.000,00**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.050.000,00	28.050.000,00	100,00	0,00	28.050.000,00
IX	**BELANJA MODAL KOMPUTER**	**11.837.362.019,00**	**11.250.748.833,00**	**95,04**	**5.176.552.759,00**	**6.074.196.074,00**
77.	**BELANJA MODAL KOMPUTER JARINGAN**	**157.700.000,00**	**157.600.000,00**	**99,94**	**138.900.000,00**	**18.700.000,00**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	150.000.000,00	149.900.000,00	99,93	138.900.000,00	11.000.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00	7.700.000,00
78.	**BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER**	**9.501.819.290,00**	**9.086.402.314,00**	**95,63**	**3.456.518.470,00**	**5.629.883.844,00**
	DINAS PENDIDIKAN	862.330.000,00	782.922.000,00	90,79	1.043.230.300,00	(260.308.300,00)
	DINAS KESEHATAN	784.838.725,00	632.312.000,00	80.57	25.411.000,00	606.901.000,00
	PUSKESMAS BABAI (JKN)	11.150.000,00	11.150.000,00	100,00	7.800.000,00	3.350.000,00
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	0,00	0,00	0,00	9.652.000,00	(9.652.000,00)
	PUSKESMAS BARU (JKN)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	9.652.000,00	2.348.000,00
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	8.749.655,00	8.749.655,00	100,00	9.652.000,00	(902.345,00)
	PUSKESMAS KALAHIEN (JKN))	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	19.050.000,00	6.950.000,00
	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE (JKN)	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00	9.652.000,00	(5.242.000,00)
	PUSKESMAS PATAS (JKN)	0,00	0,00	0,00	9.652.000,00	(9.652.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.153.210.800,00	1.129.977.572,00	97,99	116.614.490,00	1.013.363.082,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	171.351.250,00	171.351.250,00	100,00	15.936.000,00	155.415.250,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	74.340.000,00	74.290.000,00	99,93	126.950.000,00	(52.660.000,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	630.327.700,00	630.150.000,00	99,97	164.425.500,00	465.724.500,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	145.060.000,00	145.000.000,00	99,96	60.533.280,00	84.466.720,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	260.056.000,00	260.026.000,00	99,99	125.412.500,00	134.613.500,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	124.350.000,00	124.350.000,00	100,00	37.003.000,00	87.347.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	247.134.000,00	245.700.000,00	99,42	105.000.000,00	140.700.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	258.700.000,00	256.474.500,00	99,14	25.399.020,00	231.075.480,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	288.264.000,00	265.022.762,00	91,94	92.170.000,00	172.852.762,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	46.495.000,00	46.495.000,00	100,00	0,00	46.495.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	(8.900.000,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	167.200.000,00	167.130.000,00	99,96	13.350.000,00	153.780.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	1.507.030.000,00	1.495.826.178,00	99,26	408.053.450,00	1.087.772.728,00
	INSPEKTORAT	464.500.000,00	462.743.200,00	99,62	89.497.080,00	373.246.120,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	287.050.000,00	261.421.812,00	91,07	12.050.000,00	249.371.812,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.012.625.700,00	945.772.700,00	93,40	583.655.000,00	362.117.700,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	79.600.000,00	79.254.000,00	99,57	48.923.250,00	30.330.750,00
	SEKRETARIAT DPRD	114.562.500,00	114.300.000,00	99,77	0,00	114.300.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	27.600.000,00	(13.600.000,00)
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	55.899.000,00	55.899.000,00	100,00	37.025.000,00	18.874.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	106.100.000,00	104.600.000,00	98,59	16.764.000,00	87.836.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.000.000,00	12.300.000,00	94,62	197.505.600,00	(185.205.600,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	24.193.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00	175.000.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	94.447.700,00	94.216.841,00	99,76	0,00	94.216.841,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	119.447.700,00	119.215.000,00	99,81	0,00	119.215.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	128.396.000,00	128.342.844,00	99,96	0,00	128.342.844,00
79.	**BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT LAINNYA**	**174.628.000,00**	**147.200.200,00**	**84,29**	**37.300.000,00**	**109.900.200,00**
	DINAS KESEHATAN	23.441.800,00	0,00	42,90	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	PUSKESMAS PATAS (JKN)	15.670.200,00	15.670.200,00	100,00	0,00	15.670.200,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	0,00	18.800.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	(22.300.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	0,00	10.000.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	19.304.000,00	17.873.000,00	92,59	0,00	17.873.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00	27.500.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	38.608.000,00	38.057.000,00	98,57	0,00	38.057.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	19.304.000,00	19.300.000,00	99,98	0,00	19.300.000,00
80.	**BELANJA MODAL PERALATAN MAINFRAME**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**17.882.500,00**	**(17.882.500,00)**
	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	6.382.500,00	(6.382.500,00)
81.	**BELANJA MODAL PERALATAN MINI COMPUTER**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**100,00**	**25.575.000,00**	**(7.575.000,00)**
	SEKRETARIAT DAERAH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	25.575.000,00	(7.575.000,00)
82.	**BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER**	**1.733.813.556,00**	**1.616.971.305,00**	**93,26**	**1.470.157.729,00**	**146.813.576,00**
	DINAS PENDIDIKAN	215.512.000,00	195.800.000,00	90,85	80.755.275,00	115.044.725,00
	DINAS KESEHATAN	159.721.300,00	144.110.000,00	90,23	18.000.000,00	208.546.800,00
	PUSKESMAS TABAK KANILAN (JKN)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.500.000,00	(300.000,00)
	PUSKESMAS BABAI (JKN)	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
	PUSKESMAS BANGKUANG (JKN)	33.091.200,00	33.091.200,00	0,00	875.000,00	32.216.200,00
	PUSKESMAS BARU (JKN)	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)
	PUSKESMAS JENAMAS (JKN)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
	PUSKESMAS MENGKATIP (JKN)	29.430.400,00	29.430.400,00	0,00	875.000,00	28.555.400,00
	PUSKESMAS PATAS 1 (JKN)	14.715.200,00	14.715.200,00	0,00	1.650.000,00	13.065.200,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	194.134.134,00	187.104.920,00	96,38	247.381.702,00	(60.276.782,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56.237.500,00	53.280.000,00	94,74	43.492.000,00	9.788.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.377.800,00	6.368.000,00	99,85	9.523.000,00	(3.155.000,00)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.430.000,00	15.400.000,00	99,81	22.076.250,00	(6.676.250,00)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	76.470.900,00	74.540.900,00	97,48	875.000,00	73.665.900,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.104.100,00	4.104.100,00	100,00	99.625.000,00	(95.520.900,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	30.796.900,00	30.786.400,00	99,97	32.941.500,00	(2.155.100,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	69.385.000,00	69.250.000,00	99,81	3.300.000,00	65.950.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	85.770.000,00	76.259.085,00	88,91	66.332.200,00	9.926.885,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	(88.000.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	(27.100.000,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.390.000,00	15.390.000,00	100,00	58.500.000,00	(43.110.000,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	(2.875.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	111.140.500,00	95.651.000,00	86,06	179.118.375,00	(83.467.375,00)
	SEKRETARIAT DPRD	47.250.000,00	47.250.000,00	100,00	19.290.700,00	27.959.300,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	57.363.000,00	49.810.500,00	86,83	13.850.000,00	35.960.500,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	298.038.700,00	273.069.200,00	91,62	264.642.000,00	8.427.200,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	21.681.900,00	21.681.900,00	100,00	23.845.227,00	(2.163.327,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	0,00	0,00	0,00	27.690.000,00	(27.690.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	22.045.600,00	21.925.000,00	99,45	62.200.000,00	(40.275.000,00)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.817.500,00	37.750.000,00	92,48	63.794.500,00	(26.044.500,00)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13780.650,00	13.736.250,00	99,68	0,00	13.736.250,00
	DINAS PERHUBUNGAN	34.023.400,00	33.605.250,00	98,77	0,00	33.605.250,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	9.251.000,00	9.225.000,00	99,72	0,00	9.225.000,00
	KECAMATAN DUSUN UTARA	13.559.000,00	6.357.000,00	46,88	0,00	6.357.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	52.080.000,00	52.080.000,00	100,00	0,00	52.080.000,00
83.	**BELANJA MODAL PERALATAN JARINGAN**	**168.641.173,00**	**143.131.500,00**	**84,87**	**1.764.600,00**	**141.366.900,00**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	83.800.000,00	83.101.500,00	99,17	1.764.600,00	81.336.900,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.750.000,00	1.740.000,00	99,43	0,00	1.740.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.152.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINAS PENDIDIKAN	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00
	KECAMATAN KARAU KUALA	46.543.000,00	46.490.000,00	99,89	0,00	46.490.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00
	DINAS KESEHATAN	11.720.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
84.	**BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA**	**82.760.000,00**	**81.443.514,00**	**98,41**	**28.454.460,00**	**52.989.054,00**
	DINAS PENDIDIKAN	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	6.500.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.880.000,00	8.000.000,00	90,09	0,00	8.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	3.528.000,00	(3.528.000,00)
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	11.925.000,00	(11.925.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	24.000.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.880.000,00	16.463.514,00	97,53	0,00	16.463.514,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	24.000.000,00
	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	13.001.460,00	(13.001.460,00)
	KECAMATAN DUSUN HILIR	2.500.000,00	2.480.000,00	99,20	0,00	2.480.000,00
X	**BELANJA MODAL ALAT EKSPLORASI**	**248.124.700,00**	**234.223.250,00**	**94,40**	**51.185.000,00**	**183.038.250,00**
85.	**BELANJA MODAL UKUR/INSTRUMEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.185.000,00**	**(51.185.000,00)**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	51.185.000,00	(51.185.000,00)
86.	**BELANJA MODAL ELEKTRONIK/ELECTRIC**	**248.124.700,00**	**234.223.250,00**	**94,40**	**0,00**	**234.223.250,00**
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	35.820.000,00	35.820.000,00	100,00	0,00	35.820.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	52.978.000,00	49.795.000,00	93,99	0,00	49.795.000,0
	SEKRETARIAT DPRD	67.890.000,00	59.250.000,00	87,27	0,00	59.250.000,00
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	82.310.000,00	80.502.000,00	97,80	0,00	80.502.000,00
	DINAS KESEHATAN	9.126.700,00	8.856.250,00	97,04	0,00	8.856.250,00
XI	**BELANJA MODAL ALAT PENGEBORAN**	**240.000.000,00**	**239.600.000,00**	**99,83**	**0,00**	**239.600.000,00**
87.	**BELANJA MODAL PERALATAN BANTU**	**240.000.000,00**	**239.600.000,00**	**99,83**	**0,00**	**239.600.000,00**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	240.000.000,00	239.600.000,00	99,83	0,00	239.600.000,00
XII	**BELANJA MODAL ALAT KESELAMATAN KERJA**	**427.700.000,00**	**37.400.000,00**	**97,78**	**0,00**	**37.400.000,00**
88.	**BELANJA MODAL SEPATU LAPANGAN**	**38.250.000,00**	**37.400.000,00**	**97,78**	**0,00**	**37.400.000,00**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	38.250.000,00	37.400.000,00	97,78	0,00	37.400.000,00
89.	**BELANJA MODAL ALAT PELINDUNG LAINNYA**	**125.950.000,00**	**58.479.250,00**	**46,43**	**0,00**	**58.479.250,00**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	125.950.000,00	58.479.250,00	46,43	0,00	58.479.250,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
90.	**BELANJA MODAL ALAT PENDUKUNG PENCARIAN**	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**33.500.000,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	0,00	33.500.000,00
91.	**BELANJA MODAL ALAT KERJA BAWAH AIR**	**230.000.000,00**	**228.900.000,00**	**99,52**	**0,00**	**228.900.000,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	115.000.000,00	114.900.000,00	99,91	0,00	114.900.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	115.000.000,00	114.000.000,00	99,13	0,00	114.000.000,00
XIII	**BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU**	**229.494.925,00**	**229.200.000,00**	**99,8**	**173.754.023,59**	**55.445.976,41**
92.	**BELANJA MODAL RAMBU TIDAK BERSUAR**	**229.494.925,00**	**229.200.000,00**	**99,67**	**173.754.023,59**	**55.445.976,41**
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	6.982.100,00	(6.982.100,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	99.494.925,00	99.300.000,00	99,80	161.771.923,59	(62.471.923,59)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	130.000.000,00	129.900.000,00	99,92	0,00	129.900.000,00
XIV	**BELANJA MODAL PERALATAN OLAHRAGA**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**100,00**	**40.000.000,00**	**8.000.000,00**
93.	**BELANJA MODAL PERALATAN PERMAINAN**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**100,00**	**40.000.000,00**	**8.000.000,00**
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	40.000.000,00	8.000.000,00
XV	**BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD**	**4.806.316.385,00**	**1.426.318.750,00**	**29,68**	**0,00**	**1.426.318.750,00**
94.	**BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD**	**4.806.316.385,00**	**1.426.318.750,00**	**29,68**	**0,00**	**1.426.318.750,00**
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSUD JARAGA SASAMEH (BLUD)	1.286.313.750,00	1.286.313.750,00	100,00	0,00	1.286.313.750,00
	PUSKESMAS BUNTOK (BLUD)	140.005.000,00	140.005.000,00	100,00	0,00	140.005.000,00
Jumlah		**88.037.993.441,00**	**76.322.201.311,00**	**86,69**	**50.074.252.410,59**	**26.247.948.900,41**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**146.211.601.103,80**	**76.680.345.009,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp146.211.601.103,80 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp150.622.528.978,99. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp76.680.345.009,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.531.256.094,80 atau 90,68%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.44 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	148.922.528.978,99	145.343.143.103,80	97,60	75.743.145.009,00	69.599.998.094,8
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	870.000.000,00	868.458.000,00	99,39	937.200.000,00	(68.742.000,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	830.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**150.622.528.978,99**	**146.211.601.103,80**	**97,07**	**76.680.345.009,00**	**69.531.256.094,80**

Rincian belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut.

Tabel. 5.1.45 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
I.	**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG**	**148.922.528.978,99**	**145.343.143.103,80**	**97,60**	**75.743.145.009,00**	**69.599.998.094,8**
1.	**BELANJA MODALBANGUNAN GEDUNG KANTOR**	**114.200.887.728,99**	**111.621.941.200,10**	**97,74**	**50.303.183.339,00**	**61.318.757.861,10**
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	9.472.450.000,00	(9.472.450.000,00)
	DINAS KESEHATAN	14.601.000.000,00	14.341.544.544,00	98,22	4.905.002.550,00	9.436.541.994,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.012.492.243,00	62.048.430.865,80	98,47	21.111.568.800,00	40.936.862.065,80
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.946.890.000,00	3.937.849.397,00	99,77	2.635.290.000,00	1.302.559.397,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	450.000.000,00	449.700.000,00	99,93	184.800.000,00	264.900.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	199.780.000,00	99,89	252.745.000,00	(52.965.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	310.360.000,00	310.100.000,00	99,92	0,00	310.100.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	1.122.128.233,00	1.121.665.000,00	99,96	794.986.986,00	326.678.014,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.876.027.500,00	1.835.000.000,00	97,81	967.500.000,00	867.500.000,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.670.000.000,00	1.651.776.000,00	98,91	842.000.000,00	809.776.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	632.475.000,00	627.400.000,00	99,20	0,00	627.400.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	4.378.360.000,00	4.372.000.000,00	99,85	4.248.000.000,00	124.000.000,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.152.950.000,00	16.169.317.019,00	89,07	4.133.009.803,00	12.036.307.216,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	KECAMATAN DUSUN UTARA	81.135.000,00	80.674.578,00	99,43	199.380.200,00	(118.705.622,00)
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	148.500.000,00	146.000.000,00	98,32	506.500.000,00	(360.500.000,00)
	KECAMATAN JENAMAS	84.962.250,00	84.542.000,00	99,51	49.950.000,00	34.592.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	240.000.000,00	96,00	0,00	240.000.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	178.100.000,00	177.900.000,00	99,89	0,00	177.900.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.772.450.002,99	2.745.850.000,00	99,04	0,00	2.745.850.000,00
	KECAMATAN DUSUN SELATAN	333.057.500,00	331.950.000,00	99,67	0,00	331.950.000,00
2.	**BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN**	**788.000.000,00**	**786.950.000,00**	**99,87**	**698.643.670,00**	**88.306.330,00**
	DINAS KESEHATAN	788.000.000,00	786.950.000,00	99,87	0,00	786.950.000,00
	RSUD JARAGA SASAMEH	0,00	0,00	95,70	698.643.670,00	(698.643.670,00)
3.	**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH**	**50.000.000,00**	**49.870.000,0000**	**99,74**	**0,00**	**49.870.000,00**
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50.000.000,00	49.870.000,00	99,74	0,00	49.870.000,00
4.	**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN**	**18.922.441.250,00**	**18.673.732.700,00**	**98,69**	**668.700.000,00**	**18.005.032.700,00**
	DINAS PENDIDIKAN	18.922.441.250,00	18.673.732.700,00	98,69	668.700.000,00	18.005.032.700,00
5.	**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**35.000.000,00**
	KECAMATAN KARAU KUALA	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	35.000.000,00
6.	**BELANJA MODAL BANGUNAN TERBUKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.800.000,00**	**(163.800.000,00)**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	163.800.000,00	(163.800.000,00)
7.	**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA**	**14.756.200.000,00**	**14.756.200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**14.756.200.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.733.700.000,00	14.733.700.000,00	100,00	0,00	14.733.700.000,00
	KECAMATAN DUSUN HILIR	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00	22.500.000,00
8	**BELANJA MODAL TAMAN**	**170.000.000,00**	**169.911.000,00**	**99,95**	**23.908.818.000,00**	**23.738.907.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	23.647.078.000,00	(23.647.078.000,00)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	99,81	111.790.000,00	(111.790.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	170.000.000,00	169.911.000,00	99,95	149.950.000,00	19.961.000,00
II.	**BELANJA MODAL TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	**870.000.000,00**	**868.458.000,00**	**99,82**	**937.200.000,00**	**(68.742.000,00)**
9	BELANJA MODAL PAGAR	870.000.000,00	868.458.000,00	99,82	937.200.000,00	(68.742.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00	(390.000.000,00)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	179.700.000,00	(179.700.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	367.500.000,00	(367.500.000,00)
	DINAS PENDIDIKAN	600.000.000,00	599.220.000,00	99,87	0,00	599.220.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	110.000.000,00	109.890.000,00	99,90	0,00	109.890.000,00
	DINAS KESEHATAN	160.000.000,00	159.348.000,00	99,59	0,00	159.348.000,00
III	**BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD**	**830.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD**	**830.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DINAS KESEHATAN	830.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**150.622.528.978,99**	**146.211.601.103,80**	**95,72**	**76.680.345.009,00**	**69.531.256.094,80**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**309.157.085.006,10**	**151.160.376.628,50**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp309.157.085.006,10 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp338.230.166.153,79. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp151.160.376.628,50 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp157.996.708.377,60 atau 104,52%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.46 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	260.812.085.658,00	235.885.331.474,00	90,44	119.840.500.570,00	116.044.830.904,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	49.263.528.995,80	45.233.289.533,10	91,82	17.071.182.058,50	28.162.107.474,60
3	Belanja Modal Instalasi	16.626.287.500,00	16.510.200.000,00	99,30	14.248.694.000,00	2.261.506.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Belanja Modal Jaringan	11.528.263.999,99	11.528.263.999,00	100,00	0,00	11.528.263.999,00
Jumlah		**338.230.166.153,79**	**309.157.085.006,10**	**91,40**	**151.160.376.628,50**	**157.996.708.377,60**

Tabel 5.1.47 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
I	**BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN**	**260.812.085.658,00**	**235.885.331.474,00**	**90,44**	**119.840.500.570,0**	**116.044.830.904,00**
1.	**BELANJA MODAL JALAN KABUPATEN**	**179.553.778.250,00**	**164.741.587.107,00**	**91,75**	**115.509.749.688,00**	**49.231.837.419,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	157.049.578.250,00	142.253.967.790,00	90,58	108.411.414.742,00	33.842.553.048,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	22.504.200.000,00	22.487.619.317,00	99,93	6.798.425.000,00	15.689.194.317,00
	KECAMATAN JENAMAS	0,00	0,00	00,00	299.909.946,00	(299.909.946,00)
2.	**BELANJA MODAL JALAN KOTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.145.882,00**	**(764.145.882,00)**
	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	599.075.000,00	(599.075.000,00)
	KECAMATAN KARAU KUALA	0,00	0,00	0,00	165.070.882,00	(165.070.882,00)
3.	**BELANJA MODAL JALAN KHUSUS**	**3.432.116.718,00**	**3.216.929.000,00**	**93,73**	**513.455.000,00**	**2.703.474.000,00**
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	513.455.000,00	(513.455.000,00)
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.000.000.000,00	2.792.050.000,00	93,07	0,00	2.792.050.000,00
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	432.116.718,00	424.879.000,00	98,33	0,00	424.879.000,00
4.	**BELANJA MODAL JALAN LAINNYA**	**32.241.701.601,00**	**32.070.496.605,00**	**99,47**	**0,00**	**32.070.496.605,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.822.517.501,00	26.706.196.605,00	99,57	0,00	26.706.196.605,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.270.000.000,00	3.238.950.000,00	99,05	0,00	3.238.950.000,00
	DINAS PENDIDIKAN	1.540.000.000,00	1.522.850.000,00	98,89	0,00	1.522.850.000,00
	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	409.184.100,00	402.500.000,00	98,37	0,00	402.500.000,00
	KECAMATAN JENAMAS	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	200.000.000,00
5.	**BELANJA MODAL JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN**	**42.419.489.089,00**	**32.693.718.762,00**	**77,07**	**0,00**	32.693.718.762,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	42.419.489.089,00	32.693.718.762,00	77,07	0,00	32.693.718.762,00
6.	**BELANJA MODAL JEMBATAN PADA JALAN DESA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360.750.000,00**	**(2.360.750.000,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	1.366.650.000,00	(1.366.650.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	994.100.000,00	(994.100.000,00)
7	**BELANJA MODAL JEMBATAN LAINNYA**	**3.165.000.000,00**	**3.162.600.000,00**	**99,92**	**692.400.000,00**	**2.470.200.000,00**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.165.000.000,00	3.162.600.000,00	99,92	692.400.000,00	2.470.200.000,00
II	**BELANJA MODAL BANGUNAN AIR**	**49.263.528.995,80**	**45.233.289.533,10**	**91,82**	**17.071.182.058,50**	**28.162.107.474,60**
8	**BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI**	**12.636.597.104,00**	**12.362.095.154,30**	**97,83**	**286.912.749,50**	**12.075.182.404,80**
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	433.787.104,00	413.735.000,00	95,38	286.912.749,50	126.822.250,50
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.202.810.000,00	11.948.360.154,30	97,91	0,00	11.948.360.154,30
9	**BELANJA MODAL BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**	**30.358.931.891,80**	**26.655.054.878,80**	**87,80**	**0,00**	**26.655.054.878,80**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.266.392.000,00	26.562.604.878,80	87,76	0,00	26.562.604.878,80
	DINAS PERHUBUNGAN	92.539.891,80	92.450.000,00	99,90	0,00	92.450.000,00
10	**BELANJA MODAL BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH**	**0,00**	**13.705.504.000,00**	**97,37**	**14.819.504.000,00**	**(14.819.504.000,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	13.705.504.000,00	(13.705.504.000,00)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	1.114.000.000,00	(1.114.000.000,00)
11	**BELANJA MODAL BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU**	**888.000.000,00**	**887.700.000,00**	**99,97**	**0,00**	**887.700.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	768.000.000,00	768.000.000,00	100,00	0,00	768.000.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	70.000.000,00	69.800.000,00	99,71	0,00	69.800.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00	49.900.000,00
12	**BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.165.309,00**	**(175.165.309,00)**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	175.165.309,00	(175.165.309,00)
13	**BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.789.600.000,00**	**(1.789.600.000,00)**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	1.789.600.000,00	(1.789.600.000,00)
14	**BELANJA MODAL BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA**	**5.380.000.000,00**	**5.328.439.500,00**	**99,04**	**0,00**	**5.328.439.500,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.180.000.000,00	5.128.539.500,00	99,01	0,00	5.128.539.500,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	0,00	199.900.000,00
III	**BELANJA MODAL INSTALASI**	**16.626.287.500,00**	**16.510.200.000,00**	**99,30**	**14.248.694.000,00**	**2.261.506.000,00**
15	**BELANJA MODAL INSTALASI AIR**	**14.686.037.500,00**	**14.598.700.000,00**	**99,41**	**14.096.019.000,00**	**502.681.000,00**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	BERSIH/AIR BAKU LAINNYA					
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.230.000.000,00	13.143.700.000,00	99,35	14.096.019.000,00	(952.319.000,00)
	DINAS KESEHATAN	1.456.037.500,00	1.455.000.000,00	99,93	0,00	1.455.000.000,00
16	**BELANJA MODAL INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA**	**940.250.000,00**	**913.000.000,00**	**97,10**	**0,00**	**913.000.000,00**
	DINAS KESEHATAN	940.250.000,00	913.000.000,00	97,10	0,00	913.000.000,00
17	**BELANJA MODAL INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.675.000,00**	**(152.675.000,00)**
	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	152.675.000,00	(152.675.000,00)
18	**BELANJA MODAL INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)**	**1.000.000.000,00**	**998.500.000,00**	**99,85**	**0,00**	**998.500.000,00**
	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000,00	998.500.000,00	99,85	0,00	998.500.000,00
IV	**BELANJA MODAL JARINGAN**	**11.528.263.999,99**	**11.528.263.999,00**	**100,00**	**0,00**	**11.528.263.999,00**
20	**BELANJA MODAL JARINGAN INDUK DISTRIBUSI**	**11.528.263.999,99**	**11.528.263.999,00**	**100,00**	**0,00**	**11.528.263.999,**
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8.064.000,00	8.064.000,00	100,00	0,00	8.064.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.520.199.999,99	11.520.199.999,00	100,00	0,00	11.520.199.999,00
	Jumlah	**338.230.166.153,79**	**309.157.085.006,10**	**91,40**	**151.160.376.628,50**	**157.996.708.377,60**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**44.337.204,00**	**197.580.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.337.204,00 atau 22,70% dari anggaran sebesar Rp195.340.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp197.580.000,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp153.242.796,00 atau 77,56%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.48 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	26.188.000,00	25.185.204,00	96,17	0,00	25.185.204,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	169.152.000,00	19.152.000,00	11,32	0,00	19.152.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	197.580.000,00	(197.580.000,00)
	Jumlah	**195.340.000,00**	**44.337.204,00**	**22,70**	**197.580.000,00**	**(153.242.796,00)**

Rincian belanja modal aset tetap lainnya per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.49 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	**BELANJA MODAL BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA/BELANJA MODAL BUKU UMUM**	**26.188.000,00**	**25.185.204,00**	**96,17**	**0,00**	**25.185.204,00**
	DINAS PENDIDIKAN	26.188.000,00	25.185.204,00	96,17	0,00	25.185.204,00
2	**BELANJA MODAL BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA**	**19.152.000,00**	**19.152.000,00**	**11,32**	**0,00**	**19.152.000,00**
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	19.152.000,00	19.152.000,00	11,32	0,00	19.152.000,00
3	**BELANJA MODAL MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN, DAN BENDA BERSEJARAH**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**BELANJA MODAL SOFTWARE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.580.000,00**	**(197.580.000,00)**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	197.580.000,00	(197.580.000,00)
Jumlah		**195.340.000,00**	**44.337.204,00**	**22,70**	**197.580.000,00**	**(153.242.796,00)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	**441.840.000,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp441.840.000,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penambahan sebesar Rp441.840.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.1.50 Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	**BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD-SOFTWARE**	**450.000.000,00**	**441.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**441.840.000,00**
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150.000.000,00	148.840.000,00	99,23	0,00	148.840.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	0,00	149.000.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	150.000.000,00	144.000.000,00	96,00	0,00	144.000.000,00
Jumlah		**450.000.000,00**	**441.840.000,00**	**98,19**	**0,00**	**441.840.000,00**

5.1.2.1	Belanja Tak Terduga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		423.718.824,00	7.372.336.537,00

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial dan lain-lain. Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp423.718.824,00 atau 10,18% dari anggaran sebesar Rp4.160.352.466,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.372.336.537,00 maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.948.617.713,00 atau 94,25%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.51 Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH / BPBD KAB. BARSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POLRES BARSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BARSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARSEL	4.160.352.466,00	423.718.824,00	10,18	7.372.336.537,00	(6.948.617.713,00)
8	KECAMATAN JENAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINSOSPMD KAB. BARSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSPEKTORAT KAB. BARSEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**4.160.352.466,00**	**423.718.824,00**	**10,18**	**7.372.336.537,00**	**(6.948.617.713,00)**

5.1.2.2	Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		212.568.131.276,00	158.203.847.450,00

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.568.131.276,00 dan Rp158.203.847.450,00 Atau 95,00%. Realisasi transfer mengalami peningkatan sebesar Rp54.364.283.826,00 atau 34,36% dari realisasi TA 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.52 Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.793.401.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	218.956.986.500,00	212.568.131.276,00	96,16	158.203.847.450,00	54.364.283.826,00
Jumlah		**223.750.388.027,00**	**212.568.131.276,00**	**96,16**	**158.203.847.450,00**	**54.364.283.826,00**

5.1.2.2.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	0,00	**0,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp4.793.401.527,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2024 tidak ada kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.53 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.793.401.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**4.793.401.527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.2.2.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	0,00	**0,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.54 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Kecamatan Jenamas	4.793.401.527,00	0,00	0,00	0,00
2	Kecamatan Dusun Hilir		0,00	0,00	0,00
3	Kecamatan Karau Kuala		0,00	0,00	0,00
4	Kecamatan Dusun Utara		0,00	0,00	0,00
5	Kecamatan G. Bintang Awai		0,00	0,00	0,00
6	Kecamatan Dusun Selatan		0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.793.401.527,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	0,00	**0,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

5.1.2.2.2 Transfer Bantuan Keuangan	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	212.568.131.276,00	**158.203.847.450,00**

Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari transfer bantuan keuangan kepada provinsi, desa, dan lainnya. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.568.131.276,00 dan Rp158.203.847.450,00. Realisasi kegiatan mengalami kenaikan sebesar Rp54.324.283.826,00 atau 34,34% dari realisasi Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.55 Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	86.023.515.100,00	(86.023.515.100,00)
2	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/ KOTA KEPADA DESA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00
3	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA	218.916.986.500,00	212.528.131.276,00	97,08	72.180.332.350,00	140.347.798.926,00
Jumlah		**218.956.986.500,00**	**212.568.131.276,00**	**97,08**	**158.203.847.450,00**	**54.364.283.826,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2.2.1 Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**86.023.515.100,00**

Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp86.023.515.100,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	**212.568.131.276,00**	**72.180.332.350,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.568.131.276,00 dan Rp72.180.332.350,00. Realisasi kegiatan mengalami kenaikan sebesar Rp140.387.798.926,00 atau 194,50%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.56 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Desa	218.916.986.500,00	212.528.131.276,00	97,08	72.180.332.350,00	140.347.798.926,00
3	Bantuan Keuangan Khusus ke Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00
Jumlah		**218.916.986.500,00**	**212.568.131.276,00**	**97,08**	**72.180.332.350,00**	**140.387.798.926,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.3 PEMBIAYAAN NETTO	**97.969.438.914,19**	**101.003.485.862,40**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dengan tujuan untuk menutup antara selisih pendapatan dan belanja, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp97.969.438.914,19 dan Rp101.003.485.862,40 Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp12.550.000.000,00 atau 11,36% dari realisasi TA 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	**110.419.438.914,19**	**117.253.485.862,40**

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp110.419.438.914,19 dan Rp117.253.485.862,40

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	**110.419.438.914,19**	**117.276.121.862,40**

Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Lalu Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp110.419.438.914,19 dan Rp117.276.121.862,40.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.3.1.2 Koreksi SiLPA	**0,00**	**(22.636.000,00)**

Koreksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp22.636.000,00).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	**0,00**	**0,00**

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	**12.300.000.000,00**	**16.250.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan realisasi pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.300.000.000,00 dan Rp16.250.000.000,00

Tabel 5.1.57 Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	100,00	16.250.000.000,00	(3.950.000.000,00)

2	Pembayaran Pinjaman Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	150.000.000,00
Jumlah		**12.450.000.000,00**	**12.450.000.000,00**	**100,00**	**16.250.000.000,00**	**(3.800.000.000,00)**

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	12.300.000.000,00	**16.250.000.000,00**

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.300.000.000,00 dan Rp16.250.000,00 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	0,00	**0,00**

Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.1.3.2.3 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	150.000.000,00	**0,00**

Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 dan Rp0,00. Pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 adalah pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan TMMD (TNI) yang telah dilaksanakan tahun 2023 dari Dana Transfer Pemerintah Provinsi.

5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	164.192.653.173,77	**110.519.438.914,19**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp164.192.653.173,77 dan Rp110.519.438.914,19.

Tabel 5.1.58 Rincian Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Saldo Akhir Kas di BUD			
	PT. BPK Cab. Buntok (DAU)	88.144.694.001,55	75.296.968.994,25	12.847.725.007,3
	PT. BPK Cab. Buntok (DAK)	4.313.049.924,02	4.174.969.110,08	138.080.813,94
	PT. BPK Cab. Buntok (PAD)	63.783.944.159,26	26.475.548.799,94	37.308.395.359,32
	PT. Bank Mandiri Cab. Buntok	0,00	8.503,32	(8.503,32)
	PT. BRI (Giro)	612.437,54	0,00	612.437,54
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	60.060,00	95.225.750,00	(95.165.690,00)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	3.975.530.309,98	1.923.531.570,48	2.051.998.739,5
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	119.250.709,00	63.336.288,00	55.914.421,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.347.289.555,00	2.461.649.946,00	(114.360.391,00)
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	0,00	28.199.952,12	(28.199.952,12)
	Puskesmas Sababilah	5.292,20	3.495,20	1.797,00
	Puskesmas Kalahien	396,92	32.832,92	(32.436)
	Puskesmas Baru	347,00	318.198,00	(317.851,00)
	Puskesmas Buntok	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Pendang	4.467,00	793,00	3.674,00
	Puskesmas Bantai Bambure	201,00	247,00	46,00
	Puskesmas Tabak Kanilan	7.827,00	4.663,00	3.164,00
	Puskesmas Patas	237,00	121,00	116,00
	Puskesmas Bangkuang	1.061,00	24.704.233,00	(24.703.172,00)
	Puskesmas Babai	833.262,00	3.037.923,00	(2.204.661,00)
	Puskesmas Mangkatip	37.680.313,00	343,00	37.679.970
	Puskesmas Jenamas	2.956.817,00	97.103,00	2.859.714
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
8	Kelebihan Penerbitan SP2D oleh Bank	322.590.000,00	0,00	322.590.000,00
9	Koreksi Belanja yang menyebabkan kenaikan Kas terkait Realisasi SP2D melebihi Kontrak	1.106.141.796,30	0,00	1.106.141.796,30
Jumlah		**164.192.653.173,77**	**110.519.438.914,19**	**53.673.214.259,58**

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (awal)	**110.519.438.914,19**	**117.276.121.862,40**

Saldo Anggaran Lebih (awal) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (awal) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp110.519.438.914,19 dan Rp117.276.121.862,40

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	110.519.438.914,19	117.276.121.862,40

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp110.519.438.914,19 dan Rp117.276.121.862,40.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	164.192.653.173,77	110.519.438.914,19

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp164.192.653.173,77 dan Rp110.519.438.914,19

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	(22.636.000,00)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 0,00 dan (Rp22.636.000,00)

5.2.5 Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Lain-lain merupakan koreksi atas penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih (Akhir)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	164.192.653.173,77	110.519.438.914,19

Saldo Anggaran Lebih (akhir) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (akhir) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp164.192.653.173,77 dan Rp110.519.438.914,19

5.3 PENJELASAN NERACA

5.3.1 ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	2.786.279.353.873,09	2.611.937.555.973,26

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.786.279.353.873,09 dan Rp2.611.937.555.973,26. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Rincian Aset

No	Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	218.730.291.525,31	125.877.901.646,64	92.852.389.878,67	73,76
2	Investasi Jangka Panjang	151.635.529.952,00	142.375.779.739,00	9.259.750.213,00	6,50
3	Aset Tetap	2.252.105.027.105,22	1.890.755.546.390,31	361.349.480.714,91	19,11
4	Aset Lainnya	163.808.505.290,56	452.928.328.197,31	(289.119.822.906,75)	(63,83)
Jumlah		**2.786.279.353.873,09**	**2.611.937.555.973,26**	**174.341.797.899,83**	**6,67**

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp174.341.797.899,83 atau 6,67%.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1 Aset Lancar	**218.730.291.525,31**	**125.877.901.646,64**

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Kas, Piutang Pendapatan, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp218.730.291.525,31 dan Rp125.877.901.646,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2 Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas, Kas Lainnya dan Setara Kas	163.870.063.173,77	110.519.438.914,19	53.350.624.259,58	48,27
2	Piutang Pajak Daerah	14.228.464.288,00	13.334.180.215,00	894.284.073,00	6,71
3	Piutang Retribusi Daerah	995.752.350,00	617.221.615,00	378.530.735,00	61,33
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.531.954.479,00	2.553.844.951,00	1.978.109.528,00	77,46
6	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	18.240.651,00	16.136.351,00	2.104.300,00	13,04
8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	101.700.800,00	106.700.800,00	(5.000.000)	(4,69)
9	Piutang Lainnya	171.972.100,00	122.837.151,00	49.134.949,00	40,00
10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	1.274.690.297,14	0,00	1.274.690.297,14	0,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	Penyisihan Piutang	(12.851.667.108,49)	(11.110.974.122,24)	(1.740.692.986,25)	15,67
12	Persediaan	46.384.545.494,89	9.836.777.922,69	36.547.767.572,20	371,54
Jumlah		**218.730.291.525,31**	**125.877.901.646,64**	**92.852.389.878,67**	**73,76**

Saldo Aset lancar tahun 2024 sebesar Rp218.730.291.525,31 mengalami kenaikan sebesar Rp92.852.389.878,67 atau 73,76% dari tahun 2023 sebesar Rp125.877.901.646,64 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	**157.348.442.318,67**	**105.947.495.407,59**

Kas di Kas Daerah merupakan Kas dan Setara Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Jumlah Kas di Kas Daerah seharusnya berjumlah Rp157.671.032.318,67 terjadi dikarenakan kelebihan penerbitan empat SP2D LS oleh bank sebesar Rp322.590.000,00, sehingga pada per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp157.348.442.318,67 dan Rp105.947.495.407,59 Rincian posisi Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran dan nilai SP2D yang *double* dibayarkan disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.3 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	No Rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PT BPK Cab. Buntok (DAU)	2000101000005	88.144.694.001,55	75.296.968.994,25	12.847.725.007,30	17,06
2	PT BPK Cab. Buntok (DAK)	2000101000024	4.313.049.924,02	4.174.969.110,08	138.080.813,94	3,31
3	PT BPK Cab. Buntok (PAD)	2000101000001	63.783.944.159,26	26.475.548.799,94	37.308.395.359,32	140,92
4	PT. Bank Mandiri Cabang Buntok (Giro)	1590099334442	0,00	8.503,32	(8.503,32)	(96,11)
5	BRI (Giro)	030301000844309	612.437,54	0,00	612.437,54	0,00
		Jumlah	**156.242.300.522,37**	**105.947.495.407,59**	**50.294.805.114,78**	**47,47**

Perbedaan antara posisi saldo kas di rekening koran sebesar Rp156.242.300.522,37 dan Saldo Kas di Kas Daerah yang bersaldo Rp157.348.442.318,67 dikarenakan koreksi belanja yang mempengaruhi kas di kas daerah sebesar Rp1.106.141.796,30.

Tabel 5.3.4 Rincian *Double* Bayar

NO	SKPD	NO BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	62.04/11.0/000019/ JUR-BLJ/SP2D-LS/2.08.2.14.0.00.01.0000/02/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Ub. Mei 2024	72.800.000,00	72.800.000,00	0,00

NO	SKPD	NO BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA
	PERLINDUNGAN ANAK					
2	SEKRETARIAT DAERAH	62.04/11.0/000167/ JUR-BLJ/SP2D-LS/4.01.0.00.0.00.0 1.0000/01/2025	Pembayaran LS Hibah Kepada Panitia Pembangunan Balai Adat Imanapa Desa Ugang Sayu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/11.0/000326/ JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.0 1.0000/01/2025	Pembayaran Pekerjaan 95+5% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kalulud Rt. 03 Desa Baru An. CV. TATA ANDRAU Pusat Jaar Bartim	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.04/11.0/000453/ JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.0 1.0000/01/2025	Pembayaran Pekerjaan 95+5% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kenanga Jl. Pelita Raya. An. CV. NIONJAR NIDANGOL Pusat ampah	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00
Jumlah				**322.590.000,00**	**322.590.000,00**	**0,00**

Selisih tersebut disebabkan oleh pendebitan berulang pada RKUD oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Atas nilai tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp322.590.000,00.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan BPK TA 2024, terdapat realisasi SP2D melebihi nilai kontrak atas beberapa paket pekerjaan fisik pada Dinas PUPR sebesar Rp1.106.141.796,30. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menagih dan menerima setoran pengembalian senilai Rp1.106.141.796,30, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.5 Rincian SP2D Melebihi Nilai Kontrak

No	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SP2D	Selisih Kelebihan Pembayaran	Nilai yang sudah di setor	Sisa yang belum disetor
1	Rehabilitasi Jembatan Nuni Kaladan Juking) RT. 05. RW. 02 Desa Teluk Betung	62.04/04.0/001722/LS/1.03.0.00.0.00.0 1.0000/PPR2/12/2024	99.900.000,00	88.425.000,00	0,00
		62.04/04.0/001861/LS/1.03.0.00.0.00.0 1.0000/PPR2/12/2024		11.475.000,00	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Teluk Timbau	62.04/04.0/000432/LS/1.03.0.00.0.00.0 1.0000/P2/8/2024	235.500.000,00	235.500.000,00	0,00
		62.04/04.0/001626/LS/1.03.0.00.0.00.0 1.0000/PPR2/12/2024			
3					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SP2D	Selisih Kelebihan Pembayaran	Nilai yang sudah di setor	Sisa yang belum disetor
	Rehab Aula Kantor Kejaksaan Barito Selatan	62.04/04.0/001781/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4	Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Bupati Tahap II	62.04/04.0/000033/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	602.461.796,00	430.329.854,00	0,00
		62.04/04.0/000151/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024			
		62.04/04.0/000568/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2024		172.131.942,00	
		62.04/04.0/000714/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024			
		62.04/04.0/001025/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024			
5	Pembangunan Gedung Kantor BPBD	62.04/04.0/000278/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	0,30	0,30	0,00
		62.04/04.0/001843/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024			
6	Rehabilitasi Kantor Dinsos PMD	62.04/04.0/000718/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
		62.04/04.0/001638/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024			
		62.04/04.0/001069/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024			
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Purnama A3 Jl. Kaladan	62.04/04.0/000444/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024	100.000,00	100.000,00	0,00
		62.04/04.0/000622/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/9/2024			
		62.04/04.0/001271/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024			
8	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Itah I Jl. Kaladan	62.04/04.0/000956/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	9.990.000,00	899.000,00	0,00
		62.04/04.0/001301/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024		9.091.000,00	
		62.04/04.0/001595/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024			
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Santosa Jl. Pelita IV	62.04/04.0/001683/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	100.000,00	100.000,00	0,00
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju	62.04/04.0/001311/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	100.000,00	100.000,00	0,00

No	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SP2D	Selisih Kelebihan Pembayaran	Nilai yang sudah di setor	Sisa yang belum disetor
	Kuburan Muslimin RT. 07 Desa Baru				
11	Peningkatan Jalan Lingkungan GG. Kelulud RT. 03 Desa Baru	62.04/04.0/001245/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	9.990.000,00	9.000.000,00	0,00
		62.04/04.0/001664/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024		990.000,00	
		Jumlah Kelebihan Pembayaran	**1.106.141.796,30**	**1.106.141.796,30**	**0,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo uang tunai/uang di bank yang dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan. Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	**60.060,00**	**95.225.750,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang tunai/uang di bank yang dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pengembalian sisa Uang Persediaan/Ganti Uang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp60.060,00 dan 95.225.750,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.6 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	60,00	0,00
2	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60.000,00	0,00
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	225.750,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	95.000.000,00
	Jumlah	**60.060,00**	**95.225.750,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.4 Kas di BLUD	**3.975.530.309,98**	**1.923.531.570,48**

Kas di BLUD merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Jaraga Sasameh dan BLUD Puskesmas Buntok. Jumlah Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.975.530.309,98 dan Rp1.923.531.570,48. Saldo Kas di BLUD terdiri dari BLUD RSUD Jaraga Sasameh sebesar Rp3.876.992.162,98 dan BLUD Puskesmas Buntok sebesar Rp98.538.147,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.7 Rincian Kas di Kas BLUD

No.	Nama BLUD	Kas di Bendahara BLUD per 31 Des 2023	Pendapatan	Belanja	Sisa Kas di Bendahara BLUD 31 Des 2024
1	RSUD Jaraga Sasameh Buntok	1.880.387.172,48	33.166.258.011,00	31.169.653.020,50	3.876.992.162,98
2	BLUD Buntok	43.144.398,00	2.300.444.491,00	2.245.050.742,00	98.538.147,00
Jumlah		**1.923.531.570,48**	**35.466.702.502,00**	**33.414.703.762,50**	**3.975.530.309,98**

Adapun Laporan Keuangan RSUD Jaraga Sasameh Buntuk terlampir pada **lampiran VI.**

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.388.779.776,12	**2.489.849.898,12**

Jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.388.779.776,12 dan Rp277.179.522,00. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun 2024 merupakan saldo Dana Kapitasi JKN sebesar Rp41.490.221,12 dan Dana BOK Puskesmas Rp2.347.289.555,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Uraian Kas yang Ada di Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN

No.	Nama Puskesmas	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Des 2023	Pendapatan JKN dan Bunga Bank	Pengembalian Kas Tunai 2023 (belum diakui neraca saldo awal)	Belanja	Pengembalian Jasa/Bunga Tabungan Ke Kas Daerah	Sisa Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Des 2024
1	Kas Dana BOK Puskesmas	2.461.649.946,00					2.347.289.555,00
2	Babai	3.037.923,00	377.412.620,00	0,00	379.617.281,00	0,00	833.262,00
3	Bangkuang	24.704.233,00	459.185.971,00	0,00	483.889.143,00	0,00	1.061,00
4	Bantai Bambure	247,00	186.327.867,00	0,00	186.327.913,00	0,00	201,00
5	Baru	318.198,00	355.131.222,00	0,00	355.449.073,00	0,00	347,00
6	Jenamas	97.103,00	348.902.598,00	0,00	346.042.884,00	0,00	2.956.817,00
7	Kalahien	32.832,92	564.579.321,00	0,00	564.611.757,00	0,00	396,92
8	Mengkatip	343,00	559.144.688,00	0,00	521.464.718,00	0,00	37.680.313,00
9	Patas	121,00	635.636.827,00	0,00	635.636.711,00	0,00	237,00
10	Pendang	793,00	439.755.846,00	0,00	439.752.172,00	0,00	4.467,00
11	Sababilah	3.495,20	304.371.842,00	0,00	304.370.045,00	0,00	5.292,20
12	Tabak Kanilan	4.663,00	351.795.249,00	0,00	351.792.085,00	0,00	7.827,00
Jumlah		**2.489.849.898,12**	**4.582.244.051,00**	**0,00**	**4.568.953.782,00**	**0,00**	**2.388.779.776,12**

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
119.250.709,00	**63.336.288,00**

Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp119.250.709,00 dan Rp63.336.288,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.9 Uraian Kas Dana BOS Tahun 2024

BOS SD / SMP Reguler Negeri , BOS Afirmasi dan Kinerja	Kas di Bendahara BOS per 31 Des 2023	Pendapatan	Belanja	Kas di Bendahara BOS per 31 Des 2024
BOP PAUD REGULER	0,00	1.563.430.000,00	1.563.430.000,00	0,00
BOP PAUD KESETARAAN	0,00	742.710.000,00	706.261.800,00	36.448.200,00
BOP PAUD KINERJA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
BOS SD REGULER NEGERI	30.639.927,09	11.678.010.880,00	11.676.943.340,00	31.707.467,09
BOS SD KINERJA	0,00	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00
BOS SMP REGULER NEGERI	21.141.713,91	6.529.083.914,00	6.520.976.733,00	29.248.894,91
BOS SMP AFIRMASI	5.455.266,00	0,00	0,00	5.455.266,00
BOS SMP KINERJA	6.099.381,00	655.000.000,00	644.708.500,00	16.390.881,00
Jumlah	**63.336.288,00**	**21.763.234.794,00**	**21.707.320.373,00**	**119.250.709,00**

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
38.000.000,00	0,00

Kas lainnya adalah kas yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Kas Lainnya sebesar Rp38.000.000,00 yang berasal dari sisa saldo pendapatan hibah CSR PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) kepada Kecamatan Jenamas Tahun 2024, yang direncanakan untuk kegiatan Perbaikan/Perawatan Lampu Jalan Solar Panel sebesar Rp8.000.000,00, Pengadaan Tong Sampah sebesar Rp15.000.000,00, dan Pembuatan Bak Sampah sebesar Rp15.000.000,00. Sedangkan saldo Kas Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
21.211.272.864,30	16.632.658.932,00

Piutang Pendapatan terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain- Lain PAD yang Sah, dan Piutang Lainnya. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.211.272.864,30 dan Rp16.632.658.932,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Piutang Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Piutang Pajak Daerah	14.228.464.288,00	13.334.180.215,00	894.284.073,00	6,71
2.	Piutang Retribusi Daerah	995.752.350,00	617.221.615,00	378.530.735,00	61,33
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.531.954.479,00	2.553.844.951,00	1.978.109.528,00	77,46
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	18.240.651,00	16.136.351,00	2.104.300,00	13,04

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
7.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	101.700.800,00	106.700.800,00	(5.000.000)	(4,69)
8.	Piutang Lainnya	171.972.100,00	122.837.151,00	49.134.949,00	40,00
9.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	1.274.690.297,14	0,00	1.274.690.297,14	0,00
Jumlah		**21.211.272.864,30**	**16.632.658.932,00**	**25.789.886.796,60**	**27,53**

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
14.228.464.288,00	**13.334.180.215,00**

Piutang pajak daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, ada perbedaan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Piutang pajak pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Galian C, dan Piutang PBB-P2, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.11 Piutang Pajak Daerah per Objek Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	203.233.940,00	203.103.940,00	130.000,00	0,06
2	Piutang Pajak Restoran	101.599.608,00	101.599.608,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Galian C	470.900.000,00	470.900.000,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak PBB-P2	13.452.730.740,00	12.558.576.667,00	894.154.073,00	7,12
Jumlah		**14.228.464.288,00**	**13.334.180.215,00**	**894.284.073,00**	**6,71**

5.3.1.1.8.1.1 Piutang Pajak Hotel

31 Desember 2024	31 Desember 2023
203.233.940,00	**203.103.940,00**

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing- masing sebesar Rp203.233.940,00 dan Rp203.103.940,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12 Rincian Mutasi Piutang Pajak Hotel

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)
1	PAJAK HOTEL TANPA RINCIAN 2018	202.983.940,00	0,00	0,00	202.983.940,00
2	PIUTANG PAJAK HOTEL 2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3	HOTEL TIA 2024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Jumlah		**203.103.940,00**	**250.000,00**	**120.000,00**	**203.233.940,00**

5.3.1.1.8.1.2 Piutang Pajak Restoran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
101.599.608,00	**101.599.608,00**

Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp101.599.608,00 dan Rp101.599.608,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13 Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)
1	Restoran CV.EXAN PUTRA PERDANA	93.145.210,00	0,00	0,00	93.145.210,00
2	Restoran CV.EXAN PUTRA PERDANA	8.354.398,00	0,00	0,00	8.354.398,00
3	RUMAH MAKAN WARUNG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Jumlah		**101.599.608,00**	**0,00**	**0,00**	**101.599.608,00**

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.1.3 Galian C	**Piutang Pajak**	**470.900.000,00**	**470.900.000,00**

Piutang Pajak Galian C per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp470.900.000,00 dan Rp470.900.000,00, yaitu merupakan piutang Galian C pada CV ALM di Kecamatan Karau Kuala, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Mutasi Piutang Pajak Galian C

No	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Galian C	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
Jumlah		**470.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**470.900.000,00**

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.1.4 Pajak PBB-P2	**Piutang**	**13.452.730.740,00**	**12.558.576.667,00**

Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing- masing sebesar Rp13.452.730.740,00 dan Rp12.558.576.667,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Piutang Pajak PBB-P2

No	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)
1	2010	793.719.396,00	0,00	4.196.833,00	789.522.563,00
2	2011	794.305.711,00	0,00	3.225.773,00	791.079.938,00
3	2012	825.482.532,00	0,00	3.566.866,00	821.915.666,00
4	2013	1.253.717.751,00	0,00	5.768.874,00	1.247.948.877,00
5	2014	1.010.606.331,00	0,00	4.241.313,00	1.006.365.018,00
6	2015	995.352.336,00	0,00	4.301.132,00	991.051.204,00
7	2016	916.752.440,00	0,00	3.903.285,00	912.849.155,00
8	2017	945.343.999,00	0,00	3.144.640,00	942.199.359,00
9	2018	804.529.030,00	0,00	8.221.348,00	796.307.682,00
10	2019	880.930.738,00	0,00	8.915.480,00	872.015.258,00
11	2020	990.706.910,00	0,00	13.992.269,00	976.714.641,00
12	2021	502.572.387,00	0,00	19.746.841,00	482.825.546,00

No	Uraian	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2024 (Rp)
13	2022	854.615.311,00	0,00	33.001.939,00	821.613.372,00
14	2023	989.941.795,00	0,00	75.066.842,00	914.874.953,00
15	2024	0,00	1.085.447.508,00	0,00	1.085.447.508,00
Jumlah		**12.558.576.667,00**	**1.085.447.508,00**	**191.293.435,00**	**13.452.730.740,00**

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
995.752.350,00	**617.221.615,00**

Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, Piutang Retribusi Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp995.752.350,00 dan Rp617.221.615,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.16 Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kios	868.362.350,00	545.861.615,00	322.500.735,00	59,08
2	Piutang Retribusi Sewa Tanah, GOR, Kantin dll	69.350.000,00	58.290.000,00	11.060.000,00	18,97
3	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	58.040.000,00	13.070.000,00	44.970.000,00	344,07
Jumlah		**995.752.350,00**	**617.221.615,00**	**378.530.735,00**	**61,33**

Tabel 5.3.17 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kios

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	ROKU	6.015.000,00	16.162.240,00
2	BLOK ATAS	128.294.000,00	89.172.000,00
3	BLOK BAWAH	45.396.000,00	21.978.000,00
4	LOS BLOK BAWAH	30.552.000,00	24.874.000,00
5	TOILET	15.600.000,00	13.230.000,00
6	PEDAGANG SAYUR	24.012.000,00	25.143.000,00
7	PEDAGANG IKAN	80.040.000,00	76.647.000,00
8	PEDAGANG PISANG	11.484.055,00	13.659.055,00
9	PEDAGANG BUAH	17.496.000,00	0,00
10	PEND. PASAR PLASA	6.395.520,00	5.385.920,00
11	PEND. KUE	810.000,00	1.848.000,00
12	PEND. TELUR	4.950.000,00	4.680.000,00
13	Sisa Tunggakan TA 2021	0.00	74.047.280,00
13	Sisa Tunggakan TA 2022	0.00	179.035.120,00
14	Sisa Tunggakan dari tahun 2021 s/d TA 2023	497.317.775,00	0,00
Jumlah		**868.362.350,00**	**545.861.615,00**

Tabel 5.3.18 Rincian Piutang Retribusi Sewa Tanah. GOR. Kantin dll

No	Nama	Alamat Sewa Tanah Pemda	PiutangTahun 2023	Pengurangan 2024	Penambahan 2024	Piutang Tahun 2024	Keterangan
1	WIWIK KUSTI NINGSIH	Duk Capil (Photo Copy)	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
2	RUSMIATA	Jl. Kantin BPKAD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
3	SAUDAH	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Lunas Jan 2025
4	SARIWANTO	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Lunas Jan 2025
5	KARDI	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Lunas Jan 2025
6	M. RIZA FAKHLEVI	Jl. Merdeka Raya (Taman)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	DASIMAH	Jl. Merdeka Raya (Taman)	2.100.000,00	900.000,00	3.300.000,00	4.500.000,00	
8	LISA ARIANI	Jl. Merdeka Raya (Taman)	2.880.000,00	1.680.000,00	0,00	1.200.000,00	
9	BASRUNI	Jl. Merdeka Raya (Taman)	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00	3.400.000,00	Lunas Jan 2025
10	MASRITA	Jl. Merdeka Raya (Taman)	1.800.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
11	NOOR HASANAH	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	BIDIN	Jl. Kartini	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TASRIM	Jl. Merdeka Raya (Taman)	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
14	RUDIAR/ELLIYANOR	Jl. Kartini	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025
15	JUAYAH	Merdeka Raya (Taman)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Lunas Jan 2025
16	H. PAUJI DIMAN	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	BAMBANG HERMANTO	Jl. Merdeka Raya (Taman)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
18	RIZKI NILA HERMAWATI	Jl. Merdeka Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	ARIE RESEPATI DWI PRASETYO	Desa Sababilah	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Juli s/d Des 2020
20	H. MUSLIM	Jl. Kartini/Gdg Garam	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Tunggakan Thn 2014
21	SYARIFUDIN H BADARI	Jl. P. Raya Buntok	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Meninggal
22	MASRITA	Jl. Tugu Buntok	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
23	KARDI	Jl. Tugu (dpn Gereja)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
24	TITIN SUMARNI	Jl. Tugu (dpn Gereja)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
25	SARMIN	Jl. P. Raya Buntok	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Tunggakan Thn 2014
26	HUSNIAH	Jl. Merdeka Raya/ Gg Garam	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Tunggakan Thn 2014
27	SAMSUDINOOR	Jl. Pelita Raya	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	Tunggakan Thn 2014
28	SUTRISNO	Jl. Merdeka Raya	300.000,00	0,00	0,00	300.000.00	Tunggakan Thn 2014
29	NARDI	Jl. Merdeka Raya	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn n 2014
30	SYAHRIL	Jl. Kartini	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Tunggakan Thn 2014
31	SUNIN	Jl. Tugu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Tunggakan Thn 2014
32	SYAHID DARUSMAN/ BENGKEL	Jl. P. Raya Buntok	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	Tunggakan Thn 2014

No	Nama	Alamat Sewa Tanah Pemda	PiutangTahun 2023	Pengurangan 2024	Penambahan 2024	Piutang Tahun 2024	Keterangan
33	M. AWAB ABDULLAH	Jl. P. Raya Buntok	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	Tunggakan Tahun 2014
34	JOKO PURWONO	Jl. Pelita Raya	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Tunggakan Tahun 2014
35	RUDIAR	Jl. Kartini	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	Tunggakan Tahun 2014
36	ROBIX DWINANDIANTOK	Jl. Pelita Raya	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Tunggakan Tahun 2014
Jumlah			**58.760.000,00**	**6.240.000,00**	**16.830.000,00**	**69.350.000,00**	

Adapun Rincian Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas terlampir pada **Lampiran III**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.3 Piutang Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**4.575.000,00**	**4.575.000,00**

Piutang Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp4.575.000,00 dan Rp4.575.000,00. Nilai tersebut merupakan piutang atas likuidasi PT Palangka Nusantara sesuai dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Palangka Nusantara dengan Nomor Akta 45 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris An. Ellys Nathalina, SH., MH. Berdasarkan BA RUPS Luar Biasa tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menerima Rp4.575.000,00 atas likuidasi PT Palangka Nusantara.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**4.531.954.479,00**	**2.553.844.951,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.531.954.479,00dan Rp2.553.844.951,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahu 2024 terdiri dari Piutang Pengembalian sisa nilai kelebihan potongan pajak penghasilan PPh 21 periode Mei - Desember 2015 akibat adanya perubahan PTKP yang sudah ditetapkan oleh KP2KP Buntok melalui Surat Kepala Kantor KP2KP Buntok Nomor SP-528/WPJ.29/PPK.16/2015 tanggal 21 November 2016 sebesar Rp1.662.357.336,00 (telah dicatat di tahun 2023), Piutang dari *double* pengeluaran atas SP2D oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp322.590.000,00 (tahun 2024), serta Piutang BLUD sebesar Rp2.547.007.143,00 (tahun 2024), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang DUM Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.984.947.336,00	1.662.357.336,00	322.590.000,00	19,41
4	Piutang Pendapatan BLUD	2.547.007.143,00	891.487.615,00	1.655.519.528,00	185,70
Jumlah		**4.531.954.479,00**	**2.553.844.951,00**	**1.978.109.528,00**	**77,46**

Tabel 5.3.20 Rincian Piutang BLUD

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Kemenkes Covid 19 Ub. Desember 2022	0,00	161.309.000,00
2	Piutang Klaim PT. RCI	7.942.000,00	7.942.000,00
3	Piutang PT. Madhani	31.878.081,00	31.878.081,00
4	Piutang Klaim PT.BPN	1.152.975,00	1.152.975,00
5	Piutang Klaim PT Armindo	1.639.500,00	1.639.500,00
6	Piutang Klaim PT WASCO	4.266.070,00	4.266.070,00
7	Piutang Klaim PT RIUNG	35.644.698,00	35.644.698,00
8	Piutang Klaim BPJS susulan ub. Agt - Sep 2023 dan BHP Lab	0,00	592.490.557,00
9	Piutang Klaim PT. RIUNG	0,00	10.762.585,00
10	Piutang Klaim PT. Abadi Jaya.L	2.007.780,00	2.007.780,00
11	Piutang Klaim PT. HASNUR	3.008.170,00	3.008.170,00
12	Piutang Klaim BPJS TK	8.073.104,00	8.073.104,00
13	Piutang Klaim INHEALTH MANDIRI	479.845,00	479.845,00
14	Piutang MCU Partai Gerindra	5.833.250,00	30.833.250,00
15	Piutang Klaim BPJS RJTL RITL Ub. Nov 2024	2.323.567.100,00	0,00
16	Piutang Klaim PT. RIUNG	117.521.828,00	0,00
17	BPJS-TK	3.992.742,0	0,00
	Jumlah	**2.547.007.143,00**	**891.487.615,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.6 Piutang Transfer Antar Daerah	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	**18.240.651,00**	**16.136.351,00**

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang terdiri dari Piutang atas Penjualan Rumah Dinas dan Piutang Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dengan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.240.651,00 dan Rp16.136.351,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Bagian Lancar Penjualan Angsuran

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Penjualan Angsuran Rumah Dinas	7.927.200,00	5.510.400,00
2	Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	10.313.451,00	10.625.951,00
	Jumlah	**18.240.651,00**	**16.136.351,00**

Tabel 5.3.22 Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran Rumah Dinas

No	Uraian	Angsuran lancar per bulan yang akan jatuh tempo pada 2023 (jumlah bulan)	Pengurangan	Penambahan	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)
1	M. Nanang Salahudin	1.916.400,00	1.916.400,00	0,00	0,00
2	M. Rayhani	951.600,00	951.600,00	0,00	0,00
3	Rangin Turang	2.642.400,00		5.284.800,00	7.927.200,00
	Jumlah	**5.510.400,00**		**5.284.800,00**	**7.927.200,00**

5.3.1.1.8.8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
101.700.800,00	**106.700.800,00**

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp101.700.800,00 dan Rp106.700.800,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.23 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Pembayaran (Pengurang)	31 Desember 2024 (Rp)
1	a.n. Erik	145.300.000,00	0,00	145.300.000,00
2	a.n. Yusuf	0,00	0,00	0,00
3	a.n Pemberiani	0,00	0,00	0,00
4	a.n Ari Ampung	55.978.000,00	5.000.000,00	50.978.000,00
5	a.n Drs. Bage	19.456.000,00	0,00	19.456.000,00
6	a.n Hober B Bingan	10.266.800,00	0,00	10.266.800,00
7	a.n Isnaeni Suroso	0,00	0,00	0,00
8	a.n Yakut Ratih	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
9	CV Galumbang Pamelum Pusat Palangkarya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**106.700.800,00**	**5.000.800,00**	**101.700.800,00**

Berdasarkan data TGR di atas an. Erik dengan jumlah TGR sebesar Rp145.300.000,00 bahwa Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) masih dalam penelurusan.

5.3.1.1.8.9 Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(12.851.667.108,49)	**(11.110.974.122,24)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp12.851.667.108,49) dan (Rp11.110.974.122,24), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.24 Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	(11.138.516.325,84)	0,00	(11.138.516.325,84)	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(202.985.190,00)	0,00	(202.985.190,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Galian C	(470.900.000,00)	0,00	(470.900.000,00)	0,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah. GOR. Kantin dll	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kios	(682.840.062,50)	0,00	(682.840.062,50)	0,00
7	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	(4.575.000,00)	0,00	(4.575.000,00)	0,00
8	Penyisihan Piutang Catering / Rumah Makan Restoran	(97.372.409,00)	0,00	(97.372.409,00)	0,00
9	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD	(1.598.652,00)	(1.525.643,63)	(73.008,37)	4,79
11	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(42.647.718,15)	(26.422.295,23)	(16.225.422,92)	(61,41)
12	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(64.055.000,00)	0,00	(64.055.000,00)	0,00
13	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	(34.162.500,00)	0,00	(34.162.500,00)	0,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(744.338.415,00)	744.338.415,00	0,00
15	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	(10.338.687.768,38)	10.338.687.768,38	0,00
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(10.313.451,00)	0,00	(10.313.451,00)	0,00
17	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(101.700.800,00)	0,00	(101.700.800,00)	0,00
	Jumlah	**(12.851.667.108,49)**	**(11.110.974.122,24)**	**(1.740.692.986,25)**	**15,67**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.10 Piutang Lain- Lainnya	**171.972.100,00**	**0,00**

Saldo Piutang Lain- Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp171.972.100,00 dan Rp0,00.

Saldo Piutang Lain-lainnya terdiri dari Kelebihan Pembayaran iuran PBPU dan BP TA 2024 kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp156.000.600,00, kelebihan pembayaran gaji pensiun dan diberhentikan dengan hormat sebesar Rp8.771.500,00, serta kelebihan pembayaran gaji pensiun yang belum lunas berdasarkan data PT Taspen sebesar Rp7.200.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8.11 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	**1.274.690.297,14**	**0,00**

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.274.690.297,14 dan Rp0,00. Saldo piutang ini berdasarkan temuan BPK atas kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada Dinas PUPR yang telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga sebesar Rp1.274.690.297,14. Rincian piutang pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.25 Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas PUPR	471.413.532,30	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
2	Dinas Pendidikan	52.952.037,82	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
3	Dinas Kesehatan	212.282.887,78	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
4	BPKAD	189.221.824,91	Kurang Volume atas pekerjaan Gedung dan Bangunan
5	Dinas PUPR	348.820.014,33	Kurang Volume atas pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jumlah		**1.274.690.297,14**	

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.9 Persediaan	**46.384.545.494,89**	**9.836.777.922,69**

Persediaan merupakan barang yang habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan organisasi. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp46.384.545.494,89 dan Rp9.836.777.922,69. Saldo Persediaan Tahun 2024 terdiri dari Persediaan Barang Habis Pakai sebesar Rp9.203.378.458,31 dan Persediaan untuk Diserahkan kepada Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga sebesar Rp37.181.167.036,58.

Persediaan untuk Diserahkan kepada Instansi Vertikal atau Pihak Ketiga sebesar Rp37.181.167.036,58 merupakan hasil penelusuran BPK dalam pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan TA 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.26 Rincian Persediaan Untuk Diserahkan

No	SKPD	Aset Sebelumnya	Mutasi Masuk ke Persediaan	Keterangan
1	Kecamatan Dusun Utara	Tanah	5.348.200,00	Aset Tetap Tanah milik Kecamatan Dusun Utara yang digunakan dan diserahkan ke pihak ketiga
2	Sekretariat Daerah	Tanah	249.200.000,00	Aset Tetap Tanah milik Sekretariat Dearah yang digunakan dan diserahkan ke pihak ketiga
		Gedung dan Bangunan	6.766.158.250,00	Reklas Belanja Modal yang memenuhi kasifikasi Belanja Hibah
3	Dinas PUPR	KDP	4.885.909.078,25	Reklas Belanja Modal yang memenuhi kasifikasi Belanja Hibah

No	SKPD	Aset Sebelumnya	Mutasi Masuk ke Persediaan	Keterangan
		Gedung dan Bangunan	25.274.551.508,33	Reklas Belanja Modal yang memenuhi kasifikasi Belanja Hibah
		Jumlah	**37.181.167.036,58**	

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2024	31 Desember 2023
151.635.529.952,00	**142.375.779.739,00**

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal. Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp151.635.529.952,00 dan Rp142.375.779.739,00 Jika dibandingkan Tahun 2023, Investasi Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp9.259.750.213,00 atau 6,50%.

Tabel 5.3.27 Rincian Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir	39.275.750,00	39.275.750,00	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal	151.596.254.202,00	142.336.503.989,00	9.259.750.213,00	6,50
Jumlah		**151.635.529.952,00**	**142.375.779.739,00**	**9.259.750.213,00**	**6,50**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir

31 Desember 2024	31 Desember 2023
39.275.750,00	**39.275.750,00**

Dana Bergulir merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.275.750,00 dan Rp39.275.750,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No. 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. pada BAB IV Pasal 5:

1. Ayat c. berbunyi "Penyajian dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan dana Bergulir Diragukan Tertagih.
2. Ayat e.3. yang berbunyi bahwa dana Bergulir tidak dapat ditagih apabila belum melakukan peluasan melebihi 3 (tiga) tiga tahun setelah tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai Dana Bergulir UPPKS sampai dengan 31 Desember 2023 yang dikategorikan sebagai Dana Bergulir yang kemungkinan masih bisa ditagih pada tahun 2024 sebesar Rp39.275.750,00 seharusnya berubah menjadi Dana Bergulir Tidak Tertagih dan dikeluarkan dari Neraca sehingga nilainya menjadi Rp0.00. Berdasarkan Konsultasi dengan BPKP dan BPK RI pada tahun 2018, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan penghapusan dan harus dilakukan inventarisasi dan kunjungan ke lokasi untuk memastikan keberadaan kelompok.

Pada tahun 2019 telah dilakukan kunjungan ke kelompok UPPKS, dimana diperoleh keterangan sebagai berikut.

1. Keberadaan kelompok sudah ada yang bubar;
2. Keanggotaan kelompok sudah ada yang meninggal dunia;

3. Usaha kelompok sudah macet atau berhenti;
4. Anggota kelompok adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.

Terkait dengan hasil kunjungan tersebut. dapat disimpulkan bahwa Dana Bergulir tersebut tertunggak sebesar Rp39.275.750,00 sehingga sudah tidak dapat dikembalikan lagi oleh Kelompok UPPKS. Pada tahun 2024 tidak terdapat tindak lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2025 akan dilakukan koordinasi dan konsultasi ke pihak-pihak terkait untuk diusulkan penghapusannya dan dikeluarkan dari nilai Investasi Non Permanen yang ada di Neraca.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	151.596.254.202,00	**142.336.503.989,00**

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan (tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali), yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp151.596.254.202,00 dan Rp142.336.503.989,00

Tabel 5.3.28 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PT BPD Kalimantan Tengah	100.150.000.000,00	87.850.000.000,00	12.300.000.000,00	14,00
2	PDAM Kabupaten Barito Selatan	48.446.254.202,00	51.486.503.989,00	(3.040.249.788,00)	(5,90)
3	PD Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**151.596.254.202,00**	**142.336.503.989,00**	**9.259.750.213,00**	**6,51**

5.3.1.2.2.1 PT BPD Kalteng (*Cost Method*)	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	100.150.000.000,00	**87.850.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp100.150.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp87.850.000.000,00 dan pada tahun 2024 ada penambahan untuk penyertaan modal sebesar Rp12.300.000.000,00. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

Tabel 5.3.29 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Saldo Awal	71.750.000.000,00	71.750.000.000,00	8.500.000.000,00	16,68
2	Penambahan Penyertaan Modal	16.100.000.000,00	16.100.000.000.00	3.800.000.000.00	44,71
3	Pengurangan	0,00	0.00	0.00	0,00
Saldo Akhir		**100.150.000.000,00**	**87.850.000.000,00**	**12.300.000.000,00**	**17,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.2.2 PDAM Kabupaten Barito Selatan (*Equity Method*)	**48.446.254.202,00**	**51.486.503.989,00**

PDAM Kabupaten Barito Selatan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Barito Selatan.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada PDAM Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dengan pertimbangan persentase kepemilikannya adalah sebesar 100%. Adapun Laporan Keuangan PDAM terlampir pada **Lampiran V.**

Tabel 5.3.30 Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Saldo Awal	51.486.503.989,00	53.299.636.353,00	(1.813.132.364,00)	(3,40)
2.	Koreksi dari Inventarisasi Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Awal	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00
3	Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat	0,00	1.228.775.000,00	(1.228.775.000,00)	(100,00)
4	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(3.040.249.787,00)	(3.041.907.364,00)	1.657.577,00	(0,05)
Saldo Akhir		**48.446.254.202,00**	**51.486.503.989,00**	**(3.040.249.787,00)**	**(5,86)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.2.3 PT JAMKRIDA Kalimantan Tengah (*Cost Method*)	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (PT Jamkrida Kalteng) sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Jamkrida Kalteng sampai dengan per 31 Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.2.4 PD Danum Belum (*Equity Method*)	**0,00**	**0,00**

PD Danum Belum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Danum Belum. Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah disetor ke PD Danum Belum adalah sebesar Rp1.925.000.000,00.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada PD Danum Belum Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dengan pertimbangan persentase kepemilikannya adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2020 PD Danum Belum mengalami kerugian dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PD Danum Belum per 31 Desember 2024 adalah Nihil atau Nol karena ekuitasnya bersaldo negatif.

PD Danum Belum pada periode buku TA 2018 – 2023 tidak menerbitkan Laporan Keuangan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan PD Danum Belum terakhir yang diterbitkan pada periode tahun 2017.

Berdasarkan penelusuran LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Barito Selatan TA 2010 – 2017 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 nilai penyertaan modal beserta kerugian tahun 2017 pada PD Danum Belum sebagai berikut.

Tabel 5.3.31 Perhitungan Penyertaan Modal pada PD Danum Belum per 31 Desember 2017

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah	1.925.000.000,00
2	Akumulasi Kerugian (31 Des 2017)	(2.455.334.810,00)
3	Kerugian Tahun Berjalan	(382.168.557,00)
4	Saldo Penyertaan Modal 31 Des 2017	(912.503.367,00)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.2.5 PT Palangka Nusantara (*Cost Method*)	**0,00**	**0,00**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Palangka Nusantara sebesar Rp25.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 005/ 007/Ek tanggal 5 Januari 2004 hal Persyaratan RUPS PT Palangka Nusantara Nomor: 575/008/Ek tanggal 5 Januari 2004 hal persyaratan Calon Komisaris PT. Palangka Nusantara, dan Nomor 582/039/Ek tanggal 12 Januari 2004 hal Hasil RUPS PT. Palangka Nusantara, dimana untuk Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun 2022 tidak terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT Palangka Nusantara dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%. Tetapi berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Palangka Nusantara dengan Nomor Akta 45 tanggal 21 April 2014 atas Likuiditas PT Palangka Nusantara oleh Notaris Ellys Nathalina. SH. MH, maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada PT. Palangka Nusantara menjadi Rp0.00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3 ASET TETAP	**2.252.105.027.105,22**	**1.890.755.546.390,31**

Aset Tetap terdiri dari:

1) Tanah.

2) Peralatan dan Mesin.
3) Gedung dan Bangunan.
4) Jalan. Irigasi. dan Jaringan.
5) Aset Tetap Lainnya dan
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar 2.252.105.027.105,22 Kenaikan senilai Rp396.326.874.167,86 atau (20,96%) dibanding dari tahun 2023 senilai Rp1.890.755.546.390,31, dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.32 Rincian Aset Tetap Per Jenis Aset

Jenis Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Tanah	271.092.162.979,35	264.643.010.780,49	6.449.152.198,86	2,44
Peralatan dan Mesin	398.544.979.745,85	326.604.733.745,51	71.940.246.000,34	22,03
Gedung dan Bangunan	902.098.779.704,50	801.313.281.902,89	100.785.497.801,61	12,58
Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.895.391.751.701,35	1.610.806.313.332,52	284.585.438.368,83	17,67
Aset Tetap Lainnya	4.451.198.388,03	4.275.502.150,76	175.696.237,27	4,11
Konstruksi Dalam Pengerjaan	92.542.029.414,76	47.057.976.386,79	45.484.053.027,97	96,66
Akumulasi Penyusutan	(1.312.015.874.828,62)	(1.163.945.271.908,65)	(148.070.602.919,97)	12,72
Jumlah	**2.252.105.027.105,22**	**1.890.755.546.390,31**	**361.349.480.714,91**	19,11

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
271.092.162.979,35	**264.643.010.780,49**

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing–masing sebesar Rp271.505.911.179,35 dan Rp264.643.010.780,49 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.449.152.198,86 atau 2,44% dibandingkan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.33 Rincian Aset Tetap Tanah Per SKPD

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	TREND (%)
1	2	3	4	5
1	Sekretariat DPRD	5.176.893.100,00	5.176.893.100,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	10.066.089.793,95	10.474.489.793,95	(3,90)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	170.885.884.533,48	170.828.818.222,00	0,03
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.876.734.001,32	12.213.091.767,98	5,43
5	Dinas Perhubungan	1.379.397.000,00	1.242.797.000,00	10,99
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	218.200.000,00	218.200.000,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	1.398.000.400,00	1.398.000.400,00	0,00
8	BLUD RSUD Jaraga Sasameh	3.016.762.000,00	3.016.762.000,00	0,00

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	TREND (%)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00
10	Dinas Pendidikan	35.655.795.765,13	33.444.722.699,12	6,61
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.100.000,00	164.100.000,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	536.600.000,00	536.600.000,00	0,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.597.426,79	21.600.000,00	833,32
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.596.158,00	250.596.158,00	0,00
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.231.550.000,00	1.231.550.000,00	0,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.610.332.275,72	5.303.844.250,00	5,78
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	3.457.946.985,00	3.537.290.985,00	(2,24)
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.755.310.150,00	7.755.310.150,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	353.600.000,00	353.600.000,00	0,00
20	Inspektorat Daerah	183.400.000,00	183.400.000,00	0,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	261.400.000,00	261.400.000,00	0,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	552.841.645,79	523.635.294,00	5,58
23	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	5.961.519.064,87	3.331.400.000,00	78,95
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	130.600.000,00	130.600.000,00	0,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	982.452.760,44	982.452.760,44	0,00
26	Kecamatan Jenamas	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00
27	Kecamatan Dusun Hilir	550.860.000,00	550.860.000,00	0,00
28	Kecamatan Karau Kuala	343.085.000,00	67.565.000,00	407,79
29	Kecamatan Dusun Selatan	225.605.000,00	225.605.000,00	0,00
30	Kecamatan Dusun Utara	289.678.000,00	295.026.200,00	(1,81)
31	Kecamatan Gunung Bintang Awai	724.031.918,86	271.500.000,00	166,68
	Total	**271.092.162.979,35**	**264.643.010.780,49**	**2,44**

Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel sebagai berikut.

I	SALDO AWAL		264.643.010.780,49
II	**BERTAMBAH**		
1	Reklas Belanja Atribusi Jalan Lainnya	50.031.918,86	
2	Reklas dari Belanja Modal Jalan Lainnya	402.500.000,00	
3	Koreksi Pencatatan atas Sertifikat yang telah dilakukan Penilaian	6.489.712.480,00	

	JUMLAH		6.942.244.398,86
III	**BERKURANG**		
1	HIBAH	493.092.200,00	
	JUMLAH		493.092.200,00
IV	**JUMLAH SALDO AKHIR TANAH (I+II-III)**		**271.092.162.979,35**
I	**SALDO AWAL/AUDITED**		**264.643.010.780,49**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
398.544.979.745,85	**326.604.733.745,51**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp398.544.979.745,85 mengalami kenaikan 22,03% atau sebesar Rp71.940.246.000,34 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp326.604.733.745,51, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.34 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

NO.	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	40.593.263.931,08	44.006.357.147,08	-3.413.093.216,00	**-7,76%**
2	DINAS KESEHATAN	47.988.772.042,60	49.513.683.220,52	-1.524.911.177,92	**-3,08%**
3	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	93.875.920.183,29	106.052.941.314,29	-12.177.021.131,00	**-11,48%**
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.675.714.909,37	20.048.338.625,37	-10.372.623.716,00	**-51,74%**
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.990.491.952,59	5.600.573.692,59	-1.610.081.740,00	**-28,75%**
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.262.976.386,50	16.132.750.430,50	-5.869.774.044,00	**-36,38%**
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.573.310.421,25	6.285.730.421,25	-1.712.420.000,00	**-27,24%**
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	953.841.503,29	1.591.948.958,29	-638.107.455,00	**-40,08%**
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	6.937.211.800,98	8.748.256.000,98	-1.811.044.200,00	**-20,70%**
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.179.133.697,01	11.171.146.797,01	-992.013.100,00	**-8,88%**
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.213.584.455,56	3.772.700.955,56	-1.559.116.500,00	**-41,33%**
12	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.428.617.484,28	4.588.618.184,28	-2.160.000.700,00	**-47,07%**
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.905.490.230,25	3.981.048.230,25	-1.075.558.000,00	**-27,02%**
14	DINAS PERHUBUNGAN	6.221.220.696,49	8.219.801.556,49	-1.998.580.860,00	**-24,31%**
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.233.919.907,25	3.715.684.249,25	-1.481.764.342,00	**-39,88%**
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.059.598.540,25	2.915.242.890,25	-855.644.350,00	**-29,35%**

NO.	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penurunan (Rp)	(%)
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.965.217.856,84	2.405.846.416,84	-440.628.560,00	**-18,31%**
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.484.066.743,85	1.858.875.743,85	-374.809.000,00	**-20,16%**
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.575.635.780,66	2.056.929.780,66	-481.294.000,00	**-23,40%**
20	SEKRETARIAT DAERAH	29.037.551.313,68	38.305.105.317,68	-9.267.554.004,00	**-24,19%**
21	INSPEKTORAT DAERAH	1.790.400.272,25	3.592.079.472,25	-1.801.679.200,00	**-50,16%**
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.157.019.876,14	3.350.842.547,14	-1.193.822.671,00	**-35,63%**
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.827.171.682,40	21.369.036.017,79	-3.541.864.335,39	**-16,57%**
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1.498.811.270,30	2.125.817.020,30	-627.005.750,00	**-29,49%**
25	SEKRETARIAT DPRD	12.562.855.990,75	15.311.554.922,78	-2.748.698.932,03	**-17,95%**
26	KECAMATAN DUSUN SELATAN	1.209.046.259,70	1.505.297.659,70	-296.251.400,00	**-19,68%**
27	KECAMATAN DUSUN HILIR	2.807.827.601,15	2.928.482.601,15	-120.655.000,00	**-4,12%**
28	KECAMATAN DUSUN UTARA	871.574.640,25	1.074.019.037,25	-202.444.397,00	**-18,85%**
29	KECAMATAN GB AWAI	1.260.248.118,48	1.665.343.243,48	-405.095.125,00	**-24,33%**
30	KECAMATAN KARAU KUALA	1.501.266.619,25	2.199.874.016,25	-698.607.397,00	**-31,76%**
31	KECAMATAN JENAMAS	1.195.772.651,52	1.457.844.951,52	-262.072.300,00	**-17,98%**
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	767.198.926,25	993.208.323,25	-226.009.397,00	**-22,76%**
TOTAL		**326.604.733.745,51**	**398.544.979.745,85**	**-71.940.246.000,34**	**-18,05%**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
902.098.779.704,50	**801.313.281.902,89**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp902.098.779.704,50 mengalami kenaikan sebesar nilai Rp100.785.497.801,61 atau 12.58% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp801.313.281.902,89, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.35 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

NO	SKPD	31 Des 2024 (Rp) Nilai Buku	31 Des 2023 (Rp) Nilai Buku	Kenaikan/ Penurunan	Trend %
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DPRD	39.366.874.415,00	34.629.431.415,00	4.737.443.000	**13,68**
2	SEKRETARIAT DAERAH	74.941.181.891,85	69.694.228.676,83	5.246.953.215	**7,53**
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.267.654.220,76	43.783.838.831,77	4.483.815.389	**10,24**
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62.948.522.726,90	58.875.472.079,90	4.073.050.647	**6,92**
5	DINAS PERHUBUNGAN	10.192.400.227,00	9.061.460.227,00	1.130.940.000	**12,48**
6	DINAS KESEHATAN	96.775.535.711,01	84.779.613.334,34	11.995.922.377	**14,15**
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	40.684.655.820,00	40.026.335.820,00	658.320.000	**1,64**
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.803.079.000,00	3.972.229.000,00	830.850.000	**20,92**

NO	SKPD	31 Des 2024 (Rp) Nilai Buku	31 Des 2023 (Rp) Nilai Buku	Kenaikan/ Penurunan	Trend %
1	2	3	4	5	6
9	DINAS PENDIDIKAN	249.581.346.659,15	231.078.777.142,27	18.502.569.517	**8,01**
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.928.637.145,00	3.534.679.145,00	393.958.000	**11,15**
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.886.347.756,97	2.485.687.200,00	2.400.660.557	**96,58**
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.979.784.107,88	919.300.000,00	5.060.484.108	**550,47**
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.380.933.000,00	2.206.884.000,00	174.049.000	**7,89**
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.371.275.176,46	0	5.371.275.176	**100,00**
15	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.873.445.950,00	5.812.693.150,00	4.060.752.800	**69,86**
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	28.216.619.805,54	25.613.470.006,23	2.603.149.799	**10,16**
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	67.894.112.084,50	68.241.954.884,50	(347.842.800)	**(0,51)**
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27.363.799.641,55	14.390.600.974,82	12.973.198.667	**90,15**
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	6.644.182.250,00	3.700.530.250,00	2.943.652.000	**79,55**
20	INSPEKTORAT DAERAH	781.517.000,00	615.920.000,00	165.597.000	**26,89**
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.867.929.790,00	6.723.947.030,00	143.982.760	**2,14**
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.653.526.386,23	5.227.961.846,23	2.425.564.540	**46,40**
23	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	59.519.972.780,63	55.584.944.141,00	3.935.028.640	**7,08**
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.486.032.800,00	968.700.000,00	517.332.800	**53,40**
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.935.988.281,93	7.136.729.780,00	1.799.258.502	**25,21**
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	5.570.953.228,00	2.610.055.244,00	2.960.897.984	**113,44**
27	KECAMATAN JENAMAS	4.613.667.850,00	4.479.125.850,00	134.542.000	**3,00**
28	KECAMATAN DUSUN HILIR	2.317.074.880,00	2.294.574.880,00	22.500.000	**0,98**
29	KECAMATAN KARAU KUALA	3.369.590.783,00	3.334.590.783,00	35.000.000	**1,05**
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	5.355.939.231,00	4.415.049.231,00	940.890.000	**21,31**
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.079.088.093,00	3.029.513.515,00	49.574.578	**1,64**
32	KECAMATAN Gn. Btg. AWAI	2.447.111.011,14	2.084.983.465,00	362.127.546	**17,37**
TOTAL		**902.098.779.704,50**	**801.313.281.902,89**	**100.785.497.801,61**	**12,58**

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.36 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

I	SALDO AWAL AUDITED 2023		801.313.281.902,89
II	BERTAMBAH SELAMA 2024		
1	Perolehan Dari Belanja Modal TA. 2024	146.962.062.900,10	
2	Data atribusi/pemeliharaan TA. 2024	8.067.313.615,02	
3	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa dan Jasa Konsultan	5.005.627.007,50	
4	Reklasifikasi dari KIB D	2.023.944.855,00	
5	Reklasifikasi dari KDP	16.874.020.200,00	
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	369.941.965,64	

I	**SALDO AWAL AUDITED 2023**		**801.313.281.902,89**
7	Terhutang Tahun 2024	1.497.518.062,73	
8	Reklas belanja Barjas (Pemeliharaan) pada DLH jadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	970.645.000,00	
9	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	1.151.970.000,00	
10	Koreksi atas Piutang BM Tahun TA 2024	352.483.500,00	
	TOTAL BERTAMBAH		**182.923.043.605,99**
III	**BERKURANG SELAMA 2024**		
1	Kesalahan Belanja Tahun 2024	195.727.769,00	
2	Belanja Gedung dan Bangunan yang tidak diakui jadi aset	1.731.578.300,00	
3	Terhutang Tahun 2023	399.789.000,00	
4	Reklasifikasi ke KIB B	658.536.116,00	
5	Reklasifikasi ke KIB D	571.162.100,00	
6	Reklasifikasi ke KDP	37.832.327.134,00	
7	Reklasifikasi dari belanja modal gedung dan bangunan ke Aset Tetap lainnya	103.822.293,27	
8	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status di Tahun Berjalan (barang RB)	4.523.248.935,82	
9	Koreksi atas Ekstrakomptabel Keluar Tahun 2024	52.800.000,00	
10	Kelebihan Bayar Tahun 2024	974.905.296,30	
11	Hibah Barang Aset Tetap Gedung dan Bangunan	140.355.300,00	
12	Pemberian Hibah Barang dari Belanja Modal TA. 2024	1.958.713.150,00	
13	Koreksi atas Jurnal Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan pada Gedung dan Bangunan TA 2024 (Dinas PUPR)	32.994.580.409,99	
	TOTAL BERKURANG		**82.137.545.804,38**
	TOTAL AKHIR KIB C = I + II – III		**902.098.779.704,50**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Barito Selatan TA 2024 diketahui Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum memiliki kebijakan akuntansi mengenai Akuntansi Properti Investasi. Namun dari hasil penelusuran, diketahui terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi sebesar Rp64.471.360.954,50, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.37 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dapat Memenuhi Kriteria Sebagai Properti Investasi

No	SKPD	Deskripsi	Nilai Aset	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Bangunan GPU Jaro Pirarahan	6.295.085.720	Gedung bangunan umum dapat disewakan kepada masyarakat umum atau pihak ketiga.
2	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	Bangunan Pasar Sayur Ikan Buntok, Plaza Beringin Buntok (Bangunan Pasar Sayur Ikan Buntok, Plaza Beringin Buntok)	1.157.229.675	Gedung disewakan untuk pedagang kios pasar
3	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	Bangunan Plaza Beringin Buntok (Bangunan Plaza Beringin Buntok)	55.383.793.558,5	Gedung disewakan untuk pedagang kios pasar
4	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	Bangunan Pasar Buah Plaza Beringin Buntok (Bangunan Pasar Buah Plaza Beringin Buntok)	1.053.250.001	Gedung disewakan untuk pedagang kios pasar
5	Kecamatan Dusun Utara	Bangunan Gedung Pasar Pendang (Bangunan Gedung Pasar Pendang)	582.002.000	Gedung disewakan untuk pedagang kios pasar
		Jumlah	**64.471.360.954,5**	

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3.4 Jalan. Jaringan. dan Irigasi	**1.895.391.751.701,35**	**1.610.806.313.332,52**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.895.391.751.701,35 mengalami kenaikan sebesar Rp284.386.589.918,87 atau 17,23 % dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp 1.610.806.313.332,52, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.38 Rincian Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per SKPD

NO	SKPD	2023	2024	Kenaikan/ Penurunan	TREND (%)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	1.086.491.872,77	1.086.491.872,77	0,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	5.614.213.654,00	8.142.175.754,00	2.527.962.100,00	45,03
3	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	3.068.594.596,00	3.068.594.596,00	0,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.465.009.331.635,32	1.714.229.512.518,54	242.383.318.082,34	16,54
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	103.842.943.793,61	127.963.035.527,28	24.120.091.733,67	23,23
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	53.223.100,00	472.426.900,00	419.203.800,00	787,64
7	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	39.659.855,00	94.362.272,00	54.702.417,00	137,93
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	15.082.679.707,69	18.904.398.707,69	3.821.719.000,00	25,34
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.611.737.999,00	1.611.737.999,00	0,00	0,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.010.000,00	98.010.000,00	0,00	0,00
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	424.879.000,00	424.879.000,00	100,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.314.081.455,00	1.314.081.455,00	0,00	0,00
13	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.205.141.700,00	1.205.141.700,00	0,00	0,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	11.252.000,00	11.252.000,00	0,00	0,00
15	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	221.670.000,00	3.358.227.000,00	3.136.557.000,00	(1.414,97)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	54.258.000,00	54.258.000,00	0,00	0,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	3.425.024.252,13	3.687.024.237,11	261.999.984,98	(7,65)
18	INSPEKTORAT	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	297.806.000,00	297.806.000,00	0,00	0,00
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	100,00
22	SEKRETARIAT DPRD	3.891.414.500,00	3.891.414.500,00	0,00	0,00
23	KECAMATAN DUSUN SELATAN	1.060.961.769,00	1.110.455.769,00	49.494.000,00	4,67
24	KECAMATAN DUSUN HILIR	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
25	KECAMATAN DUSUN UTARA	614.596.805,00	614.596.805,00	0,00	0,00
26	KECAMATAN GB AWAI	197.304.465,00	197.304.465,00	0,00	0,00
27	KECAMATAN KARAU KUALA	1.358.624.882,00	1.358.624.882,00	0,00	0,00
28	KECAMATAN JENAMAS	1.479.359.946,00	1.679.359.946,00	200.000.000,00	13,52
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.931.345,00	51.931.345,00	0,00	0,00
	Total	**1.610.806.313.332,52**	**1.895.192.903.251,39**	**284.386.589.918,87**	**17,23**

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.39 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

I	**SALDO AWAL AUDITED 2023**		**1.610.806.313.332,52**
II	**BERTAMBAH SELAMA 2024**		
1	Perolehan Dari Belanja Modal TA 2024	309.512.765.006,10	
2	Perolehan Dari CSR Dusun Hilir TA 2024	613.000.000,00	
3	Pengadaan dari Belanja Modal BOS REGULER DISDIK	12.500.000,00	
4	Data Atribusi/Pemeliharaan TA. 2024	9.348.549.675,54	
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Jadi Aset Tetap TA 2024	2.353.336.068,65	
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2024	1.618.494.800,00	
7	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke JIJ atas Pengadaan TA. 2024	571.162.100,00	
8	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari KDP ke JIJ	146.950.000,00	
9	Reklasifikasi Atas KDP ke Jalan jaringan dan Irigasi	4.415.839.493,46	
	Koreksi atas JIJ TA. 2024	6.048.219.583,28	
TOTAL BERTAMBAH			**334.640.816.727,03**
III	**BERKURANG SELAMA 2024**		
1	Mutasi atas Pengadaan	1.618.494.800,00	
2	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	9.079.115.000,00	
3	SALAH POS BELANJA MODAL Jalan Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan	2.023.944.855,00	
4	Reklas ke Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke Tanah	402.500.000,00	
5	Ekstrakomptabel Keluar atas Pengadaan TA. 2024	20.564.000,00	
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan ke KDP	3.358.398.475,96	
7	Reklas Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke KDP	32.049.129.677,20	
8	Lebih bayar dari kontrak tahun 2024	355.680.000,00	
9	Reklas Keluar ke Peralatan dan Mesin dari JIJ TA 2024	998.500.000,00	
10	Kesalahan Belanja yang seharusnya Belanja Jasa	347.900.000,00	
TOTAL BERKURANG			**50.254.226.808,16**
TOTAL SALDO AKHIR KIB B = I + II - III			**1.895.192.903.251,39**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	**4.451.198.388,03**	**4.275.502.150,76**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.451.198.388,03 mengalami kenaikan sebesar 175.696.237,27 atau (4,11%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.275.502.150,76, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.40 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

NO.	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	TREND (%)
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DPRD	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	24.132.825,00	24.132.825,00	0,00
3	DINAS PENGERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.868.881.200,00	1.868.881.200,00	0.00
5	DINAS PERHUBUNGAN	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
6	DINAS PENDIDIKAN	732.826.111,00	680.104.167,00	7,75
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.532.731.195,10	1.532.731.195,10	0,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN. PERTANIAN DAN PERIKANAN	121.822.293,27	18.000.000,00	576,79
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00
12	INSPEKTORAT	7.195.650,00	7.195.650,00	0,00
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00
15	DINAS PEMUDA. OLAHRAGA. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	64.491.313,66	45.339.313,66	42,24
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	0,00	0,00	0,00
17	KECAMATAN JENAMAS	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00
18	KECAMATAN DUSUN HILIR	2.062.000,00	2.062.000,00	0,00
19	KECAMATAN KARAU KUALA	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00
20	KECAMATAN DUSUN UTARA	38.673.800,00	38.673.800,00	0,00
	JUMLAH	**4.451.198.388,03**	**4.275.502.150,76**	**4,11**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.41 Rincian Golongan dan Kode Rekening Aset Tetap Lainnya

I	**SALDO AWAL AUDITED 2023 (KIB E)**		**4.275.502.150,76**
II	**BERTAMBAH SELAMA 2024**		
1	BOS REGULER	27.536.739,97	
2	KOREKSI dari BANGUNAN RENOVASI (KIB C) BELANJA TA. 2024	103.822.293,27	
	APBD 2024	44.337.204,00	
	TOTAL BERTAMBAH (KIB E)		**175.696.237,24**
III	**BERKURANG SELAMA 2024**		0,00
	TOTAL BERKURANG (KIB E)		**0,00**
IV	**TOTAL AKHIR KIB E = I + II - III (KIB E)**		**4.451.198.388,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	**92.542.029.414,76**	**47.057.976.386,79**

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp92.542.029.414,76 mengalami kenaikan sebesar Rp53.064.115.756,67 atau (112,76%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp47.057.976.386,79, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.42 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

No.	SKPD	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	TREND (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.463.957.588,88	37.042.957.783,79	39.420.999.805,09	**106,42**
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	575.367.183,33	467.250.850,00	108.116.333,33	**23,14**
3	Dinas Kesehatan	2.159.292.690,00	0	2.159.292.690,00	**100,00**
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.260.749.103,00	4.260.749.103,00	0,00	**0,00**
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.643.517.249,55	2.641.700.185,00	5.001.817.064,55	**189,34**
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	968.820.000,00	(968.820.000,00)	**(100,00)**
7	Dinas Lingkungan Hidup	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	**0,00**
8	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	9.945.600,00	0	9.945.600,00	**100,00**
9	Kecamatan Dusun Selatan	0	49.494.000,00	(49.494.000,00)	**(100,00)**
10	Kecamatan Gunung Bintang Awai	1.411.900.000,00	1.609.704.465,00	(197.804.465,00)	**(12,29)**
Total		**92.542.029.414,76**	**47.057.976.386,79**	**45.484.053.027,97**	**96,66**

Rincian KDP berdasarkan Jenis per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.43 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Jenis

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	KDP Bangunan Gedung Kantor	51.194.203.575,80
2	KDP Jalan dan Jembatan	41.347.825.838,96
Total		**92.542.029.414,76**

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.44 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

I	**SALDO AWAL *AUDITED* 2023 (KIB F)**	**47.057.976.386,79**
II	**BERTAMBAH SELAMA 2024**	

1	REKLASIFIKASI ATAS BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	37.832.327.134,00	
2	REKLASIFIKASI ATAS KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN GEDUNG DAN BANGUNAN TEMPAT KERJA	32.049.129.677,76	
3	KDP KONSULTAN PERENCANAAN/PENGAWASAN	4.472.518.638,34	
4	Kurang catat saldo awal tahun atas Pembulatan	0,03	
	TOTAL BERTAMBAH (KIB F)		**74.353.975.450,13**
III	**BERKURANG SELAMA 2024**		
1	REKLASIFIKASI KE GEDUNG DAN BANGUNAN	16.874.020.200,00	
2	REKLAS KE JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	4.415.839.493,46	
	REKLAS DARI KDP KE JIJ	7.580.062.728,70	
	TOTAL BERKURANG (KIB F)		**28.869.922.422,16**
IV	**TOTAL AKHIR KIB F = I + II – III**		**92.542.029.414,76**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(1.312.015.874.828,62)	(1.163.945.271.908,65)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp1.312.015.874.828,62) dan (Rp1.163.945.271.908,65). Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menghitung penyusutan dengan menggunakan Metode Garis Lurus. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.45 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(244.155.005.621,66)
3	Gedung dan Bangunan	(189.387.105.205,79)
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(881.933.301.926,00)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Jumlah		**(1.312.015.874.828,62)**

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
163.808.505.290,56	452.928.328.197,31

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Lancar, Investasi, dan Aset Tetap. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp163.808.505.290,56 dan Rp452.928.328.197,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.46 Rincian Aset Lainnya

No.	Jenis Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	30.582.000,00	25.246.200,00	(25.246.200,00)	(100,00)

No.	Jenis Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Aset Tidak Berwujud	8.536.003.670,00	7.944.263.670,00	591.740.000,00	7,45
3	Aset Lain-lain	80.709.545.182,24	77.280.842.718,15	3.428.702.464,09	4,44
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.044.527.561,68)	(6.535.631.390,84)	(508.896.170,84)	7,79
5	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	81.576.902.000,00	374.213.607.000,00	(292.636.705.000,00)	(78,20)
JUMLAH		**163.808.505.290,56**	**452.928.328.197,31**	**(289.119.822.906,75)**	**(63,83)**

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
30.582.000,00	25.246.200,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 30.582.000,00 dan Rp25.246.200,00.

5.3.1.4.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	25.246.200,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp25.246.200,00 merupakan dari Tagihan Penjualan Angsuran Dum Rumah Dinas.

Tabel 5.3.47 Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Saldo Akhir 2023 Angsuran lebih dari satu tahun	setoran	Aset Lainnya 31 Desember 2024 (Total) (Rp)
1	M. Nanang Salahudin	3.832.800,00	3.832.800,00	0,00
2	M. Rayhani	1.903.200,00	1.903.200,00	0,00
3	Rangin Turang	7.927.200,00	7.927.200,00	0,00
4	Sonia Cicilia	11.583.000,00	11.583.000,00	0,00
Jumlah		**25.246.200,00**	**25.246.200,00**	**0,00**

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
8.536.003.670,00	7.944.263.670,00

Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi *Software* Kajian dan Aset Tak Berwujud Lainnya di SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan didapat nilai perolehan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.944.263.670,00 dan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.536.003.670,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.48 Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan	Trend (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	SEKRETARIAT DPRD	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	100
2	SEKRETARIAT DAERAH	543.586.420,00	543.586.420,00	0,00	0,00

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan	Trend (%)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.689.262.250,00	4.689.262.250,00	0,00	0,00
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	280.840.000,00	132.000.000,00	148.840.000,00	147,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	163.700.000,00	163.700.000,00	0,00	0,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH	761.700.000,00	761.700.000,00	0,00	0,00
8	DINAS PENDIDIKAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	442.040.000,00	293.040.000,00	149.000.000,00	166,29
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.317.640.000,00	1.167.740.000,00	149.900.000,00	(11,38)
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	73.735.000,00	73.735.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		**8.536.003.670,00**	**7.944.263.670,00**	**591.740.000,00**	**7,45**

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

I	**SALDO AWAL AUDITED 31 DESEMBER 2023**		**7.944.263.670,00**
II	**BERTAMBAH SELAMA 2024**		
1	Belanja Modal TA. 2024	441.840.000,00	
2	Reklas Belanja Modal dari pemeliharaan komputer jaringan TA. 2024	149.900.000,00	
	TOTAL BERTAMBAH		**591.740.000,00**
III	**TOTAL BERKURANG SELAMA 2024**		
1	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023	6.535.631.390,84	
2	Beban Penyusutan Tahun 2024	508.896.170,84	
IV	**TOTAL BERKURANG**		**7.044.527.561,68**
V	**TOTAL AMORTISASI = I+II-III**		**1.491.476.108,32**

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
80.709.545.182,24	**77.280.842.718,15**

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp80.709.545.182,24 dan Rp. 77.280.842.718,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.49 Rincian Aset Lain-lain

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aset Tetap Rusak Berat	34.821.163.721,06	35.385.716.656,84	(564.552.935,78)	1,60
2	Akm. Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(24.057.570.039,89)	(24.070.070.039,89)	12.500.000,00	(0,05)
4	Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	102.318.710.351,40	100.072.396.032,44	2.246.314.318,96	2,24
5	Akm. Penyusutan yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	(32.372.758.850,33)	(34.107.199.931,24)	1.734.441.080,91	(5,09)
JUMLAH		**80.709.545.182,24**	**77.280.842.718,15**	**3.627.550.914,05**	4,69

Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

NO	Uraian	Saldo Wal Nilai Buku 2024	
1	2	5	
I	**SALDO AWAL AUDITED**		**77.280.842.718,15**
II	**PENAMBAHAN**		
1	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	168.832.679,28	
2	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Rusak Berat)	3.095.279.924,16	
3	Barang Yang di Lelang Tahun Berjalan	81.486.364,59	
4	Aset Dalam Penelusuran	71.362.378,06	
5	Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.460.836.858,87	
6	Koreksi /Double Catat	1.376.500.589,61	
7	Koreksi atas kesalahan penghitungan pada barang yang dilakukan pemeliharaannya (Akumulasi penyusutan)	-6.279.800,64	
8	Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-1.324.884.613,99	
JUMLAH PENAMBAHAN			**6.923.134.379,94**
III	**PENGURANGAN**		
1	Terdapat Aset Tetap yang Dihibahkan Tahun Berjalan	168.832.679,28	
2	Terdapat Aset Lainnya yang Dihapuskan Tahun Berjalan (RB)	2.515.762.263,82	
3	Terdapat Aset Tetap yang Dijual Tahun Berjalan	216.159.746,95	
4	Koreksi atas kesalahan penghitungan pada barang yang dilakukan pemeliharaannya (Akumulasi penyusutan)	-2.426.774,71	
5	Reklas ke Aset Tetap KIB A,B,C, D,E,F	596.104.000,51	
IV	**JUMLAH BERKURANG**		**3.494.431.915,85**
SALDO AKHIR =I+II-III			**80.709.545.182,24**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.3.1 Aset Rusak Berat	**34.821.163.721,06**	**35.385.716.656,84**

Aset Tetap Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar 34.821.163.721,06 dan 35.385.716.656,84.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	**(24.057.570.039,89)**	**(24.070.070.039,89)**

Akumulasi Aset Tetap Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp24.057.570.039,89) dan (Rp24.070.070.039,89).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.3.3 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	**102.318.710.351,40**	**100.072.396.032,44**

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar 102.318.710.351,40 dan 100.072.396.032,44.

Dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar 102.318.710.351,40, terdapat Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp 3.382.230.209,78 yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Barito Selatan TA 2024 berupa kelebihan bayar atas kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang belum lunas disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.50 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

No.	SKPD	Aset Tetap asal	Mutasi ke Tetap yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah (Rp)
1	Dinas PUPR	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.810.730.011,67
2	Dinas PUPR	Gedung dan Bangunan	518.833.655,51
3	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	133.367.322.56
4	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	52.666.542,60
		Jumlah	**3.382.230.209,78**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.3.4 Akumulasi Penyusutan yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	**(32.372.758.850,33)**	**(34.107.199.931,24)**

Akumulasi Penyusutan yang Tidak digunakan dalam operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp32.372.758.850,33 dan Rp34.107.199.931,24

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(7.044.527.561,68)**	**(6.535.631.390,84)**

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.044.527.561,68 dan Rp6.535.631.390,84.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4.5 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility Transfer* Ke Daerah (TDF- TKD)	**81.576.902.000,00**	**374.213.607.000,00**

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp81.576.902.000,00 dan Rp374.213.607.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2 KEWAJIBAN	**9.637.487.809,89**	**4.393.310.860,04**

Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.637.487.809,89 dan Rp4.393.310.860,04.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**9.637.487.809,89**	**4.393.310.860,04**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.637.487.809,89 dan Rp4.393.310.860,04. Jika dibandingkan saldo Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023, Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.244.176.949,85 atau 119,37%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.51 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0,00	0.00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	76.451.314,04	(76.451.314,04)	0,00
3	Utang Belanja	4.466.800.163,88	3.917.070.546,00	549.729.617,88	14,03
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.170.687.646,01	399.789.000,00	4.770.898.646,01	1193,35
JUMLAH		**9.637.487.809,89**	**4.393.310.860,04**	**5.244.176.949,85**	**119,37**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**0,00**	**0,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka	**0,00**	**76.451.314,04**

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Papan Billboard pada BPKAD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp76.451.314,04

5.3.2.1.3 Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	4.466.800.163,88	3.917.070.546,00

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.466.800.163,88 dan Rp3.917.070.546,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.52 Rincian Utang Belanja

No.	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	RSUD JARAGA SASAMEH (BLUD)	**4.466.800.163,88**	**3.917.070.546,00**	549.729.617,88	14,03
JUMLAH		**4.466.800.163,88**	**3.917.070.546,00**	**549.729.617,88**	**14,03**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	5.170.687.646,01	399.789.000,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp5.170.687.646,01 dan Rp399.789.000,00.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.170.687.646,01 terdiri dari:

1. Utang pembayaran dua paket pekerjaan pada Dinas PUPR, yaitu:
   a. Utang pembayaran atas pekerjaan Rekonstruksi Jalan Dalam Desa Sanggu sebesar Rp1.119.494.719,16;
   b. Utang pembayaran atas pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pendang - Jl. Provinsi Buntok - P.Raya (Ruas 091) (DBH SAWIT) II sebesar Rp2.406.724.864,12;
2. Utang pembayaran pekerjaan pada BPKAD, yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dengan Nomor Surat Perintah Kerja 764/918/SPK-BPP/XII/PUPR-2023 tanggal 6 Desember 2023 nilai kontrak sebesar Rp1.497.518.062,73 an. Penyedia Cv. Satria Jaya Abadi Pusat Buntok;
3. Utang pembayaran pekerjaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Pekerjaan, yaitu Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus dengan Nomor Surat Perintah Kerja :764/1076/BPP/XII/PUPR-2023 tanggal 13 Desember 2023 nilai kontrak sebesar Rp146.950.000,00 an. Penyedia Cv. Bumi Indah Membangun. Pusat Palangkaraya.

Tabel 5.3.53 Rincian Utang Jangka Pendek. Sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Utang Tahun 2024	Nilai Utang Tahun 2023
1	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR. Penyedia CV. Bumi Indah Membangun Pusat Palangkaraya	0,00	199.889.000,00
2	Rehabilitasi Mushola DISNAKERTRANS. Penyedia CV. Satria Jaya Abadi	0,00	199.900.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.497.518.062,73	0,00
	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	146.950.000,00	0,00
3	Paket pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pendang – Jl. Provinsi Buntok – P.Raya (Ruas 091) (DBH SAWIT) II	2.406.724.864,12	0,00
4	Paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Dalam Desa Sanggu	1.119.494.719,16	
Jumlah		**5.170.687.646,01**	**399.789.000,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.3 EKUITAS	**2.776.641.866.063,20**	**2.607.544.245.113,22**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.776.641.866.063,20 dan Rp2.607.544.245.113,22.

5.4 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1 Pendapatan-LO	**1.542.979.261.963,02**	**1.606.051.748.553,32**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan-LO untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.542.979.261.963,02 dan Rp1.606.051.748.553,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Pendapatan – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	86.691.542.777,02	73.453.258.295,32	13.238.284.481,70	18,02
2	Pendapatan Transfer-LO	1.450.826.839.883,00	1.531.131.080.258,00	(80.304.240.375,00)	(5,24)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	5.460.879.303,00	1.467.410.000,00	3.993.469.303,00	272,14
JUMLAH		1.542.979.261.963,02	1.606.051.748.553,32	(63.072.486.590,30)	**(3,93)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	**86.691.542.777,02**	**73.453.258.295,32**

Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp86.691.542.777,02 dan Rp73.453.258.295,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2 Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Daerah-LO	15.139.603.495,36	18.852.189.660,06	(3.712.586.164,70)	(19,69)
2	Retribusi Daerah-LO	5.146.786.582,00	7.892.679.453,00	(2.745.892.871,00)	(34,79)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.522.022.594,50	81.147.428.96	4.440.875.165.54	5472,60
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	61.883.130.105,16	46.627.241.753,30	15.255.888.351,86	32,72
JUMLAH		**86.691.542.777,02**	**73.453.258.295,32**	**13.238.284.481,70**	**18,02**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	**15.139.603.495,36**	**18.852.189.660,06**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.139.603.495,36 dan Rp18.852.189.660,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel-LO	80.312.000,00	89.859.000,00	(9.547.000,00)	(10,62)
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	4.230.780.408,00	4.540.309.737,10	(309.529.329,10)	(6,82)
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	2.857.000.00	2.585.000,00	272.000.00	10,52
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	222.786.883,04	166.124.052,96	56.662.830,08	34,11
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	5.688.575.834,00	6.153.467.738,00	(464.891.904,00)	(7,55)
6	Pajak Parkir-LO	36.682.800,00	0,00	36.682.800,00	0,00
7	Pajak Air Tanah-LO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	5.500.000,00	4.540.000.00	960.000,00	21,15
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	392.895.700,32	428.037.007,00	(35.141.306,68)	(8,21)
10	PBBP2-LO	1.844.874.620,00	1.924.728.907,00	(79.854.287,00)	(4,15)
11	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	2.633.738.250,00	5.541.938.218,00	(2.908.199.968,00)	(52,48)
JUMLAH		**15.139.603.495,36**	**18.852.189.660,06**	**(3.712.586.164,70)**	**(19,69)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	**5.146.786.582,00**	**7.892.679.453,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.146.786.582,00 dan Rp7.892.679.453,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.5 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	114.179.500,00	218.404.125,00	(104.224.625,00)	(47,72)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	85.259.000,00	118.137.000,00	(32.878.000.00)	(27.83)
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	40.660.000,00	50.250.000,00	(9.590.000.00)	(19.08)
5	Retribusi Pelataran-LO	444.301.000,00	1.679.341.690,00	(1.235.040.690.00)	(73.54)
6	Retribusi Los-LO	0,00	0,00	0.00	0.00
7	Retribusi Kios-LO	1.404.139.565,00	51.660.000,00	1.352.479.565,00	2618,04
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	58.905.000,00	(58.905.000.00)	(100.00)
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	76.593.200,00	(76.593.200.00)	(100.00)
10	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang. dan Perlengkapannya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	707.350.450,00	591.864.650,00	115.485.800,00	19,51
12	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	3.000.000,00	5.080.000,00	(2.080.000,00)	(40,94)
13	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	3.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(14,29)
14	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	17.607.000,00	18.516.000,00	(909.000,00)	(4,91)
15	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	100.000,00	1.442.000,00	(1.342.000,00)	(93,07)
16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	93.570.000,00	82.150.000,00	11.420.000,00	13,90
17	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	5.075.000,00	5.040.000,00	35.000,00	0,69
18	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	1.841.997.500,00	2.709.864.500,00	(867.867.000,00)	(32,03)
19	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	24.605.000,00	17.800.000,00	6.805.000,00	38,23
20	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	2.198.431.288,00	(2.198.431.288,00)	(100,00)
21	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	55.375.000,00	0,00	55.375.000,00	0,00
22	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	0,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)	(0,00)
23	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	306.967.567,00	0,00	306.967.567,00	0,00
JUMLAH		**5.206.417.702,00**	**7.892.679.453,00**	**(2.686.261.751,00)**	**(34,03)**

Tabel 5.4.6 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

No	Uraian	Nilai
1.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.146.786.582,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.768.725.847,00
Selisih		**378.060.735,00**

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.7 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Uraian	Nominal (Rp)
Penambah:	
Koreksi Pencatatan Piutang Retribusi Jasa Usaha 2024	378.830735,00
Pengurang:	
Piutang Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023	470.000,00
Total	**378.060.735,00**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	**4.522.022.594,50**	**81.147.428,96**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.522.022.594,50 dan Rp81.147.428.96.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	**61.883.130.105,16**	**46.627.241.753,30**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp61.883.130.105,16 dan Rp46.627.241.753.30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.8 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	2.416.800,00	0,00	2.416.800,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	74.598.840.00	(74.598.840.00)	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	73.623.965,00	0,00	73.623.965.00	0,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.684.333.661,00	1.665.588.033,00	1.018.745.628,00	61,16
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	(2.937.000,00)	2.937.000,00	(100,00)
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.567.658,22	350.333.511,32	(344.765.853,10)	(98,41)
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara LO	0,00	180.267.824,00	(180.267.824,00)	0,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	1.790.000,00	(1.790.000,00)	0,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	4.758.729.505,38	1.053.359.494,72	3.705.370.010,66	351,77
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	74.873.907,00	101.710.737,00	(26.836.830,00)	(26,39)
11	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	14.991.587,00	13.974.228,00	1.017.359,00	7,28
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	84.683.178,00	(84.683.178,00)	0,00
13	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	3.526.420,00	(3.526.420,00)	(100,00)
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	4.358.076.164,56	304.157.785,00	4.053.918.379,56	1.332,83

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	0,00	1.610.404.008,04	(1.610.404.008,04)	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	495.693.081,00	0,00	495.693.081,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	0,00	93.011.420,00	(93.011.420,00)	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	358.572.389,89	358.572.389,89	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	12.292.601.746,00	539.225.135,64	11.755.793.410,36	2180,13
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	0,00	1.611.048.063,22	(1.611.048.063,22)	0,00
21	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	37.122.222.030,00	35.459.778.541,47	1.662.443.488,53	4,69
22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	3.124.149.144,00	(3.124.149.144,00)	0,00
Jumlah		**61.883.130.105,16**	**46.627.241.753,30**	**2.963.286.605,86**	**6,36**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.450.826.839.883,00	**1.531.131.080.258,00**

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.307.840.130.553,00 dan Rp1.531.131.080.258.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.9 Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.390.160.014.789,00	1.481.964.289.406,00	(91.804.274.617,00)	(6,19)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	60.666.825.094,00	49.166.790.852,00	11.500.034.242,00	23,39
Jumlah		**1.450.826.839.883,00**	**1.531.131.080.258,00**	**(223.290.949.705,00)**	**(14,58)**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.390.160.014.789,00	**1.481.964.289.406,00**

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.390.160.014.789,00 dan Rp1.481.964.289.406,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DBH PBB-LO	52.326.179.332,00	7.134.892.100,00	45.191.287.232,00	633,38
2	DBH PPh Pasal 21-LO	5.252.040.000,00	7.126.209.900,00	(1.874.169.900,00)	(26,30)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	48.298.000,00	(48.298.000,00)	0,00
4	DBH SDA Minyak Bumi- LO	193.744.000,00	376.879.000,00	(183.135.000,00)	(48,59)
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	963.646.000,00	(963.646.000,00)	0,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	607.793.041.330,00	684.262.219.000,00	(76.469.177.670,00)	(11,18)
9	DBH SDA Kehutanan- PSDH-LO	6.534.391.800,00	7.855.199.600,00	(1.320.807.800,00)	(16,81)
11	DBH SDA Perikanan-LO	1.143.842.000,00	1.313.556.000,00	(169.714.000,00)	(12,92)
12	DAU-LO	563.679.401.321,00	535.152.039.000,00	28.527.362.321,00	5,33
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	846.089.000,00	1.254.974.500,00	(408.885.500,00)	(32,58)
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.966.315.704,00	4.611.154.000,00	(644.838.296,00)	(13,98)
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP-LO	4.198.920.050,00	2.284.710.250,00	1.914.209.800,00	83,78
16	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	309.898.000,00	0,00	309.898.000,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.423.803.000,00	3.247.858.510,00	(1.824.055.510,00)	(56,16)
18	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan-LO	28.668.499.100,0	35.105.819.500,00	(6.437.320.400,00)	(18,34)
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.059.405.000,00	5.569.284.400,00	(2.509.879.400,00)	(45,07)
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	7.721.125.112,00	16.543.415.152,00	(8.822.290.040,00)	(53,33)
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	3.012.120.381,00	2.328.388.900,00	683.731.481,00	29,37
22	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	19.427.094.794,00	19.763.204.754,00	(336.109.960,00)	(1,70)
23	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	56.256.278.500,00	42.061.390.990,00	14.194.887.510,00	33,75
24	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.475.437.500,00	1.434.250.000,00	41.187.500,00	2,87
25	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	0.00	11.122.949.000,00	(11.122.949.000.00)	(100,00)
26	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.593.430.000,00	1.638.680.000,00	(45.250.000,00)	(2,76)
27	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	742.710.000,00	943.140.000,00	(200.430.000,00)	(21,25)
28	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	10.909.896.765,00	11.301.887.500,00	(391.990.735.00)	(3,47)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
29	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	838.548.000,00	(838.548.000,00)	(100,00)
30	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB-LO	2.907.248.100,00	2.082.155.500,00	825.092.600,00	39,63
31	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	0,00	594.575.000,00	(594.575.000,00)	(100,00)
32	Dana Desa-LO	0,00	72.180.332.350,00	(72.180.332.350,00)	(100,00)
33	Insentif Fiskal-LO	6.719.104.000,00	2.824.632.500,00	3.894.471.500,00	137,88
Jumlah		**1.390.160.014.789,00**	**1.481.964.289.406,00**	**(91.804.274.617,00)**	**(6,19)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO — **31 Desember 2024: 60.666.825.094.00** — **31 Desember 2023: 49.166.790.852,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.666.825.094,00 dan Rp49.166.790.852,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	4.791.260.027,00	5.193.614.420,57	(402.354.393,57)	(7,75)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.823.442.658,00	5.473.890.294,99	349.552.363,01	6,39
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	41.392.177.393,00	37.421.833.718,21	3.970.343.674,79	10,61
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	349.972.137,00	(7.084.344.230,77)	7.434.316.367,77	(104,94)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- LO	8.309.972.879,00	7.991.796.649,00	318.176.230,00	3,98
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)	0,00
Jumlah		**60.666.825.094,00**	**49.166.790.852,00**	**11.500.034.242,00**	**23,39**

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO — **31 Desember 2024: 5.460.879.303,00** — **31 Desember 2023: 1.467.410.000,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.460.879.303,00 dan Rp1.467.410.000.00.

Tabel 5.4.12 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok	613.000.000,00	0,00	613.000.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	257.115.000,00	(257.115.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	268.000.000,00	1.210.295.000,00	(942.295.000,00)	(77,86)
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.579.879.303,00	0,00	4.579.879.303,00	100,00
Jumlah		**5.460.879.303,00**	**1.467.410.000,00**	**3.993.469.303,00**	**272,14**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
881.000.000,00	**1.467.410.000,00**

Realisasi Pendapatan Hibah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp881.000.000,00 dan Rp1.467.410.000,00.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.579.879.303,00	**0,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.579.879.303,00 dan Rp0,00.

5.4.2 Beban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.377.261.271.265,16	**1.108.341.463.900,86**

Beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.377.261.271.265,16 dan Rp1.108.341.463.900,86.

5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.164.693.139.989,16	**950.137.616.450,86**

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, dan Beban Penyusutan. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.164.693.139.989,16 dan Rp950.137.616.450,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.13 Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	467.092.694.472,00	408.250.635.564,38	58.842.058.907,62	14,41
2	Beban Barang dan Jasa	423.669.807.913,77	296.855.755.929,30	126.814.051.984,47	42,72
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	2.735.558.710,00	3.183.629.010,00	(448.070.300,00)	-14,07
5	Beban Hibah	86.558.007.894,01	76.546.894.637,11	10.011.113.256,90	13,08
6	Beban Bantuan Sosial	21.828.001.450,00	4.571.493.000,00	17.256.508.450,00	377,48
7	Beban Penyisihan Piutang	1.744.892.986,25	1.269.502.684,96	475.390.301,29	37,45
8	Beban Lain-lain	0,00	6.536.013.654,63	(6.536.013.654,6)3	(100,00)
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.006.765.194,83	32.142.579.318,42	864.185.876,41	2,69
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.035.515.940,63	14.878.984.705,56	1.156.531.235,07	7,77
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	111.512.999.256,83	105.408.425.319,36	6.104.573.937,47	5,79
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	508.896.170,84	493.702.627,14	15.193.543,70	3,08
Jumlah		**1.164.693.139.989,16**	**950.137.616.450,86**	**214.555.523.538,30**	**22,58**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.1 Beban Pegawai	**467.092.694.472,00**	**408.250.635.564,38**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp467.092.694.472,00 dan Rp408.250.635.564,38.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	**423.669.807.913,77**	**296.855.755.929,30**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp423.669.807.913,77 dan Rp296.855.755.929,30. Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA adalah mapping dari Beban/Belanja Persediaan, Beban/Belanja Jasa, Beban/Belanja Pemeliharaan, dan Beban/Belanja Perjalanan Dinas. Atas realisasi Beban Barang dan Jasa-LO, terdapat selisih dengan realisasi Beban Barang dan Jasa -LRA dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.4.14 Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang - Persediaan	83.363.426.354,26	51.331.720.040,43	32.031.706.313,83	62,40
2	Beban Jasa	171.723.313.270,11	123.886.304.058,75	47.837.009.211,36	38,61
3	Beban Pemeliharaan	13.005.108.571,02	12.050.140.763,00	954.967.808,02	7,92
4	Beban Perjalanan Dinas	89.848.041.375,00	67.650.885.864,00	22.197.155.511,00	32,81
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.656.646.580,00	5.305.531.800,00	5.351.114.780,00	100,86

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Beban Barang - Persediaan BOS	22.535.157.133,00	4.205.360,00	22.530.951.773,00	535767,49
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Barang - Persediaan BLUD	32.538.114.630,38	36.626.968.043,12	(4.088.853.412,74)	(11,16)
Jumlah		**423.669.807.913,77**	**296.855.755.929,30**	**126.814.051.984,47**	**42,72**

Tabel 5.4.15 Selisih Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA

URAIAN		NILAI 2024	NILAI 2023
Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)		423.669.807.913,77	296.855.755.929,30
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)		447.961.452.752,50	(308.888.756.941,85)
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)		4.466.800.163,88	3.917.070.546,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)		3.917.070.546,00	3.574.222.347,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)		0.00	0,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)		0.00	0,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)		46.384.545.494,89	9.836.777.922,69
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)		9.836.777.922,69	(11.214.609.204,12)
Selisih		***(11.706.393.115,59)***	***(13.753.680.492,98)***
Penjelasan			
	Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
	Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	0,00	
	Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan digunakan pada 2024	(10.334.197.361,58)	
	Reklasifikasi Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri menjadi Beban Barjas BOS		
	Beban barang jasa (pemeliharaan) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap		
	Beban barang jasa (bahan bangunan & jaspel umum) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap	(19.486.892.053,47)	
	Belanja/Beban Barang Jasa Dana BOS yang dicatat menjadi Beban Hibah ke Sekolah Swasta	(3.315.281.600,00)	
	Belanja/Beban Barang Jasa Dana BOS yang diatribusikan menjadi Aset Tetap	(656.299.640,00)	
	Pencatatan Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD	(4.466.800.163,88)	
	Belanja Modal yang dicatat sebagai Ekstrakomptabel	13.489.926.451,14	
	Beban barang yang menjadi persediaan	8.641.321.867,31	
	Kesalahan Belanja Barang Jasa pada Belanja Modal	7.100.000,00	
	Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan) baik bertambah	497.658.838,89	
	Pembayaran utang barjas tahun lalu	3.917.070.546,00	

5.4.2.1.3 Beban Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Jumlah Beban Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 5.4.16 Selisih Beban Bunga-LO dan Beban Bunga-LRA

No	Uraian	Nilai
1	Beban Bunga – LO	0,00
2	Belanja Bunga – LRA	0,00
3	Selisih	0,00

5.4.2.1.4 Beban Subsidi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	2.735.558.710,00	3.183.629.010,00

Saldo Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.735.558.710,00 dan Rp3.183.629.010,00

5.4.2.1.5 Beban Hibah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	86.558.007.894,01	76.546.894.637,11

Jumlah Beban Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp86.558.007.894,01 dan Rp76.546.894.637,11.

Tabel 5.4.17 Selisih Beban Hibah-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA

URAIAN		NILAI
Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)		86.558.007.894,01
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)		80.845.739.144,00
Selisih		5.712.268.750,01
Penjelasan		
	Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
	Jika terdapat selisih dapat diidentifikasi dari	
	Belanja Bantuan hibah Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga menjadi persediaan karena belum disalurkan	0,00
	Persediaan Bantuan hibah Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga Tahun Lalu yang diserahkan pada tahun ini	0,00
	Belanja/Beban Barang Jasa Dana BOS yang dicatat menjadi Beban Hibah ke Sekolah Swasta	3.315.281.600,00
	Hibah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan kepada Sekolah Swasta di Kab Barito Selatan	1.958.713.150,00
	Hibah Barang kepada Sekolah Swasta di Kab Barito Selatan	488.274.000,01
	Jurnal Koreksi atas hibah CSR	(50.000.000,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	21.828.001.450,00	4.571.493.000,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.828.001.450,00 dan Rp4.571.493.000,00.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.744.892.986,25	1.269.502.684,96

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.744.892.986,25 dan Rp1.269.502.684,96.

5.4.2.1.8 Beban Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	6.536.013.654,63

Beban lain-Lain adalah beban yang tercatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya. Jumlah Beban Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.536.013.654,63.

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	161.064.176.563,13	152.923.691.970,48

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp161.064.176.563,13 dan Rp152.923.691.970,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.006.765.194,83	32.142.579.318,42	864.185.876,41	2,69
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.035.515.940,63	14.878.984.705,56	1.156.531.235,07	7,77
3	Beban Penyusutan Jalan. Irigasi dan Jaringan	111.512.999.256,83	105.408.425.319,36	6.104.573.937,47	5,79
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	508.896.170,84	493.702.627,14	15.193.543,70	3,08
Jumlah		**161.064.176.563,13**	**152.923.691.970,48**	**8.140.484.592,65**	**5,32**

5.4.2.2 Beban Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	212.568.131.276,00	158.203.847.450,00

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan. Beban Transfer untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.568.131.276,00 dan Rp158.203.847.450,00.

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	40.000.000,00	0,00

Beban Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan	**212.528.131.276,00**	**158.203.847.450,00**

Beban Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.528.131.276,00 dan Rp158.203.847.450,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3 Kegiatan Non Operasional	**(5.855.119.947,54)**	**(5.134.946.670,79)**

Saldo Kegiatan Non Operasional yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.855.119.947,54 dan Rp5.134.946.670,79.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3.1 Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	**0,00**	**26.275.633,33**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp26.275.633,33.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	**0,00**	**0,00**

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3.3 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar -LO	**5.855.119.947,54**	**3.345.733,32**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.855.119.947,54 dan Rp3.345.733,32.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	**0,00**	**0,00**

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3.5 Beban Tak Terduga	**423.718.824,00**	**7.372.336.537,00**

Beban Tak Terduga yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp423.718.824,00 dan Rp7.372.336.537,00.

5.5 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**598.326.342.419,48**	**287.468.113.459,88**

Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp598.326.342.419,48 dan Rp287.468.113.459,88.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	**1.831.797.610.547,98**	**1.254.426.312.249,11**

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.831.797.610.547,98 dan Rp1.254.426.312.249,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pajak Daerah	14.168.868.108,32	18.091.398.991,87	(3.922.530.883,55)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.768.725.847,00	7.731.937.413,00	(2.963.211.566,00)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.522.022.594,50	81.147.428,96	4.440.875.165,54
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	47.863.968.066,16	45.974.587.046,28	1.889.381.019,88
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	404.148.408.401,00	11.068.949.000,00	393.079.459.401,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	472.678.309.800,00	337.684.527.882,00	134.993.781.918,00
7	Penerimaan dana Alokasi Umum	591.322.819.252,00	535.152.039.000,00	56.170.780.252,00
8	Penerimaan dana Alokasi Khusus	146.518.271.006,00	162.726.385.956,00	(16.208.114.950,00)
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	6.719.104.000,00	2.824.632.500,00	3.894.471.500,00
10	Penerimaan Dana Desa	73.702.409.076,00	72.180.332.350,00	1.522.076.726,00
11	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	60.666.825.094,00	59.530.079.681,00	1.136.745.413,00
12	Pendapatan Hibah	138.000.000,00	170.000.000,00	(32.000.000,00)
13	Pendapatan Lainnya	4.579.879.303,00	1.210.295.000,00	3.369.584.303,00
Jumlah		**1.831.797.610.547,98**	**1.254.426.312.249,11**	**577.371.298.298,87**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	**1.233.471.268.128,50**	**966.958.198.789,23**

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.233.471.268.128,50 dan Rp966.958.198.789,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Belanja Pegawai	467.108.665.972,00	408.251.315.564,38	58.857.350.407,62
2	Belanja Barang dan Jasa	447.961.452.752,50	308.888.756.941,85	139.072.695.810,65
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	2.735.558.710,00	3.183.629.010,00	(448.070.300,00)
5	Belanja Hibah	80.845.739.144,00	76.486.820.286,00	4.358.918.858,00
6	Belanja Bantuan Sosial	21.828.001.450,00	4.571.493.000,00	17.256.508.450,00
7	Belanja Tak Terduga	423.718.824,00	7.372.336.537,00	(6.948.617.713,00)
8	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
11	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	212.528.131.276,00	158.203.847.450,00	54.324.283.826,00
Jumlah		**1.233.471.268.128,50**	**966.958.198.789,23**	**266.513.069.339,27**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(544.403.128.159,90)**	**(294.202.160.408,09)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp544.403.128.159,90) dan Rp294.202.160.408,09.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.5.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	**73.936.465,00**	**160.393.640,00**

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp73.936.465,00 dan Rp160.393.640,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.3 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	312.500,00	160.393.640,00	(160.081.140,00)
4	Penjualan Aset Lain-Lain	73.623.965,00	0,00	73.623.965,00
Jumlah		**73.936.465,00**	**160.393.640,00**	**(86.457.175,00}**

5.4.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	544.477.064.624,90	294.362.554.048,09

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp545.583.206.421,20 dan Rp294.362.554.048,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.4 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	76.322.201.311,00	50.074.252.410,59	26.247.948.900,41
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	146.211.601.103,8	76.680.345.009,00	69.531.256.094,8
4	Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan	309.157.085.006,1	151.160.376.628,50	157.996.708.377,6
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	44.337.204,00	197.580.000,00	(153.242.796,00)
6	Perolehan Aset Lainnya	441.840.000,00	0,00	441.840.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.300.000.000,00	16.250.000.000,00	(3.950.000.000,00)
Jumlah		**544.477.064.624,90**	**294.362.554.048,09**	**250.114.510.576,81**

5.4.6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(150.000.000,00)	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 dan Rp0,00.

5.4.6.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.6.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	150.000.000,00	0,00

Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 dan Rp0,00.

5.4.6.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.6.4 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	**79.518.617.266,00**	**66.516.686.692,41**

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp79.518.617.266,00 dan Rp66.516.686.692,41.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.6.5 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	**79.518.617.266,00**	**66.516.686.692,41**

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp79.518.617.266,00 dan Rp66.516.686.692,41.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.7 Kenaikan/Penurunan Kas	**53.773.214.259,58**	**(6.734.046.948,21)**

Kenaikan / Penurunan Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp53.773.214.259,58 dan Rp6.734.046.948,21.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.8 Saldo Akhir Kas	**163.870.063.173,77**	**110.519.438.914,19**

Saldo Akhir Kas untuk periode berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp163.870.063.173,77 dan Rp110.519.438.914,19 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.5 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Saldo Akhir Kas di BUD:	156.242.300.522,37	105.947.495.407,59	50.294.805.114,78
	PT. BPK Cab. Buntok (DAU)	88.144.694.001,55	75.296.968.994,25	12.847.725.007,30
	PT. BPK Cab. Buntok (DAK)	4.313.049.924,02	4.174.969.110,08	138.080.813,94
	PT. BPK Cab. Buntok (PAD)	63.783.944.159,26	26.475.548.799,94	37.308.395.359,32
	PT. Bank Mandiri Cab. Buntok	0,00	8.503,32	(8.503,32)
	PT. BRI (Giro)	612.437,54	0,00	612.437,54
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	60.060,00	95.225.750,00	(95.165.690,00)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	3.975.530.309,98	1.923.531.570,48	2.051.998.739,50
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP dan BOK Puskesmas	2.388.779.776,12	2.489.849.898,12	(101.070.122,00)
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	119.250.709,00	63.336.288,00	55.914.421,00
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
	Koreksi Belanja yang Menambah Kas di Kas Daerah atas Realisasi SP2D yang Melebihi Nilai Kontrak	1.106.141.796,30	0,00	1.106.141.796,30

Saldo Akhir Kas		**163.870.063.173,77**	**110.519.438.914,19**	**53.350.624.259,58**
	Keterangan Selisih			
	Double Debit SP2D Bank Kalteng	322.590.000,00	0,00	322.590.000,00
	Selisih Silpa Tahun Sebelumnya Sisa Dana Akibat Kesalahan penyetoran Dana Yayasan PAUD atas transaski pada Des 2023	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah		**164.292.653.173,77**	**110.519.438.914,19**	**53.773.214.259,58**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.776.641.866.063,20	**2.607.544.245.113,22**

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.776.641.866.063,20 dan Rp2.607.544.245.113,22 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.1 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Ref	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.6	2.607.544.245.113,22	2.121.221.957.066,58
SURPLUS/DEFISIT-LO		159.439.151.926,32	485.203.001.444,67
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Piutang		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lancar		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		9.260.283.442,7	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Akm. Amortisasi		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan		747.898.188,89	0,00
Koreksi ekuitas lainnya		(349.712.607,93)	1.119.286.601,97
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**7.5.6**	**2.776.641.866.063,20**	**2.607.544.245.113,22**

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 184 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, penyesuaian yang diperlukan atas pos-pos dalam Laporan Keuangan meliputi LRA, LO, LPE, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Arus Kas telah dilakukan dalam rangka penyajiannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Barito Selatan. Beberapa informasi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan antara lain sebagai berikut.

6.1.1 Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beralamat Jl. Pelita Raya No.305F Telepon 21242 Kode Pos 73711 @Setda.baritoselatankab.go.id.

6.1.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Tugas utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah menyusun program kegiatan sesuai renstra dan renja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barito Selatan serta visi dan misi Bupati Barito Selatan untuk peningkatan pembangunan di segala bidang.

6.1.3 Ketentuan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023; dan
5. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6.1.4 Susunan Struktur Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Bendahara Umum Daerah

Bupati	: Eddy Raya Samsuri, S.T., MM
Wakil Bupati	: Khristianto Yudha, S.T.
Sekretaris Daerah	: Edy Purwanto. AP. M.Si.
Bendahara Umum	: Akhmad Akmal Husaen. SSTP. MA.

6.1.5 Visi Dan Misi Bupati Barito Selatan

Visi:

Mewujudkan Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dan menjadi Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara

Misi:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi warga Barsel
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil
4. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasi sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
5. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
6. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal
7. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik

6.1.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah dan jenis organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Inspektorat, 5 (lima) Badan. 16 (enam belas) Dinas, 6 (enam) Kantor Kecamatan, dan 2 (dua) BLUD, serta 11 (sebelas) JKN pada FKTP Puskesmas.

6.1.7 Lembaga Keuangan dan Perbankan

Ada lima unit Lembaga Keuangan dan Perbankan di Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

1. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok;
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok;
3. Bank Mandiri Cabang Buntok;
4. Bank Nasional Indonesia 1946 Cabang Buntok; dan
5. Bank Tabungan Pensiunan Cabang Buntok

6.1.8 Profil Barito Selatan

Semboyan	:	Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Selamat Sentosa Adil Makmur sampai selama-lamanya
Peta Lokasi	:	Koordinat: 1º20 Lintang Utara - 2º35 Lintang Selatan dan 114º - 115º Bujur Timur
Provinsi	:	Kalimantan Tengah
Ibukota	:	Buntok
Bupati	:	Eddy Raya Samsuri, S.T., MM
Luas	:	8.830 Km²
Total Populasi	:	131.100 Jiwa (2020)
Kepadatan	:	15 Jiwa/Km²
Kode Area Tlpn	:	0525
Kecamatan	:	6
Website	:	http//www.baritoselatankab.go.id

Berikut ini adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 1959:

1. Gomer Tamin Binti (1959 - 1961)
2. Benjamin Tidja (1961 - 1967)
3. Urbanus Martjun (1967 - 1975)
4. Drs. H. Mangkusari (1976 - 1981)
5. H. Kamberani Seman. BA (1981 - 1991)
6. Drs. H. Asmawi Agani (1991 - 1996)
7. Ir. Achmad Diran (1996 - 2001)
8. Ir. H. Baharudin N. Lisa (2001 - 2011)
9. Ir. H. M. Farid Yusran. MM (2011 - 2016)
10. H. Eddy Raya Samsuri. ST (2017 - 2029)

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dan berbasis akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas.

Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan. dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI